

ARSIP

MEDIA KEARSIPAN NASIONAL



Hari Kearsipan Ke-50

**Tahun Emas Kearsipan :
Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital**





ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Selamat
Bertugas

Drs. Imam Gunarto, M.Hum
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia



Terimakasih
Atas Bakti
Terhadap Kearsipan Nasional

Dr. M. Taufik, M.Si
Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 2019-2021



RUBRIK

04 DARI REDAKSI

09 **ARTIKEL LAPORAN UTAMA**
TANTANGAN DUNIA KEARSIPAN
DI ERA POST-TRUTH

13 **KHAZANAH I**
DIPLOMASI HUMOR ALA GUSDUR
DI AMERIKA SERIKAT DALAM INVENTARIS
ARSIP FOTO KH. ABDURRAHMAN WAHID
TAHUN 1999-2003 JILID III

17 **KHAZANAH II**
KISAH PERBUDAKAN
DALAM KHAZANAH ARSIP VOC

21 **PRESERVASI**
MENOLAK KUTUKAN SUMBER DAYA

24 **MANCANEGARA**
MENGELOLA DAN MEMBUKA WARISAN:
*WORKSHOP ON CAPACITY DEVELOPMENT
IN MEMORY OF THE WORLD*

30 **DAERAH**
DIBALIK CAPAIAN NILAI TERTINGGI
PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL
TAHUN 2021

37 **HUKUM**
50 TAHUN KEARSIPAN
SEBUAH TANTANGAN PEMBARUAN
REGULASI KEARSIPAN

42 **VARIA**
ALAT PELINDUNG DIRI,
ARSIPARIS DAN PERKEMBANGAN ZAMAN

48 **LIPUTAN**



LAPORAN UTAMA 05
50 TAHUN KEARSIPAN INDONESIA
SATUKAN LANGKAH
MEWUJUDKAN ARSIP DIGITAL



TEKNOLOGI 34
SEBUAH KABAR BAIK :
TEKNOLOGI KEARSIPAN
DAN ETIKA LINGKUNGAN



CERITA KITA 45
KISAH KANG HADI



Desain Sampul : Aswin Budiarto

Pembina :
Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab :
Widarno

Pemimpin Redaksi :
Suminarsih

Dewan Redaksi :
Hilman Rosmana
Azmi
Bambang Parjono Widodo
M. Ihwan

Redaktur :
Susanti
Aria Maulana
Isanto
Intan Lidwina
Tiara Kharisma
Mudanto Pamungkas
Jajang Nurjaman
Erieka Nurlidya Utami

Editor :
Rayi Darmagara
Dimas Pratama Yuda
Bobby A. Dwiputra N.
Sitty Annisaa
Sari Agustin W.
Yosa Wisnu W.
Yuanita Utami

Desain Grafis :
Hendri E. Zulkarnain
Aswin Budiarto
Wahyu Setyo Budi
Rani Rizki Amalia

Fotografer :
Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Sekretariat :
Krestiana Evelyn
Putri Iswayanti
Ridha Sari Maulida Pratiwi

 www.anri.go.id

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id

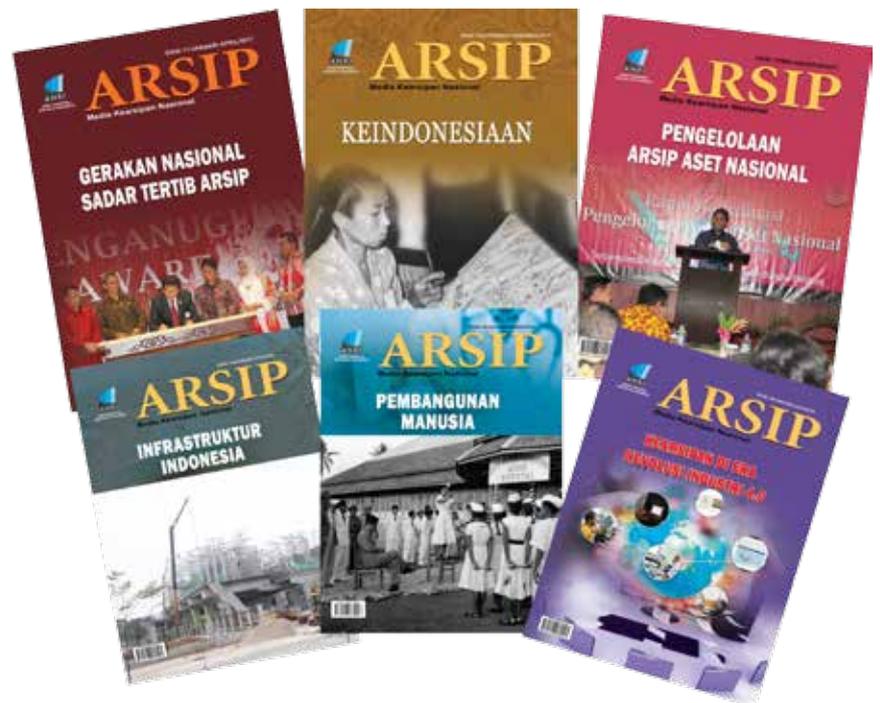
DARI REDAKSI

18 Mei 2021 merupakan tahun emas bagi penyelenggaraan kearsipan Indonesia. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan sendiri bagi dunia kearsipan. Mengusung tema “Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital”, peringatan Hari Kearsipan tahun ini bertujuan untuk menguatkan tekad bersama dan saling berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam menghadapi era pemerintahan berbasis elektronik (Industri 4.0). Presiden Joko Widodo juga berpesan pengelolaan arsip harus memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan inovasi di bidang kearsipan dijalankan demi layanan akses publik yang nyaman.

Bertambahnya energi positif dan spirit yang baru, majalah ARSIP edisi kali ini mengangkat tema Hari Kearsipan ke-50 Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital. Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Varia, Rubrik Teknologi, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Semoga sajian informasi pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi



50 TAHUN KEARSIPAN INDONESIA

SATUKAN LANGKAH MEWUJUDKAN ARSIP DIGITAL

“Di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini, pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban perlu waktu lama untuk menemukannya dan juga penyimpanan yang tersebar dimana-mana,” Presiden Joko Widodo dalam sambutan secara virtual pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50 (09/06)

Indonesia baru saja memperingati hari kearsipan dan peringatan Hari Kearsipan yang ke-50 tahun kali ini mengusung tema “Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital”. Peringatan Hari Kearsipan ke-50 tahun ini merupakan momentum emas bagi insan kearsipan untuk terus bersama-sama melangkah maju mendukung program pembangunan yang telah dicanangkan Pemerintah. Melalui momentum 50 tahun hari kearsipan ini, penyelenggaraan kearsipan diharapkan mampu mendorong cara baru pengelolaan arsip sesuai perkembangan teknologi dan informasi. ANRI mendorong pengelolaan arsip ke arah arsip digital sehingga diharapkan agar lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutan secara virtual pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50 “ Di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini. Pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-

cara baru, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban perlu waktu lama untuk menemukannya dan juga penyimpanan yang tersebar dimana-mana ”.

Hari Kearsipan di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 18 Mei selalu memiliki makna dan pesan bagi komunitas kearsipan. Hari Kearsipan bukanlah hari yang lahir begitu saja, melainkan hari yang lahir melalui serangkaian pemikiran dan perenungan yang mendalam. Berangkat dari kenyataan bahwa kearsipan masih belum mendapat tempat yang utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka para pendahulu di lembaga kearsipan ini menjadikan kenyataan itu sebagai salah satu fokus perjuangan.

Semangat dan nilai-nilai perjuangan inilah yang kemudian terlembagakan dalam bentuk Hari

Kearsipan. Hari Kearsipan yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, dilatarbelakangi oleh penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan yang disahkan pada 18 Mei 1971. Dengan demikian, jelaslah bahwa Hari Kearsipan diciptakan untuk menjaga ritme dan keberlanjutan semangat dalam penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Peringatan Hari Kearsipan kali ini memiliki makna yang sangat penting dan mendalam, karena di era Revolusi Industri 4.0 ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, segala sektor kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara tidak luput dari teknologi informasi digital yang sangat berdampak di bidang kearsipan.

Di tengah pandemi serta era teknologi seperti saat ini, Inovasi di bidang kearsipan harus terus dilakukan, sistem pengamanan arsip terus ditingkatkan karena paradigma saat ini kearsipan bukan hanya untuk pengelolaan arsip pemerintah saja tetapi juga untuk tema-tema publik yang berisikan konten dengan layanan arsip yang cepat dan optimal. “Inovasi pengarsipan tidak semata ditujukan untuk pengelolaan arsip pemerintahan, tetapi juga untuk tema-tema publik seperti yang dilakukan oleh beberapa



Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50, Jakarta, 9 Juni 2021

Negara dengan menyediakan portal yang berisikan konten dengan tema-tema yang akrab bagi publik dengan layanan akses yang nyaman”, terang Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50.

Plt. Kepala ANRI, M. Taufik menambahkan bahwa penyelenggaraan kearsipan diharapkan hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami mengharapkan penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional memperoleh tambahan energi positif dan spirit yang baru untuk meningkatkan perannya dalam memberikan manfaat secara nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat”, tutur Plt. Kepala ANRI, M. Taufik.

M. Taufik mendorong kepada komunitas kearsipan di republik ini untuk terus menerus meningkatkan

mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dalam mendukung pelayanan publik dan peningkatan efektifitas dan efisiensi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menuju Indonesia Maju serta mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia.

“Di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital ini, saya mengajak seluruh insan kearsipan untuk bersatu, menyatukan semangat dan langkah untuk mewujudkan arsip digital. Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pembina kearsipan nasional telah memulai semangat itu dengan menginisiasi terciptanya aplikasi “Srikandi” yang pada kesempatannya membuka jalan bagi kearsipan untuk ikut andil dalam kehidupan penting berbangsa dan bernegara di era Digital ini”, terang M. Taufik.

Aplikasi Srikandi telah diluncurkan menjadi Aplikasi Umum Bidang

Kearsipan Dinamis pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa.

Aplikasi Srikandi memiliki beberapa fitur utama. Pertama, fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar-instansi pemerintah. Kedua, terdapat fitur pemeliharaan arsip untuk menjaganya agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur penggunaan arsip oleh yang berhak, serta fitur penyusutan arsip yang meliputi pemindahan dan pemusnahan arsip. Aplikasi SRIKANDI dibangun dengan kerjasama antara beberapa instansi pemerintah yaitu ANRI, Kementerian

PAN dan RB, Kementerian Kominfo, dan BSSN. Aplikasi ini lahir sebagai perwujudan dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu bentuk inovasi dalam penyelenggaraan kearsipan agar layanan arsip menjadi lebih efektif dan efisien

Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi kehadiran aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan kearsipan. Menurutnya, Inovasi adalah kunci kemajuan adaptasi terhadap teknologi digital harus segera dilakukan, membuat layanan arsip yang cepat harus menjadi prioritas. Akses pada arsip yang nyaman bagi publik harus disiapkan. Ruang keterlibatan publik dan komunitas dalam pengarsipan harus didorong. “Karena itu saya mengapresiasi langkah badan Arsip Nasional untuk terus berinovasi dengan membangun aplikasi elektronik Sistem Informasi Kearsipan Elektronik SRIKANDI agar pengarsipan lebih terintegrasi, efisien, dan efektif. Sehingga lembaga pemerintah pusat sampai ke daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri. Suatu saat saya akan coba aplikasi ini, apakah betul-betul akan bisa menemukan arsip, data dan informasi dengan cepat, bukan lagi dalam hitungan jam ataupun hari tapi hanya perlu hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik”, ungkap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menambahkan bahwa keamanan juga menjadi perhatian utama dalam inovasi pengarsipan dengan membangun sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dipindahkan secara otomatis dari tempat penyimpanan.

Penggunaan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum instansi pemerintah dinilai sebagai bentuk peningkatan kualitas dalam bidang



Plt. Kepala ANRI, M. Taufik

kearsipan. Hal ini dikarenakan setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Dengan aplikasi ini, arsip yang tercipta dan dikelola dalam SPBE akan lebih optimal dalam melindungi kepentingan hak keperdataan rakyat.

Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia M. Taufik menyampaikan bahwa kearsipan harus terus mengikuti perkembangan zaman dan melakukan perubahan utamanya dalam penerapan SPBE. “Memasuki era disruptif kita dituntut melakukan perubahan yang cepat. Ini sebuah lompatan dalam kearsipan SPBE,” ujar M. Taufik dalam Launching Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan Dinamis dan Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Jakarta, Selasa (27/10).

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh insan kearsipan untuk sama – sama, bahu membahu dan saling menguatkan untuk senantiasa menyatukan Langkah mewujudkan arsip digital”, tambah M. Taufik.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PANRB, Alex Denni sangat mendukung

dan mengapresiasi langkah-langkah ANRI dalam mewujudkan transformasi digital di bidang kearsipan. “Kami sangat mengapresiasi upaya nyata ANRI untuk bertransformasi menjadi salah satu instansi yang berperan dalam transformasi digital nasional”, terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PANRB, Alex Denni pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan (08/06).

Menurut Alex Denni, pengelolaan arsip yang baik dan benar akan turut mendukung penyediaan arsip yang autentik dan terpercaya, sehingga diharapkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Dalam era transformasi digital dan berkembangnya industri 4.0 penyelenggaraan sistem kearsipan nasional sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sistem penyelenggaraan kearsipan nasional akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila lembaga kearsipan nasional didukung oleh suatu sistem informasi kearsipan nasional melalui penerapan aplikasi umum yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik”,

LAPORAN UTAMA

jelas Alex Denni.

Ditambahkannya, pengembangan dan pembinaan aplikasi SRIKANDI yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum SPBE pada tahun 2020 yang lalu diharapkan dapat terus dikembangkan dan dapat memenuhi meningkatnya ekspektasi pengguna atas kemanfaatan layanan kearsipan secara digital.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa selain meningkatkan transparansi kinerja, SRIKANDI sebagai aplikasi umum juga diharapkan dapat menutup celah korupsi. “Pelibatan inovasi teknologi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa dengan menjadikan institusi-institusi negara semakin transparan,” ujar Mahfud MD.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bicara tentang pentingnya sistem kearsipan digital. Menurut Mahfud, perlu ada sistem kearsipan yang bisa memudahkan untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat.

“Ke depan kita tidak bisa menghindari dari kerja-kerja yang seperti ini. Sekarang Saudara mau apa, mau berbohong, orang tahu. Oleh sebab itu, kita harus bikin sistem kearsipan dan sistem aplikasi yang bisa lebih mudah mendapatkan sesuatu dengan cepat,” tutur Mahfud.

Melalui SPBE, Mahfud berharap tidak ada lagi pegawai di pemerintahan yang berniat melakukan korupsi. Ia ingin pelayanan berbasis digital bisa meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.

“Nah ini untuk mencegah korupsi.



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

Antara lain orang-orang yang tidak mau, itu tidak bisa korupsi lagi soalnya. Jadi jumat ? dia pikirnya. Kalau gini gampang ketahuan, kalau gini terukur, kalau ini ndak bisa gini. Itu semua akan meminimalkan waktu proses data, pelayanan, dan transaksi yang bersifat manual. Pelibatan inovasi teknologi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dalam era disrupsi teknologi sekarang ini, pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru. Jokowi mengungkapkan bahwa pengelolaan arsip saat ini harus memanfaatkan kemajuan teknologi digital. “Di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini, pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban, perlu waktu lama untuk menemukannya dan juga penyimpanan yang tersebar di mana-



Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PANRB, Alex Denni

mana”, terang Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa negara-negara di dunia saat ini sedang berlomba-lomba berinovasi dalam menciptakan arsip berbasis elektronik. Sehingga, ketepatan dan keakuratan data menjadi lebih baik. Presiden Jokowi pun mendorong ANRI untuk terus berinovasi menciptakan teknologi pengarsipan yang modern. “ Saat ini saya mencatat berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk berinovasi mengembangkan manajemen arsip berbasis elektronik mulai dari cara melacak dan identifikasi arsip dengan cepat sampai dengan menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas”, jelas Jokowi.

Inovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih baik dan modern. Negara maju adalah Negara yang pengelolaan arsipnya modern. Dengan demikian diharapkan seluruh entitas kearsipan bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatukan langkah mewujudkan arsip digital menuju Indonesia Maju.



Dimas P. Yuda

TANTANGAN DUNIA KEARSIPAN DI ERA *POST-TRUTH*

Telah 50 tahun berlalu sejak UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan diundangkan pada tanggal 18 Mei 1971, tanggal yang menandai hari lahir kearsipan Republik Indonesia. Dunia berubah, UU Kearsipan Tahun 1971 kini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan apabila dibandingkan dengan saat ini tentu saja situasi di tahun 1971 sangat berbeda. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat, bahkan kini dikenal suatu era "*Post-Truth*" atau era "Pasca Kebenaran". Sebuah era di mana "*alternative fact*" dan juga hoax semakin diampifikasi oleh media sosial. Sebuah era yang suka atau tidak suka, siap atau tidak siap sedang dihadapi oleh dunia kearsipan.

Tulisan ini terinspirasi dari ceramah A. Setyo Wibowo mengenai, "Meneropong *Post-Truth*: Akar Psikologis dan Filosofis *Post-Truth*" yang diselenggarakan oleh Penerbit KPG dan Komunitas Utan Kayu pada tahun 2019 lalu sehingga banyak bagian dari tulisan ini mengutip isi dari ceramah yang merupakan hasil studi dari buku karya Lee McIntyre berjudul, "*Post-Truth*" yang terbit di tahun 2018.

Apa itu *Post-Truth*

Sebelum mengenal istilah *post-truth*, Wibowo terlebih dahulu

menjelaskan arti kata "*truth*" atau "kebenaran" itu sendiri. Setidaknya ada 6 (enam) teori mengenai kebenaran, antara lain: (1) Kebenaran korespondensi, bahwa sesuatu itu benar karena ada korespondensi antara pikiran dan kenyataan. Contohnya apabila seseorang memegang sebuah benda berupa buku dihadapannya dan adalah benar jika mengatakan bahwa benda tersebut adalah buku. (2) Kebenaran pragmatis atau kebenaran yang disepakati bersama. (3) Kebenaran performatif, yaitu kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya adalah penetapan pengurangan jumlah hari cuti bersama.

(4) Kebenaran koherensi, yaitu kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Contohnya adalah teori kecepatan dalam fisika yang dijelaskan melalui rumus-rumus. (5) Kebenaran eventual, yaitu kebenaran yang muncul terkait dengan konteks atau peristiwa yang mewujudkan kebenaran tersebut. Contohnya adalah reformasi yang merubah tatanan sosial politik. (6) Kebenaran dialogis yaitu, kebenaran yang terus menerus berubah karena dianggap masih menyembunyikan sesuatu.

Lantas apa yang dimaksud dengan *post-truth*? Kamus Oxford yang pernah menobatkan kata "*post truth*" sebagai *word of the year* di tahun

2016 mendefinisikannya sebagai, "*Describing situations in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*", atau dalam bahasa sederhananya adalah situasi di mana fakta yang obyektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan personal.

Fakta obyektif menjadi tidak dihiraukan dan bahkan disesuaikan dengan keadaan. Apabila dahulu filsuf René Descartes mengusung "*cogito ergo sum*" atau "*I think therefore I am*" (aku berpikir, maka aku ada) sebagai "*le doute methodique*" (metode kesangsian) untuk menemukan *fundamentum certum et inconcussum veritates* (kepastian dasariah dan kebenaran yang kokoh), maka kini di era *post-truth* yang berlaku adalah, "*I believe therefore I am right*". Sebagai akibatnya muncul wacana fakta alternatif (*alternative fact*) atau bahkan hoax yang digunakan untuk menantang suatu fakta obyektif.

Akar Psikologis, Sosiologis, dan Filosofis *Post-Truth*

Wibowo, mengutip McIntyre, menjelaskan bahwa *post-truth* memiliki akar psikologis, sosiologis, dan filosofis. Akar psikologis *post-truth* dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada situasi biasa terdapat 3 (tiga) tingkat kekeliruan yang dapat berujung

LAPORAN UTAMA

menjadi kebohongan (yang jahat), yaitu: keliru; *willful ignorance* (sengaja tidak mau tahu); dan, berbohong. Pertama, terkadang manusia keliru tanpa ada maksud jahat dan pada saat menyadarinya segera meminta maaf karena sifatnya memang tidak disengaja. Kedua, ada kalanya manusia masuk dalam situasi *willful ignorance* di mana tidak mengetahui sesuatu tetapi tidak mau memeriksa kebenarannya. Dalam hal ini kekeliruan disengaja, atau ada sebuah sikap tidak mau tau. Ketiga, saat orang sungguh-sungguh berbohong dengan maksud menipu.

Dalam sudut pandang ilmu psikologi, post-truth berakar dalam jiwa manusia yang mudah jatuh dalam *cognitive bias*. Manusia ternyata tidak serasional yang dianggap selama ini. Di hadapan sebuah fakta obyektif yang tidak disukainya manusia cenderung jatuh dalam *cognitive bias* di mana ego manusia memiliki mekanisme pertahanan diri untuk menolak fakta obyektif tersebut.

Menurut McIntyre setidaknya ada 6 (enam) bentuk *cognitive bias*. Pertama, *cognitive dissonance* atau ketidakcocokan dengan pengetahuan namun dipaksakan untuk diharmoniskan. Contohnya adalah ketika seseorang tahu bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, tetapi mencari pembenaran untuk tetap merokok. Kedua, *source amnesia* di mana terjadi kelupaan pada sumber atau mengingat sesuatu yang pernah didengar atau dibaca tetapi tidak tau secara persis apakah sumbernya valid/kredibel. *Cognitive bias* bentuk ini juga menjelaskan istilah *de javu* yang mungkin pernah dialami oleh seseorang. Ketiga, *repetition effect* yaitu, bias yang disebabkan oleh message yang diulang secara terus menerus sehingga orang percaya. Ucapan propagandis Nazi terkemuka Joseph Goebbels, "*If you repeat a lie often enough, it becomes truth*", barangkali sesuai dengan bias bentuk ini.

Keempat, *backfire effect* atau kondisi di mana seseorang menjadi

semakin percaya dengan keyakinan personalnya ketika ditunjukkan atau dikoreksi kesalahannya. Kelima, *Dunning-Kruger effect* yaitu, bias yang merujuk pada kemampuan intelektual seseorang yang terlalu rendah sehingga mereka tidak mampu memahami ketidakmampuan mereka sendiri. Kadang disebut, "*too stupid to know they are stupid*". Keenam, *confirmation bias* atau kecenderungan seseorang memilah dan memilih fakta yang sesuai dengan keyakinan yang memang telah diyakini. Seseorang memilih fakta berdasarkan selera yang dimiliki.

Adapun akar sosiologis dari *post-truth* berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk dalam hal ini media sosial yang telah memungkinkan setiap orang menjadi pengarang, editor dan penerbit untuk apa yang mereka anggap benar. Kondisi ini membuat situasi anarkis pemberitaan kepada masyarakat sehingga *hoax* atau *fake news* beralih *alternative fact* menjadi sesuatu yang dianggap biasa saja. Tentu saja hal ini bukan tidak mungkin dapat menciptakan polarisasi masyarakat yang dapat memecah belah keutuhan suatu bangsa.

Selain akar psikologis dan sosiologis sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga akar filosofis dari *post-truth* yaitu, postmodernisme. Bahkan dalam diagnosisnya mengenai *post-truth*, McIntyre menyebutkan kalimat yang mungkin akan membuat sebagian orang merah telinganya dengan mengatakan bahwa postmodernisme memang *Godfather-nya post-truth*.

Mengutip I. Bambang Sugiharto dalam bukunya, "Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat" (1996), postmodernisme diartikan sebagai, "ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar; penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah dan bentuk pemikiran yang mentotalisasi – seperti Hegelianisme, Liberalisme, Marxisme, atau apa pun". Singkatnya, tokoh

postmodernisme seperti Derrida yang cenderung relativistik dan nihilistik misalnya, memiliki gagasan bahwa pada akhirnya bahasa dan kata-kata adalah kosong belaka selain mereka sebetulnya menunjuk pada sesuatu apa pun selain "makna"-nya sendiri. "Makna" itu pun tidak lain adalah permainan pembedaan (*différance*): pembedaan arti yang dimungkinkan oleh sistem lawan-kata atau tidak lain adalah permainan semilogik atau permainan tanda-tanda (Sugiharto, 1996, h. 37).

Sugiharto mengatakan, "Melalui dekonstruksi, sebuah teks tak lagi merupakan tatanan makna yang utuh, melainkan menjadi sebuah pergulatan antara upaya penataan dan *chaos*, pergulatan untuk mengatasi materialitas teks demi mencapai transparansi, yang sia-sia" (Sugiharto, 1996, h. 46). Dengan kata lain, postmodernisme skeptis terhadap kebenaran atau fakta obyektif. Terkait dengan akar filosofis dari *post-truth*, di sinilah terlihat sebuah fakta ironis yang dapat saja muncul dalam konteks: ketika masyarakat bingung dengan kebenaran, mereka justru sulit untuk mendapatkannya dari para intelektual yang justru skeptis pada rasio dan kebenaran.

Sebuah kasus menarik mengenai penerapan cara berpikir postmodernisme dapat diceritakan sebagai berikut. Dalam ranah sosiologi cara berpikir postmodernisme ini muncul dalam bentuk "*social constructivism*" (konstruktivisme sosial), yaitu teori yang mempercayai bahwa arti yang dilekatkan pada sebuah obyek adalah hasil dari kesepakatan dan konvensi sosial bersama. Sebuah contoh yang mengejutkan adalah penulis bernama Sandra Harding yang dalam karyanya berjudul, "*The Science Question in Feminism*" menyebutkan bahwa Principia Mathematica karya Newton adalah sebuah "*rape manual*" (manual/pedoman untuk memerkoska), meskipun belakangan Harding menyesali pernyataannya itu. Teori saintifik dianggap tidak pernah

menyatakan kebenaran apapun tentang alam, melainkan hanyalah proyeksi personal si ahli sains yang hidup dalam konteks sosial tertentu.

Kedongkolan terhadap cara berpikir postmodernisme seperti itu kemudian membuat seorang fisikawan bernama Alan Sokal membuat sebuah artikel berjudul, "*Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity*" yang berisi kritik terhadap teori-teori fisika seperti Teori Konstanta dari Einstein atau Teori Himpunan Zermelo-Faenkel dengan menggunakan kutipan-kutipan dari tokoh postmodernisme seperti, Derrida, Lyotard, Lacan dan lain-lain (lihat juga, Abdulsalam, "Belajar Hoax dari Prof. Alan Sokal", Tirta, 4 September 2017).

Sebagaimana telah diduga oleh Sokal, artikel tersebut kemudian terbit di sebuah jurnal *Social Text* di mana salah satu pendiri jurnal tersebut adalah Fredric Jameson yang kebetulan seorang puak postmodernisme. Belakangan Sokal mengakui bahwa artikel tersebut adalah sebuah hoax yang sengaja ia lakukan untuk menunjukkan kelemahan intelektual dari para puak postmodernisme. Lebih jauh Sokal mengatakan bahwa, "... siapapun yang percaya bahwa hukum fisika adalah kesepakatan sosial belaka, saya undang untuk membuktikan hal tersebut dari jendela apartemen saya. Apartemen saya berada di lantai 21". Dijelaskan oleh Wibowo, sejak terbit artikel Sokal tersebut sikap para akademikus memandang bahwa postmodernisme adalah pemikiran yang tidak serius, hanya main-main saja dan "*intellectually bankrupt*".

Dunia Kearsipan dan Tantangan Post-Truth

Setelah mengetahui sedikit banyak mengenai *post-truth*, maka jelas bahwa peran dunia kearsipan sangatlah penting dalam menghadapi hantaman *post-truth* baik dalam segi kohesivitas sosial maupun ilmu pengetahuan pada umumnya. Era

post-truth sebagaimana terlihat dari akar psikologis, sosiologis dan filosofis di atas menuntut hadirnya sebuah fakta obyektif yang dalam konteks ini adalah sebuah fakta yang memang menunjukkan terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa yang dilakukan baik oleh entitas negara, bisnis maupun masyarakat sebagaimana adanya.

Terlebih lagi dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini yang begitu cepat dan masuk ke dalam setiap lini kehidupan. Di satu sisi perkembangan TIK tersebut memang memberikan manfaat, akan tetapi di sisi yang lain juga menimbulkan apa yang disebut sebagai "banjir informasi". Kondisi ini telah membuat banyak orang kewalahan dalam menyerap dan mengelola atau bahkan mempercayai informasi yang diperolehnya.

Duranti dalam tulisannya, "*Whose Truth. Records and archives as evidence in the era of post-truth and disinformation*" (2019), memberi perhatian khusus terhadap masalah *post-truth* ini kaitannya dengan kearsipan di era digital. Duranti mengidentifikasi setidaknya 3 (tiga) tantangan: (1) Masyarakat mendapatkan informasi yang telah "disaring" oleh algoritma dari media sosial sehingga hanya mendapatkan informasi yang menguatkan pandangan sempit dari diri dan lingkungan pertemanannya. (2) Terancamnya privasi seseorang karena perusahaan besar memanfaatkan data pribadi untuk kepentingan bisnisnya dan membuat otoritas juga dapat melakukan pengawasan atau akses terhadap data pribadi tersebut. (3) Infrastruktur TIK yang semakin rumit dan seringkali tidak terlihat dan tersembunyi sehingga sulit bagi pekerja kearsipan untuk mendapatkan informasi secara utuh dan dalam konteks yang memang sesuai.

Secara umum, tulisan Duranti tersebut menunjukkan sulitnya memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses, jika bukan sebuah

kebenaran, informasi yang faktual dan utuh berdasarkan sumber yang autentik, akurat, dan dapat diandalkan sesuai dengan konteksnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, misalnya (1) membangun dan mempromosikan *Computational Archival Science (CAS)*, yaitu bidang interdisipliner yang berkaitan dengan penerapan metode sumber daya komputasi untuk pemrosesan arsip arsip skala besar, analisis penyimpanan jangka panjang dan akses dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan presisi dalam mendukung pemanfaatan arsip.

(2) Arsiparis dan pekerja kearsipan lainnya harus dapat mengidentifikasi kemampuan dari teknologi yang telah ada misalnya *machine-learning tools* atau *visual analytics tools* serta perangkat yang mudah untuk diciptakan untuk memudahkan penilaian autentikasi dari sebuah arsip atau penelusuran sumber dari sebuah arsip digital itu berasal. (3) menyarankan kepada pemerintah atau pembuat kebijakan untuk menggunakan arsip dan arsip digital sebagai sumber dalam menangani *platform Internet of Things*. Dalam hal ini mereka harus memahami aspek aturan mengenai perlindungan data pribadi, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan lain-lain.

Arsip sebagai sebuah rekaman kegiatan atau peristiwa tentunya diharapkan dapat menunjukkan representasi dari sebuah fakta obyektif. Tentu saja ada banyak peran dari kearsipan untuk menghadapi hantaman dari *post-truth* seperti misalnya yang telah disampaikan oleh Duranti, dalam tataran lebih praktis dan mikro, penulis akan mencoba menawarkan 3 (tiga) hal yang mungkin dapat dilakukan, yaitu arsip yang memberkas, *trustworthiness* arsip, dan akses arsip.

Pertama, melalui arsip suatu kegiatan atau peristiwa terjadi sebagaimana adanya sesuai dengan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana atau pencipta arsip

tersebut. Sebagai contoh, ketika suatu lembaga negara melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat sebagai akibat dampak dari pandemi Covid-19, maka lembaga negara sebagai pencipta arsip akan menghasilkan arsip kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Dengan demikian, arsip yang tercipta sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial dapat mencerminkan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh para aktor di dalamnya, termasuk juga bagaimana dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut bagi masyarakat yang menjadi sasaran dari kegiatan maupun apabila terjadi hal-hal lain di luar rencana yang terekam melalui arsip-nya. Dari sini kita dapat mafhum mengenai pentingnya sebuah arsip yang memberkas yaitu, arsip yang di dalamnya naskah ditempatkan dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu pencipta arsip.

Arsip yang memberkas akan memperlihatkan bagaimana suatu kegiatan atau peristiwa itu berlangsung dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, atau bagaimana kegiatan atau peristiwa tersebut terjadi sebagaimana (lengkap) adanya. Sebaliknya, arsip yang tidak memberkas hanya akan memberikan ruang kosong yang menyebabkan pertanyaan, interpretasi atau bahkan mungkin “spekulasi liar” dari para pengguna arsip tersebut di kemudian hari.

Kedua, selain pentingnya arsip yang memberkas, *trustworthiness* dari sebuah arsip sedikit banyaknya juga akan dapat membantu menghadapi tantangan *post-truth*. Masalah *trustworthiness* dalam kearsipan

sesungguhnya telah lama dipraktikan dan dikenal dengan ilmu *Diplomatics*. Berkembang sejak Abad-17 di Eropa, ilmu ini telah memberikan perhatian bagaimana suatu bentuk arsip yang dapat dipercaya (*trustworthiness*). Dalam perkembangannya, modern *diplomatics* kemudian tidak hanya terkait dengan autentik atau tidaknya suatu arsip yang telah tercipta berdasarkan bentuk spesifik aturan formal yang berlaku pada saat itu dan dibuat oleh orang yang memiliki kompetensi membuatnya, tetapi juga memastikan bahwa arsip yang akan tercipta memenuhi aspek-aspek dari arsip yang dapat dipercaya yaitu reliabilitas, keaslian, akurasi, dan autentikasi (Duranti via Kirschenbaum et. al., 2010).

Aturan normatif mengenai dapat dipercayanya suatu arsip tersebut sesungguhnya pun telah ada di dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang di dalam banyak norma hukum, khususnya yang mengatur mengenai arsip statis, mewajibkan arsip statis yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan. Terwujudnya *trustworthiness* dari arsip ini tentu saja sangat terkait dengan proses atau penanganan pada saat arsip tersebut berada di penciptanya atau pada saat arsip itu masih merupakan arsip dinamis. Salah satu hal yang penting namun kerap kali diabaikan misalnya adalah ketika membuat sebuah surat sesuai dengan tata naskah dinas. Surat yang sesuai dengan tata naskah dinas menegaskan bahwa surat/ arsip tersebut adalah memang dibuat sesuai persyaratan pembuatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencipta arsip yang mematuhi ketentuan norma hukum tersebut juga telah memperkuat posisi dunia kearsipan dalam menghadapi tantangan *post-truth*.

Terakhir, setelah arsip yang memberkas dan *trustworthiness* arsip, adalah akses arsip. Lembaga kearsipan dan pencipta arsip memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam membuka akses arsip

kepada para pengguna, tetapi juga memperkuat fungsi dari akses arsip itu sendiri. Memperkuat fungsi dari akses arsip berarti penyedia akses tidak hanya memberikan “akses kepada informasi” (*access to information*) mengenai keberadaan arsip, tetapi juga “akses kepada pengetahuan” (*access to knowledge*) dari koleksi arsip yang dimilikinya.

Akses terhadap pengetahuan dari koleksi arsip ini sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada para pengguna mengetahui fakta obyektif dari sebuah arsip. Akses berarti tidak hanya ada informasi bahwa arsip tersebut tersimpan dengan baik dan dapat diakses, tetapi juga seperti apa suatu kegiatan atau peristiwa secara utuh itu dapat diketahui dari sebuah arsip. Termasuk misalnya keterkaitan suatu arsip dari pencipta arsip tertentu dengan arsip dari pencipta arsip lainnya serta konteks mengenai bagaimana arsip tersebut tercipta.

Ketiga hal yang disampaikan oleh penulis dalam memperkuat posisi dunia kearsipan dalam menghadapi tantangan *post-truth* tersebut hanyalah sekilas pendapat dan sudah barang tentu membutuhkan elaborasi lebih dalam. Namun di dunia kearsipan yang luas, tentu saja ketiganya adalah beberapa contoh saja yang mungkin dapat dipertimbangkan dan didiskusikan lebih lanjut.

Dalam konteks menghadapi tantangan dari *post-truth*, ketiga hal yang penulis sampaikan barangkali dapat bermanfaat bagi dunia kearsipan untuk memperkuat posisinya. Pada prinsipnya adalah, ketika *post-truth* membuat masyarakat yang sedang bingung akan kebenaran semakin bingung, maka para intelektual yang dibantu oleh dunia kearsipan melalui pemanfaatan arsip dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan yang layak bagi masyarakat.

DIPLOMASI HUMOR ALA GUS DUR DI AMERIKA SERIKAT DALAM INVENTARIS ARSIP FOTO

KH. ABDURRAHMAN WAHID

TAHUN 1999 – 2003 JILID III

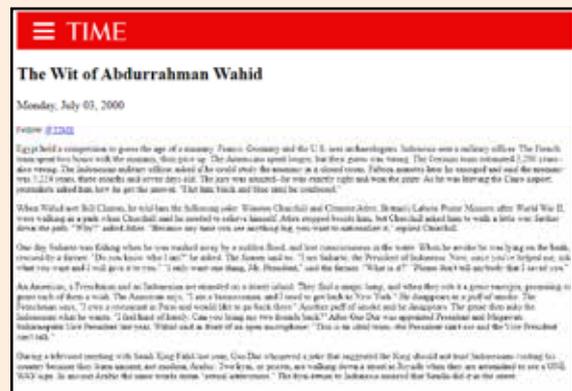
Gitu aja, kok repot! Pernyataan terkenal yang sering kita dengar dari seorang tokoh Kyai sekaligus pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia. Meski terdengar kontroversial, namun ucapan dari Kyai tersebut seringkali membuat banyak orang sadar sekaligus memancing orang untuk ikut berpikir dan merenung. Sekalipun pandangan matanya terganggu, tokoh tersebut dikenal sebagai seorang yang humoris. Siapa sangka karena humor, *joke* serta cerita lucunya beliau disukai oleh banyak tokoh dunia. Tokoh tersebut biasa dipanggil dengan panggilan Gus Dur.

Gus Dur memiliki nama lengkap Dr. (H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid, pria kelahiran kota Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Gus Dur lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur, putra pertama dari enam bersaudara dari pasangan KH. Wahid Hasyim dan Nyai Solichah Bisri. Gus Dur wafat di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Dalam sejarahnya, menjelang pertengahan 1998, melihat situasi negara Indonesia yang tidak kondusif pada saat itu, Gus Dur membuat Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) bersama tokoh NU lainnya sebagai wadah bagi masyarakat NU supaya bisa mengikuti pemilihan legislatif tahun 1999. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan memulai memilih presiden baru. Gus Dur kemudian terpilih sebagai presiden ke-4 dengan 373 suara, unggul di atas Megawati dengan perolehan 313 suara (Hamid, 2010, p. 53). Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001 menggantikan Presiden B.J. Habibie. Gus Dur dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001.

Salah satu humor dari Gus Dur yang sangat menggelitik adalah pada saat beliau memberikan pidato. Dalam pidatonya Gus Dur runtut menyebutkan

status kepresidenan dari masa Presiden Sukarno sampai dirinya, yaitu “Pak Karno itu presiden yang negarawan, Pak Harto hartawan, Pak Habibie ilmuwan, sedang saya sendiri Wisatawan,” ujar Gus Dur jujur. Jawaban tersebut sekaligus merupakan jawaban Gus Dur yang bersahabat atas kritik bahwa dirinya sebagai presiden yang sering pergi ke luar negeri seperti berwisata saja. Terang saja selama menjadi Presiden Indonesia dari 20 Oktober 1999 s.d 23 Juli 2001 sekitar 20 bulan, Gus Dur melakukan kunjungan kerja Presiden ke luar negeri sebanyak 80 negara di dunia. Kunjungan ke-80 negara tersebut semua terangkum dan dapat dilihat dalam “Inventaris Arsip Statis Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus



Tangkapan Layar Website Time
Sumber: <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2040274,00.html>

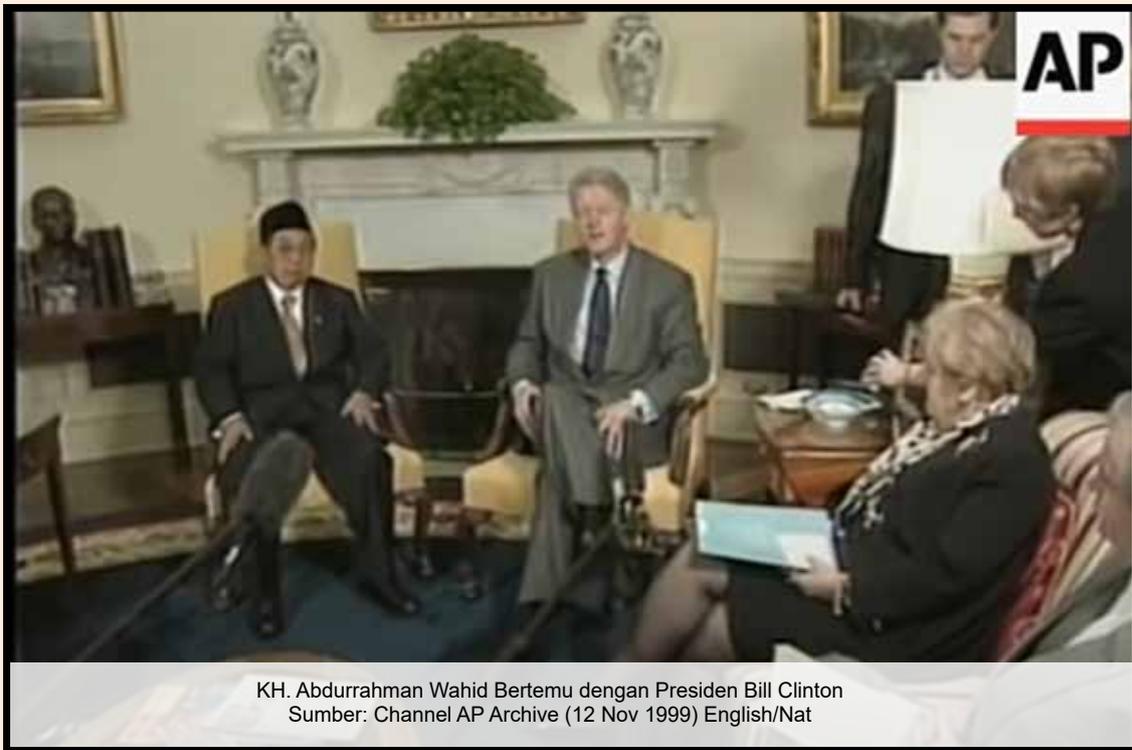
Dur) Tahun 1999-2003 Jilid 1 -5”.

Hal yang menarik dari arsip foto Gus Dur adalah adanya kisah humor dibalik pertemuan Gus Dur dengan para pemimpin dunia. Pesona Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia membius para pemimpin negara dan tentu saja media massa pada masa itu. Hal tersebut terbukti dari penuturan Istrinya yaitu Ibu Sinta

Nuriyah pada saat tim Pengolah melakukan penelusuran sumber dan referensi di kediaman beliau di Ciganjur, Jakarta Selatan bersama dengan staf ahlinya Bapak Priyo Sambadha. Berdasarkan penuturan dari Ibu Sinta, terdapat kisah dalam arsip foto yang menarik pada saat pertemuan Gus Dur dengan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di Gedung

Putih bersamaan dengan kunjungan Gus Dur ke kota Washington DC, New York, dan Salt Lake City, Utah tanggal 11 sampai dengan 15 November 1999.

Pada awalnya pertemuan tersebut hanya diberikan waktu 30 menit saja yang hanya membahas mengenai penguatan hubungan militer antara Amerika Serikat dan Indonesia



KH. Abdurrahman Wahid Bertemu dengan Presiden Bill Clinton
Sumber: Channel AP Archive (12 Nov 1999) English/Nat

serta negara Timor Leste yang baru merdeka. Namun saat tengah berbincang, suasana cair yang terjadi justru menghabiskan waktu hingga satu jam setengah atau 90 menit. Tentu saja protokoler Gedung Putih menjadi terheran-heran karena bukan karakter Bill Clinton seperti biasanya. Sehari kemudian, pertemuan tersebut menjadi perbincangan yang luar biasa hangatnya media massa seantero Amerika Serikat. Mengingat Presiden Bill Clinton memiliki agenda lain yang luar biasa padatnya. Namun yang terjadi ialah kunjungan itu mundur

hingga 90 menit lamanya.

Pada saat itu banyak koran-koran Amerika memuat foto Gus Dur bersama Bill Clinton, dan Clinton terlihat ketawa terbahak sampai kepalanya mendongak. Tentu saja yang bikin masyarakat Amerika Serikat penasaran ialah karena Clinton terlihat tertawa terbahak-bahak sampai kepalanya mendongak. Apa yang dikatakan Gus Dur sampai membuat Clinton terpingkal-pingkal begitu? Usut punya usut, Gus Dur bercerita tentang pendahulu Clinton, John F Kennedy yang ia baca dari

buku mengenai Presiden Kennedy. Cerita lucu tersebut mengenai suatu hari Kennedy mengajak serombongan wartawan ke ruang kerja Presiden AS. Di salah satu dindingnya ada sebuah lubang kecil tempat Presiden Dwight Eisenhower menaruh peralatan golfnya. "Ini lho, perpustakaannya Eisenhower," kata Kennedy mengejek pendahulunya itu. Clinton pun terpingkal mendengarkan cerita Gus Dur itu.

Cerita lucu lainnya yang membuat Presiden Clinton semakin tertawa terbahak-bahak adalah saat Gus

Dur bercerita kepada Clinton tentang humor Winston Churchill dan Clement Atlee. Clement Atlee adalah Perdana Menteri Inggris tahun 1945-1951 pasca Perang Dunia kedua. Saat itu, kebijakan Atlee berfokus kepada pemulihan ekonomi Inggris dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar Inggris. Suatu hari, lanjut Gus Dur, Clement Atlee sedang buang air kecil di kamar mandi gedung parlemen Inggris. Sejurus kemudian, Winston Churchill datang ke kamar mandi, ingin buang air juga. Churchill mengambil posisi di sebelah Atlee. Ketika Churchill tiba-tiba datang, spontan Atlee menengok ke arah Churchill. Mereka saling bertatapan muka. Kemudian Churchill berkata kepada Atlee dengan ketus: “Anda jangan lihat-lihat ke arah saya, ya!”, “Loh, kenapa?” Tanya Atlee. Churchill menjawab: “Soalnya Anda suka menasionalisasi barang yang besar-besar!”. Kedua cerita lucu tersebut sukses membuat Presiden Clinton tertawa hingga terpingkal-pingkal serta menahan Gus Dur untuk mengobrol lebih lama.

Cerita lucu lainnya yang membuat Presiden Clinton semakin tertawa terbahak-bahak adalah saat Gus Dur bercerita kepada Clinton tentang humor Winston Churchill dan Clement Atlee. Clement Atlee adalah Perdana Menteri Inggris tahun 1945-1951 pasca Perang Dunia kedua. Saat itu, kebijakan Atlee berfokus kepada pemulihan ekonomi Inggris dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar Inggris. Suatu hari, lanjut Gus Dur, Clement Atlee sedang buang air kecil di kamar mandi gedung parlemen Inggris. Sejurus kemudian, Winston Churchill datang ke kamar mandi, ingin buang air juga. Churchill mengambil posisi di



Nomor Arsip 5076: Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid tertawa bersama dengan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Tampak tangan kanan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton memegang tangan kiri Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Sumber: Inventaris Arsip Statis Foto Gus Dur Seri III: Kunjungan Kerja Presiden ke Wilayah Benua Afrika, Amerika, Eropa dan Australia Pasifik.

sebelah Atlee. Ketika Churchill tiba-tiba datang, spontan Atlee menengok ke arah Churchill. Mereka saling bertatapan muka. Kemudian Churchill berkata kepada Atlee dengan ketus: “Anda jangan lihat-lihat ke arah saya, ya!”, “Loh, kenapa?” Tanya Atlee. Churchill menjawab: “Soalnya Anda suka menasionalisasi barang yang besar-besar!”. Kedua cerita lucu tersebut sukses membuat Presiden Clinton tertawa hingga terpingkal-pingkal serta menahan Gus Dur untuk mengobrol lebih lama.

Situasi pertemuan tersebut semakin meriah ketika Gus Dur dan Clinton memberi keterangan pers di Ruang Oval. Suara tawa yang berderai-derai memenuhi ruangan. Jawaban Gus Dur atas pertanyaan mengenai masalah toleransi dan kehidupan antar-agama di Indonesia membuat para wartawan antusias untuk terus bertanya. Pada saat itu, Gus Dur berbicara langsung dalam



Nomor 5062: Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mempersilahkan Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid untuk memasuki Oval Room di Gedung Putih



Nomor 5075: Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid didampingi putri keduanya Yenny Wahid dan ajudannya Kombes Pol Halba (ketiga dari kiri) berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton usai mengadakan pertemuan di Gedung Putih. Tampak Presiden Clinton menggenggam tangan kanan Presiden KH. Abdurrahman Wahid sambil tersenyum. Sumber: Inventaris Arsip Statis Foto Gus Dur Seri III: Kunjungan Kerja Presiden ke Wilayah Benua Afrika, Amerika, Eropa dan Australia Pasifik.

bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Belanda. Menurut Ibu Sinta, menggambarkan bahwa suasana waktu itu penuh dengan kenangan yang tidak terlupakan. Dalam kunjungannya banyak diselengi tawa dan senyum bercampur beberapa kritik lunak dari orang-orang yang hadir. Hingga waktu pertemuan selesai, Gus Dur diantar secara khusus oleh Bill Clinton hingga ke pintu utama Gedung Putih. Hal tersebut terlihat jelas dalam arsip foto kunjungan kerja Presiden ke Amerika Serikat. Dalam file Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid bertemu dengan

Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di Oval Room, Gedung Putih, Amerika Serikat di Nomor 5059 s.d 5079.

Berdasarkan penuturan dari staf ahli Ibu Sinta yaitu Bapak Priyo menjelaskan bahwa hasil pertemuan yang membuat Clinton tertawa terbak adalah Indonesia mendapat penjadwalan pinjaman luar negeri lunak serta mendapatkan komitmen dari Amerika Serikat dalam mendukung penuh keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menunjukkan bahwa cara diplomasi dan Politik tingkat tinggi dari humor seorang Gus Dur sangat besar

sekali pengaruhnya. Gus Dur dikenal memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa dan terkesan santai, membuat banyak cerita pengalaman kenegaraan yang dijalani Gus Dur saat menjadi Presiden RI meninggalkan kenangan bagi saksi sejarah yang menyaksikannya. Humor sang presiden bisa menjadi penyambung, pengikat hubungan antara satu negara dengan negara lain. Mengutip kata Gus Dur bahwa "Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat, Gitu saja kok repot!".



Jajang Nurjaman

KISAH PERBUDAKAN DALAM KHAZANAH ARSIP VOC

Perbudakan dalam sebuah kisah Yunani kuno digambarkan sebagai praktik yang biasa dilakukan. Aristoteles bahkan menyebutkan dalam bukunya *La Politica*, perbudakan merupakan sistem sosial yang terjadi secara alamiah dan tidak bisa dihindarkan. Perbudakan juga sudah dikenal di Nusantara, ketika masa kurun niaga (1400-1700) perbudakan dianggap sesuatu yang sah. Orang menawarkan dirinya menjadi budak karena ketidakmampuannya membayar utang misalnya, atau ketidakmampuan melunasi mas kawin, atau juga memang bekerja mencari pendapatan. Pekerjaannya macam-macam, bisa bekerja untuk membangun istana, rumah, atau juga untuk menghibur para tuannya.

Ketika masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di Nusantara, budak termasuk dalam salah satu komoditas. Walaupun perdagangan budak di Nusantara tidak seramai dengan yang ada di

Afrika atau Amerika, komoditas budak ini tetap tercatat dalam arsip-arsip VOC yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). VOC tidak begitu memainkan peran yang besar terhadap perdagangan budak transatlantic. Namun, VOC sering menggunakan budak (*slaaf*) atau sering juga disebut dengan *Ijfeigenen* dan juga sering mengangkut budak-budak untuk kemudian dipekerjakan di Batavia atau di tempat-tempat lain yang memiliki kebun untuk diolah. Budak di zaman VOC terikat dengan aturan-aturan yang melindungi budak tersebut dari eksploitasi pemiliknya. Bahkan, VOC mengatur sanksi yang dijatuhkan ketika ada kekerasan terhadap budak, ataupun budak yang melakukan kekerasan terhadap tuannya. Aturan pembebasan budak juga diatur dalam peraturan yang diterbitkan VOC. Aturan-aturan tersebut misalnya budak tidak boleh diangkut atau dibebaskan tanpa seizin sekretaris atau notaris, budak harus memakai topi, dan juga harga

budak yang disepakati bila ada pembebasan budak.

VOC juga pernah menerbitkan aturan-aturan perbudakan yang tercantum dalam *plakkaatboek* atau peraturan yang ditempel di tembok kota, tanggal 4 Mei 1622. Aturan ini diterbitkan VOC bertujuan untuk memberi batasan-batasan tegas seputar perdagangan budak. Perdagangan budak ini dianggap memalukan bagi gelombang pertama para pendatang Eropa di Batavia, kaum muslim di Batavia, dan warga India. Dalam peraturan itu, dituliskan judulnya "*Voorschriften nopens 't verhandelen, regeren ende 'opvoeden' van slaven*" (Peraturan tentang Perdagangan, Pengaturan, dan "Pendidikan" Para Budak). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa orang Nasrani boleh membeli budak dari kaum lain selain Nasrani, namun tidak boleh menjual kepada orang selain Nasrani. Untuk orang Islam, Cina, dan Moor juga diberlakukan hal serupa, mereka tidak boleh menjual

budak kepada komunitas lain di luar mereka. Maka, untuk mengetahui perihal penjualan dan Pendidikan ini, segala aktivitasnya harus dicatat di hadapan notaris yang berwenang. Catatan-catatan inilah yang nantinya akan menjadi informasi penting di dalam arsip Notaris Batavia dan Daerah sekitarnya yang ada di ANRI.

CERITA-CERITA BUDAK DALAM ARSIP VOC

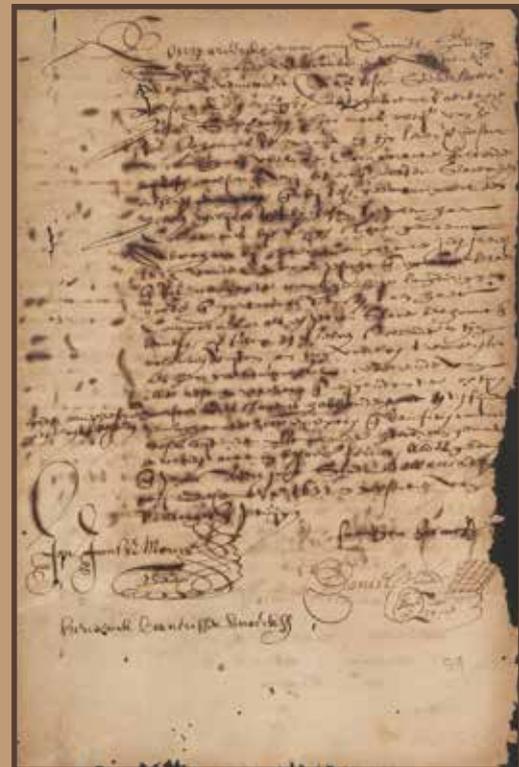
Dari banyak informasi unik dalam arsip VOC, informasi mengenai kisah-kisah budak yang menetap di Nusantara, atau yang diangkut dari belahan dunia luar lalu diperdagangkan di Nusantara, menjadi salah satu informasi yang menarik. Budak-budak yang datang, utamanya ke Batavia kemudian membentuk komunitas. Bahkan, budak milik perorangan ataupun milik swasta di daerah *ommelanden* atau wilayah luar kastil sekitar Batavia, jumlahnya hampir separuh dari jumlah penduduk kota. Niemeijer dalam bukunya Batavia, Masyarakat Kolonial Abad XVII bahkan menyebutkan banyaknya pergerakan perdagangan budak yang ada di Batavia. Dari akta-akta yang ada di arsip Notaris Batavia dan Daerah Sekitarnya khazanah ANRI, total ada 587 akta tentang pengangkutan budak yang ditandatangani oleh panitera dan notaris dalam kurun waktu 6 Mei 1652 hingga 20 Juni 1653. Hasil penelitian ini menandakan bahwa informasi tentang pengangkutan budak dapat ditemukan di dalam arsip Notaris.

Selain tentang masalah pengangkutan budak, arsip Notaris juga mengandung informasi mengenai akte pembebasan budak

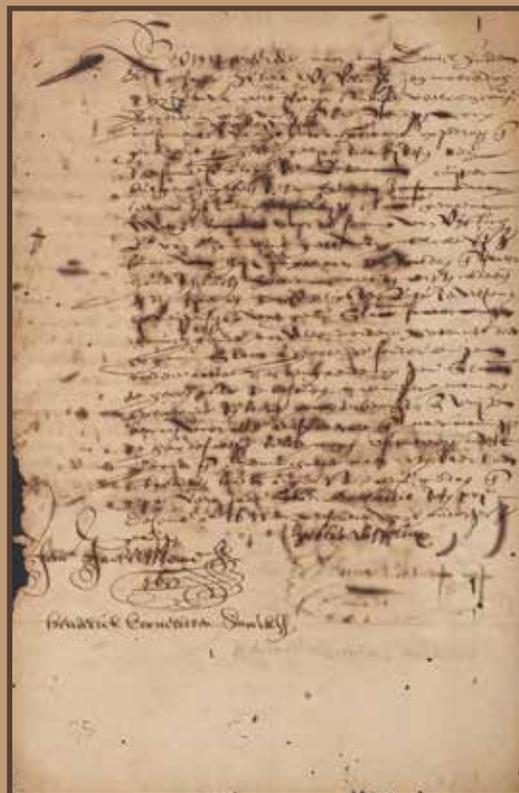
atau emansipasi. Notaris mencatat pembebasan budak di hadapan saksi-saksi dan lalu menandatangani bersama saksi dan panitera. Akta ini menjadi bukti yang sah ketika nanti budak tersebut menjalani hidupnya sebagai manusia yang bebas.

Salah satu akte notaris tentang pembebasan budak, misalnya dapat dilihat dari arsip notaris nomor 24. Arsip ini adalah sebuah akte pembebasan budak (emansipasi) bertanggal 17 Desember 1633, berkisah tentang pembebasan budak bernama Abrahams. Di hadapan notaris yang sekaligus menjadi sekretaris Weeskamer Batavia, Daniel Hudde (menjabat 1630-1638) ia dihadapkan dengan para saksi-saksi Harmans dan Johannes de Prada. Abraham dibebaskan dengan mendapatkan harta dari mantan majikannya, dan juga mendapatkan sebidang tanah dari majikannya. Di akta tersebut juga dijelaskan bagaimana pembebasan Abraham berlangsung di hadapan para saksi. Abraham juga tidak wajib menyediakan budak penggantinya.

Selain kisah pembesaran budak, arsip notaris juga mengandung informasi mengenai pengangkutan budak. Salah satu contohnya adalah budak Mottij, seorang budak perempuan, yang dijual oleh Hubert Westelin kepada Phillips de Jose. Akta bertanggal 16 Desember 1633 ini juga menceritakan harga dan kondisi Mottij ketika dibeli oleh Phillips de Jose. Akta ini menunjukkan bahwa perdagangan budak pada era tersebut di Nusantara, atau di Batavia khususnya adalah hal yang biasa. Mottij dihargai sebesar 50 realen van achten. Mottij setelahnya menjadi



Contoh akte pembebasan budak (emansipasi) di khazanah Arsip Notaris Batavia dan Daerah di Sekitarnya. Arsip No. 24



Contoh akta pengangkutan budak dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Arsip Notaris No. 24



Arsip pembebasan
Francina van Bengalen,
arsip Familie Papieren
No. N31

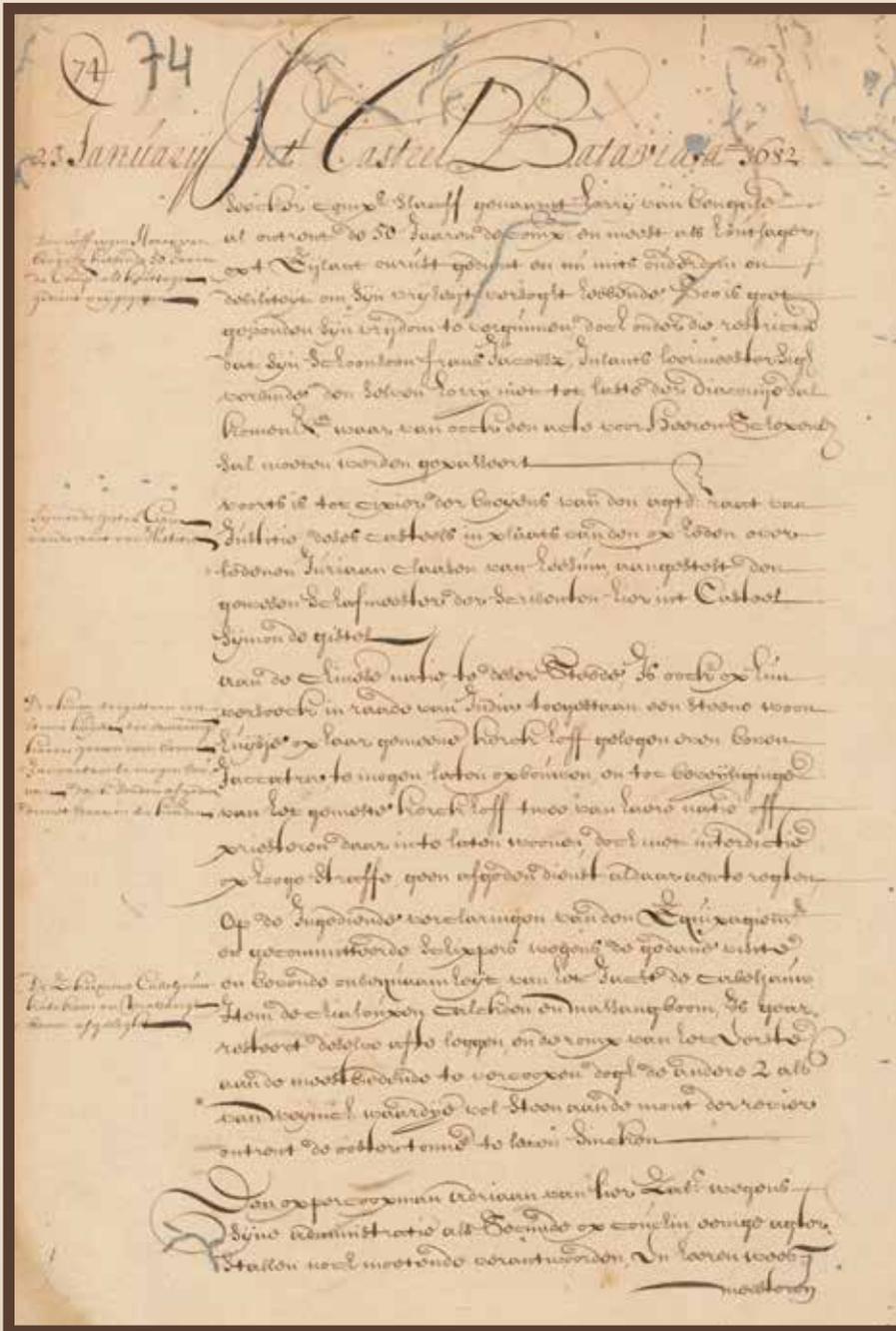
tanggungannya hak dan kewajibannya pada majikan yang baru. Akta ini berjenis akte *transport* atau pengangkutan (budak). Di dalamnya berisi keterangan mengenai nama pemilik budak, budak itu sendiri, dan juga yang membeli budaknya. Jual beli ini dilakukan di hadapan notaris. Selain khazanah arsip notaris, ada juga khazanah *schepenbank* (pengadilan) dan *familiepapieren* yang juga memuat kisah-kisah para budak. Sebagai contoh, ada kisah budak dengan marga Van Bengalen. Dari nama keluarga ini, kita bisa tahu bahwa Van Bengalen adalah yang berasal dari Bengal atau dalam Bahasa Indonesia disebut Benggala, sebuah wilayah di India. VOC pernah menjadikan Benggala sebuah kantor. Kira-kira sekitar tahun 1615, kapal pertama VOC mendarat di Benggala. Namun, karena ada konflik internal di Benggala, VOC baru bisa membangun lojinya di sana tahun 1627. Produk-produk utama Benggala adalah kain

katun, opium, dan *salpeter*. Namun, selain produk-produk ini, mobilitas budak juga menjadi perhatian.

Ketika VOC mengiriskan komoditas ke Eropa, mereka juga membawa budak-budak dalam kapalnya. Perjalanan budak-budak ini, mengikuti rute kapal dari Benggala ke Eropa, yaitu melalui Batavia. Perjalanan dimulai dari Benggala, lalu ke Banda, dan ke Batavia. Tidak banyak yang tercatat dari nama keluarga Van Bengalen. Dari buku yang berjudul *Slavernij* atau Perbudakan terbitan Rijksmuseum tahun 2021, nama Van Bengalen yang tercatat di dalam arsip-arsip VOC adalah Maart, Calistra, Amon, Horij, Francina, Januarij, Marij, Angela, Susanna, Abraham, Augustus, dan Baron. Maart diangkut dari Benggala ke Batavia, dan juga Calistra, Horij, Francina, Januarij, dan Amon juga berakhir di Batavia. Marij dikisahkan dipaksa bekerja di perkebunan pala di Banda, sementara Susanna, Angela,

Augustus dan Abraham, semuanya berakhir di Tanjung Harapan. Nama terakhir, Baron van Bengalen diangkut ke Alkmaar dan Dokkum di Belanda.

Kisah Francina van Bengalen dapat ditemui di khazanah arsip Familie Papieren, ANRI. Maria Holtrop, seorang kurator Rijksmuseum Amsterdam, mengatakan bahwa Francina berusia sekitar 26 tahun. Ia mendapatkan kebebasannya pada tanggal 6 Juli 1746. Dia dibebaskan oleh Jacobus van Nes, seorang akuntan VOC. Maria menuturkan sebelum Francina dibebaskan, ia harus membuktikan bahwa dirinya bebas penyakit, dan tidak akan menjadi beban diakoni. Syarat ini diberlakukan sejak 15 Januari 1682, karena ketika itu ada ketakutan budak tertular wabah kusta yang penularannya kerap ditemukan di kalangan budak. Dokumen pembebasan Francina dapat dilihat seperti berikut ini:



Catatan harian VOC tentang pembebasan Horrij van Bengalen. Arsip Hoge Regering No. 2491 Fol.74. <https://sejarah-nusantara.anri.go.id>

sudah tua dan lemah, sehingga VOC memberikannya kebebasan.

CERITA PERBUDAKAN YANG TAK PERNAH SELESAI

Perbudakan sampai era sekarang pun masih kerap ditemukan di beberapa negara dengan kasus-kasus tertentu. Walaupun bentuk dan penamaan ataupun istilah perbudakan tidak lagi sama, tetapi kita bisa mempelajari pola-pola perbudakan dari arsip-arsip yang ada.

Salah satu keragaman informasi dan keunikan informasi yang ada di arsip VOC adalah tentang perbudakan. Dari arsip-arsip ini tecermin bagaimana budak diperlakukan di zaman VOC. Banyak peneliti yang belum menyentuh topik perbudakan era VOC karena belum mengetahui ada di khazanah apa saja arsip tentang budak. Arsip *Hoge Regering*, *Notaris*, *Schepenbank*, *Famili Papieren*, dapat menjadi alternatif ketika peneliti ingin menapaki lebih lanjut cerita-cerita tentang perbudakan.

Selain kisah yang terdapat di arsip *Famili Papieren*, di khazanah arsip Hoge Regering juga ditemukan cerita menarik tentang budak. Salah satunya catatan mengenai pembebasan budak bernama Horrij van Bengalen. Ia dibebaskan pada tanggal 23 Januari

1682. Dalam arsip tersebut dikatakan bahwa pekerjaannya adalah seorang pekerja penggajian di Pulau Onrust. Ia kemungkinan diangkut dari Arakan ke Batavia, dan dipekerjakan di Pulau Onrust. Horrij memohon VOC untuk dibebaskan karena ia

Hardiwan Prayogo

MENOLAK KUTUKAN SUMBER DAYA

Pada awal pandemi, sekitar April-Mei 2020, diskusi seputar arsip banyak bicara soal kemungkinan kerja pengarsipan dalam situasi keberjarakan. Kemungkinan yang bisa ditempuh adalah arsip digital. Tentu pembicaraan seputar arsip digital ini sudah sering terdengar, terlebih dalam situasi teknologi 4.0. Majalah Arsip ANRI Januari-Juni 2019 pernah menjadikan teknologi 4.0 dalam dunia arsip sebagai tema edisi. Tulisan ini bukan ingin mengulang pembahasan serupa, tetapi lebih coba mengelaborasi salah satu tantangan kerja pengarsipan dalam dinamika dunia digital saat ini, yaitu data. Baik data dalam problem tuntutan keterbukaan, perlindungan atas kerahasiaan, hingga ancaman

surveillance capitalism. Persoalan ini akan coba diketengahkan dengan studi kasus arsip digital seni visual yang ada di online archive milik lembaga arsip komunitas, Indonesian Visual Art Archive (IVAA).

ONLINE ARCHIVE IVAA

Selama 25 tahun berdiri, dengan fokus pada arsip dan seni visual, kerja IVAA tidak terputus hanya pada perkara seni. Tentu ini, didasari atas keyakinan bahwa kesenian selalu terikat pada isu konteks sosial yang mengitarinya, IVAA paling sering memulai kerja pengarsipan dari dokumentasi peristiwa seni, baik itu pameran, diskusi, *performance art* dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud mulai dari materi

audio visual meliputi foto dan video pelaksanaan acara, termasuk materi berbasis teks seperti katalog, poster, hingga liputan media.

Secara singkat, sebaran ragam materi arsip digital IVAA yaitu foto (jpg, tiff, png), video (mp4, MTS, mpeg), audio (mp3, wav), dan teks (pdf, doc, rtf). Seluruhnya disimpan pada hardisk eksternal terlebih dahulu, untuk kemudian dicatat sebagai arsip yang diterima. Penerimaan (atau akuisisi) sumber arsip IVAA bisa berasal dari dokumentasi IVAA, sumbangan/donasi seniman/ keluarga seniman/ peneliti atau siapapun, dan digitalisasi file dari format analog. IVAA juga sampai saat ini masih merawat arsip analog (positif/ negatif film, vhs, mini-dv, cassette, klipung dari tahun 1950-

PRESERVASI

an), yang dikumpulkan dari tahun 1995-2006. IVAA baru benar-benar beralih ke format digital pada tahun 2007, sekaligus mulai membuat portal arsip online. Arsip digital ini kemudian diolah sesuai dengan karakteristik materinya masing-masing, sampai akhirnya dipublikasikan melalui kanal arsip online IVAA, yaitu <http://archive.iva-online.org/>.

Pada *website* ini terlihat bagaimana IVAA membagi arsipnya dalam 4 kategori utama, yaitu Pelaku Seni, Karya Seni, Peristiwa Seni (*Event*), dan Koleksi Dokumen.

Bicara keamanan data, arsip yang dipublikasikan melalui kanal ini disimpan pada server milik IVAA sendiri. Singkatnya, dapat dinyatakan

cukup aman dari gangguan, dalam hal ini adalah hacker. Keamanan atas data memang menjadi salah satu prioritas utama ketika mulai membangun sistem pengarsipan digital tahun 2007. Perlu dicatat pula bahwa seluruh arsip yang berada di *website* berarti sudah melalui proses persetujuan dari pemilik untuk



Tangkapan layar *website* Indonesian Visual Art Archive (IVAA)

dipublikasikan. Dengan kata lain bisa diakses siapapun dan dimanapun secara bebas. Hanya saja untuk mendapat file dengan resolusi tinggi, atau beberapa arsip dengan ketentuan khusus, bisa menghubungi arsiparis iva.

Jika ditanya darimana acuan IVAA membuat kesepakatan tersebut? Itu berdasarkan kesepakatan bersama antara IVAA sebagai lembaga arsip dengan pemilik arsip, entah seniman, keluarga seniman, peneliti, maupun

kolektor. Mengapa IVAA tidak mengacu pada aturan resmi yang dibuat pemerintah? Jawabannya lebih mudah, karena belum ada aturan resmi yang ditujukan untuk melindungi peredaran data digital user di dunia maya.

SUMBER DAYA DATA

Trimester pertama 2021 ini diawali dengan pembahasan yang cukup rumit soal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi (RUU PDP). Sebenarnya dapat dinyatakan agak terlambat ketika pemerintah baru sekarang cukup serius membicarakan perihal tersebut. Sementara sejak tahun 2016, negara-negara uni eropa sudah memiliki *The General Data Protection Regulation* (GDPR), yaitu perlindungan dan privasi data di Uni Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa. Praktiknya mungkin kita rasakan sekarang. Pengguna Whatsapp di Indonesia jika ingin

tetap menggunakan aplikasi tersebut, diharuskan membagikan semua datanya ke perusahaan Induk mereka, yaitu Facebook. Kebijakan ini tidak diberlakukan di Eropa, karena mereka memiliki GDPR.

Sebenarnya apa pentingnya data kita terlindung dan tidak semudah itu dibagikan lewat dunia maya? Saya akan mengutip dari salah satu artikel di www.economist.com yang berkata bahwa *the world's most valuable resource is no longer oil, but data*. Tentu ini benar belaka, saya tidak akan ikut menyebut berapa nilai ekonomi yang diperoleh dari 'bisnis' ini. Tetapi silakan cek deretan 10 orang terkaya di dunia tahun 2021, dan lihat apa bisnisnya. Maka jika selama ini kita kerap mendengar sumber daya alam, sumber daya manusia, kini juga ada yang bernama sumber daya data.

KUTUKAN SUMBER DAYA

Situasi pandemi ini sekaligus membuat kita sadar, bahwa negara belum memiliki master basis data yang terpadu. Meski barangkali hampir seluruh warga Indonesia memiliki KTP elektronik, implementasi basis data yang berelasi antar bidang masih jauh panggang dari api. Kita harus sadari ini sebagai kelemahan. Dalam kelemahan ini, sebenarnya kita dihadapkan pada satu ancaman nyata, yaitu *resource curse*, atau kutukan sumber daya.

Dahulu, istilah ini ditujukan bagi negara atau wilayah yang memiliki limpahan sumber daya alam, namun selalu berkecamuk dalam perang saudara, kolonialisme, atau imperialisme karena memperebutkannya. Kemudian

bagaimana dengan zaman sumber daya data? Siapakah yang akan sial tertimpa kutukan sumber daya?

Jawabannya bisa siapa saja, karena pada dasarnya semua manusia akan menjadi *user* ketika terindeks dalam kerja algoritma. Kerja algoritma yang mendefinisikan *user*, bukan *user* yang mendefinisikan dirinya sendiri. Algoritma bekerja melalui data yang secara tidak sadar kita setor pada pelaku *surveillance capitalism*. Istilah *surveillance capitalism* atau kapitalisme pengawasan tumbuh seiring perkembangan industri dan teknologi 4.0. Shoshana Zuboff dalam *The Age of Surveillance Capitalism*, pengawasan yang dimaksud berasal dari pelaku industri swasta, yang lebih canggih dari perangkat mata-mata negara. Pengawasan bertujuan utama untuk alasan ekonomi dan bisnis, meski kemudian terselip agenda politik. Pengawasan yang berasal tidak dari perangkat yang eksklusif, tetapi lahir dari piranti rumahan bahkan personal. Dengan demikian, singkatnya bisa dikatakan bahwa setiap manusia, khususnya pengguna internet bisa terkena kutukan sumber daya, bahkan secara tidak sadar. Karena toh pada dasarnya semua manusia memiliki data. Kini yang membedakan hanya seberapa dirinya bisa mengontrol. Kontrol yang lahir tidak hanya dari dalam diri, tetapi seharusnya juga ada aturan dari pemerintah yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi.

MENCARI KEMUNGKINAN

Jika lembaga arsip atau pengarsipan fisik melakukan langkah

preservasi arsip agar terlindung dari kerentanan akibat cuaca atau bencana alam, lalu bagaimana mempreservasi data pribadi kita yang berbentuk arsip digital dalam database dunia yang semakin tanpa batas? Tulisan singkat ini tentu tidak mampu mencarikan solusi atas pertanyaan rumit itu, tetapi saya ingin kembali pada studi kasus arsip IVAA.

Sebagai lembaga arsip komunitas, maka IVAA mengumpulkan dan menyimpan data dari para pelaku seni. Sebagai manusia, pelaku seni barangkali adalah insan yang unik, karena pengalaman dan ekspresi dirinya kerap diwujudkan secara artistik. Jika karya seni, hasil penelitian, catatan perjalanan milik pelaku seni kita maknai sebagai data, posisi lembaga arsip komunitas seperti IVAA menjadi sangat penting karena menyimpan data dalam bentuk yang berbeda. Berbeda dari data yang diolah oleh algoritma pelaku *surveillance capitalism*. Tentu, kedaulatan atas data masihlah jalan panjang. Praktik dalam wilayah arsip komunitas ternyata mengindikasikan suatu kemungkinan atas kedaulatan data. Bermula dari sini, dapat kita rumuskan lebih jauh, bagaimana sebenarnya dalam skala yang lebih besar, negara mampu mewujudkannya. Mewujudkan manusia yang terbebas dari kutukan sumber daya.

M. Haris Budiawan

MENGELOLA DAN MEMBUKA WARISAN: WORKSHOP ON CAPACITY DEVELOPMENT IN MEMORY OF THE WORLD

Arsip statis (selanjutnya disebut arsip) sebagai warisan budaya bangsa merupakan salah satu aset bangsa yang perlu dilestarikan bersama. Secara formal pelestarian arsip statis sebagai warisan dokumenter merupakan tanggung jawab lembaga kearsipan negara melalui berbagai kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan pelayanan masyarakat untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pembangunan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat.

UNESCO (*United Nations Educational Scientific Cultural Organization*) Badan PBB yang mengemban fungsi memajukan kerja sama dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, komunikasi dan informasi dunia mampu

Program *Memory of the World (MOW-UNESCO)* secara spesifik mendorong preservasi, mendukung akses, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan memori kolektif yang terdokumentasikan (warisan dokumenter). Berjalan sejak tahun 1992, program ini berasal dari keprihatinan akan kondisi pelestarian, dan akses warisan dokumenter di berbagai belahan dunia. Sebagian terancam punah, sebagian lainnya telah menghilang selamanya dari akibat pergolakan sosial, kurangnya sumber daya, penjarahan, perdagangan ilegal, perusakan, penyimpanan yang tidak memadai dan pendanaan memperburuk kondisi warisan dokumenter di seluruh dunia. 3 program utama warisan dunia yakni: *World Heritage; Intangible Cultural*

Heritage; Memory of The World. Tujuan program tersebut adalah melestarikan warisan dokumenter dunia; mempromosikan akses universal ke warisan dokumenter; dan meningkatkan kesadaran global akan pentingnya warisan dokumenter.

Sebagai lembaga kategori 2 UNESCO Korea Selatan berinisiatif mendirikan *International Center for Documentary Heritage (ICDH)* yang berkedudukan di Korea Selatan diresmikan pada Tahun 2019. ICDH bertujuan untuk mendukung program MOW-UNESCO di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan kurikulum, penelitian, dan diseminasi.

Tulisan ini mencoba mengangkat pengalaman dan refleksi penulis keikutsertaan mengikuti program *1st Capacity Building Workshop*





Peserta *Workshop* (Sumber: unescoicdh.org)

on *UNESCO Memory of The World*, berlangsung pada tanggal 19-21 November 2019 di Kota Cheongju, Korea Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan bersama oleh UNESCO, ICDH dan Arsip Nasional Republik Korea (NAK) dengan tujuan meningkatkan kapasitas para peserta perwakilan dari institusi terpilih dalam kepemilikan sertifikat MOW bidang warisan dokumenter.

PROGRAM KEGIATAN

Kegiatan kali ini mengangkat Tema “*Registration, Preservation and Utilization of UNESCO’s World Documentary Heritage*.” topik-topik terpilih yang dipresentasikan terkait cara pendaftaran, pelestarian & pengelolaan, dan pemanfaatan memori dunia dan juga pengalaman terkait lainnya. Kota Cheongju, Daerah Administrasi Chung Cheong Buk-Do, Korea Selatan terpilih sebagai tempat workshop dengan pertimbangan sebagai

pusat kebudayaan tradisional Korea, dimana buku *Jik Ji Sim Che Yo Jeol* (selanjutnya disebut ‘*JikJi*’) dicetak. Warisan dokumenter ini merupakan pelat logam cetak pertama dalam sejarah pada (1377) telah masuk dalam *Memory of the World UNESCO* pada tahun 2001.

Acara terbagi menjadi dua bagian, pemaparan dan program ekskursi. 22 presentasi (terbagi kedalam 2 hari tanggal 19-20 November 2019 Jam 08.00-18.00) Pelaksanaan acara diawali dengan pembukaan oleh kepala Arsip Nasional Korea Selatan Dr Lee Seung Cheol, *keynote speech* Prof Kyung Ho Sung (Universitas Nasional Seoul) mengenai ICDH dan Dr. Lim Ming Kwok (Unesco-MOWCAP) mengenai program MOW-UNESCO dilanjutkan oleh pemaparan 22 pembicara dari organisasi/ lembaga domestik Korea Selatan dan internasional (Australia, Tiongkok, Indonesia Korea, Malta, Malaysia, Mongolia, Philippines, Afrika Selatan,

dan Tanzania). Masing-masing selama 20 menit mempresentasikan materi sekaligus memperkenalkan warisan dokumenter yang dimiliki oleh negara masing-masing (*Country Report*) berupa Inskripsi pada artefak (Malaysia, Thailand) arsip, manuskrip/arsip pribadi (Indonesia, Malta, Philipina), hingga berkas-berkas peristiwa (Korea selatan) sebagai berikut:

Thailand mendapatkan pengakuan MOW diantaranya adalah *King Ram Khamhaeng Inscription; Archival Documents of King Chulalongkorn’s Transformation of Siam (1868-1910); dan Epigraphic Archives of Wat Pho*. Penghargaan MOW yang sudah didapatkan Malaysia adalah di antaranya adalah Batu Bersurat (2009); Surat-surat Sultan Abdul Hamid, Kedah (1882-1943) (2001); dan Hikayat Hang Tuah (2001); serta Kisah Panji (Nominasi bersama Indonesia, Malaysia dan Thailand (2017).

Keberhasilan Indonesia menjadikan warisan dokumenternya sebagai Memori dunia antara lain, naskah La Galigo (2011), naskah Nāgarakrētāgama (2013), naskah Babad Diponegoro (2013), dan arsip Konferensi Asia Afrika (2015). arsip konservasi Borobudur (2017), arsip tsunami Samudera Hindia (2017), serta naskah cerita Panji (2017).

Sampai dengan 2018 Telah 13 sertifikat MOW diterima oleh Tiongkok. *First Historical Archives* (Huang Shi Chen) Beijing. Mengelola arsip-arsip terpenting Tiongkok terutama dari masa Dinasti Ming dan Qing (1371-1943) terdiri dari arsip tertulis maupun manuskrip dalam 20 bahasa (Manchu, Tibet, dan Bahasa Eropa). *Archives of Qing Dynasty*. Afrika Selatan telah mendapatkan penghargaan MOW untuk *CODESA Multi-Party Negotiating Forum* (2013); *Rovonia Trial Archives*; *The Bleek Archives*; dan *VOC ARchives* (2003).

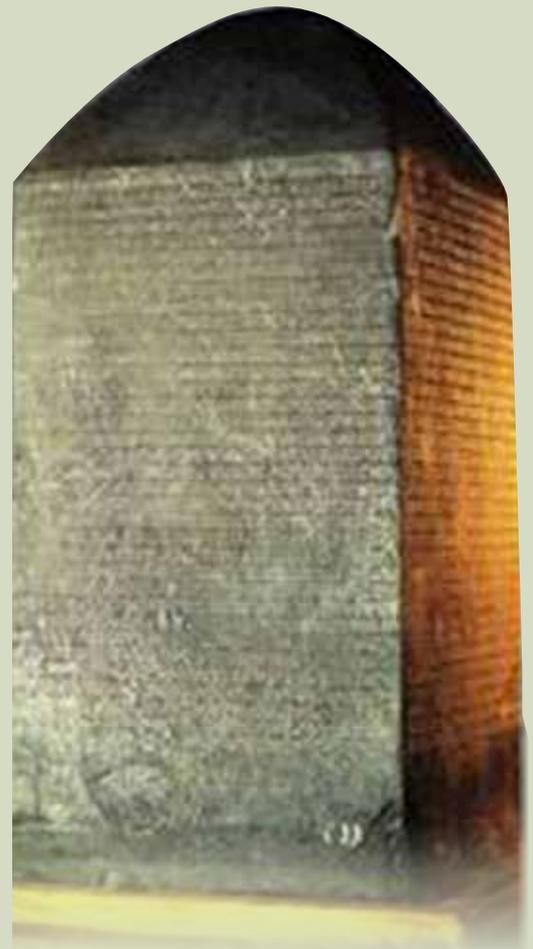
Manuskrip bergambar dari Malta pada abad ke-17 yang menggambarkan keragaman aspek dari kehidupan masyarakat Eropa abad 17.

Documents of Joseon Tongsinsa, Korea, materi tentang berkas misi persahabatan Korea-Jepang yang

terletak di Busan, Korea. Program ini merupakan bentuk Inisiatif swasta dalam mempromosikan arsip arsip yang hidup dalam masyarakat.

Berkas pribadi Presiden Manuel Luis Quezon y Molina (19 Agustus 1878 - 1 Agustus 1944) (*Presidential Papers of Manuel L. Quezon*) yang telah mendapat pengakuan MOW. Dia adalah Presiden kedua Filipina dan Filipina pertama yang memimpin pemerintahan seluruh Filipina. Dia menjabat sebagai presiden Persemakmuran Filipina dari tahun 1935 hingga 1944. Arsip ini menyediakan informasi mengenai situasi kehidupan Filipina dan hubungan Filipina dengan negara lain sekitar kemerdekaan Filipina 1946. Arsipnya bergabung dengan arsip di Amerika, kerjasama antar lembaga luar negeri dan dalam negeri sangat penting dalam mencapai keutuhan khazanah.

Arsip gerakan untuk membayar utang negara Korea dengan mengumpulkan sumbangan individu dimulai oleh Seo Sang-dong dari Daegu pada 30 Januari 1907. Arsip seluruh proses dan sejarah kampanye nasional yang dilakukan oleh publik Korea dari tahun 1907 hingga 1910, terdiri dari 2.475 dokumen, dokumen



King Ram Khamhaeng Inscription
(Sumber: unesco.org)

tulisan tangan ini berhubungan dengan latar belakang dan awal gerakan, perluasan jangkauan dan pengaruh gerakan. Termasuk juga artikel surat kabar dan majalah yang melaporkan gerakan tersebut. *Globalization of Archives of The Korean National Debt Redemption Movement*.

Documents of Joseon Tongsinsa, Korea
(Sumber: unesco.org)



MANCANEGARA

Kunjungan ke situs penyimpanan warisan dokumenter ke Kuil Haeinsa Haeinsa Tripitaka, 21 November 2019, Jam 08.00-18.00 di Janggyeong Panjeon, Tempat ini Cetakan Kayu teks Buddha (Tripitaka) yang paling lengkap, diukir pada 80.000 balok kayu antara 1237-1248. Dari biksu pengelola mendapat paparan mengenai teknologi tradisional yang berdampingan dengan teknologi modern dengan membiarkan ventilasi terbuka dalam cuaca ekstrem.

PENGELOLAAN WARISAN DOKUMENTER

Dari sisi penyelenggaraan ada beberapa pengalaman yang bisa diambil pelajaran dalam mengelola warisan. Keterlibatan dan kerjasama internasional, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, pengembangan infrastruktur dan SDM, dan pemenuhan prosedur kriteria penominasian mempengaruhi keberhasilan program pengajuan dan pelestarian warisan dokumen nasional.

Keterlibatan dalam komunitas Internasional

Secara kelembagaan Tiongkok telah aktif terlibat dalam program pelestarian warisan dokumenter. Pendirian Komite Nasional MOW (1995). Lembaga Arsip dan Musik Tradisional (1997), terlibat dalam MOWCAP (1998), Pengembangan Lembaga Warisan Dokumenter Tiongkok (2000), Pendirian Asia-Pacific MOW Register (2008) dan Pusat MOW Macau (2016). menghasilkan daftar warisan nasional (142) 13 di antaranya warisan dokumenter yang telah diakui MOW dunia. 12 MOW Asia Pasifik.

Memastikan Dukungan Masyarakat dan Pemerintah

Keseriusan bangsa Thai dalam mengembangkan warisan budaya nasional dibuktikan dengan pembentukan *Thai National Register of Heritage*. Selain inisiatif pemerintah, peran masyarakat luar juga dilibatkan dengan cara mengundang masyarakat luar untuk mempromosikan khazanah yang

mereka miliki. Untuk menunjukan keseriusan, Malaysia melaksanakan registrasinasional (*Malaysian National Heritage Register*) sebagai bank data proses penominasian penelitian kriteria yang layak dinominasikan di tingkat nasional, regional maupun global. Program MOW di Malaysia dilaksanakan oleh Nasional Arsip Malaysia sebagai Ketua, Sekretariat dipegang oleh Departemen Warisan Nasional Malaysia. Anggotanya terdiri dari Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang terkait.

Kerjasama/Kolaborasi

Kolaborasi menjadi kunci dalam pengelolaan warisan. Seperti yang dilaporkan oleh ANRI. Sebagai pemelihara arsip-arsip yang terdaftar sebagai MOW, kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah untuk memastikan ketersediaan informasi untuk berbagai kepentingan. Proyek Dasa (2012-2017) adalah hasil kolaborasi tim ANRI dan pakar eksternal yang terdiri dari arsiparis, konservator, sejarawan, ahli bahasa, penerjemah,



spesialis IT. Hasilnya adalah arsip digital yang sepenuhnya diakses melalui situs web oleh (tim akses) yang dapat diakses di internet melalui alamat URL: *sejarah-nusantara.anri.go.id*. Situs web tiga bahasa menampilkan arsip secara *online*, terhubung dengan basis data yang diindeks sepenuhnya ke arsip hasil pindaian.

Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan

Pengembangan sistem informasi yang dilengkapi oleh infrastruktur preservasi terdepan dicontohkan oleh Arsip Nasional Tiongkok dengan menggunakan teknologi modern maupun tradisional bidang keamanan, preservasi, dan akses. Saat ini tengah mengeksplorasi kemungkinan baru berupa presentasi arsip dengan menggunakan teknologi digital untuk membatasi bahkan menggantikan akses arsip asli. Fasilitas baru telah didirikan dalam bidang layanan multimedia.

Mengikuti pengalaman Australia. Ada baiknya memetakan ekspektasi *user* dalam pengembangan sistem informasi yang terus berubah. Setelah terlebih dahulu mendeklarasikan visi NAA untuk menjadi yang terbaik di bidang arsip digital. *To be the one of the world's leading in this digital archives, Digital Continuity 2020*). Melalui pendekatan proaktif pengembangan sistem informasi *Commonwealth Record Series Systems version 2.0* menjadi versi 3.0 Pengembangan *Artificial Intelligence* bidang layanan (*NAA digital assistant*), NAA terus berinovasi dalam teknologi terdepan dibidang preservasi warisan dokumenter

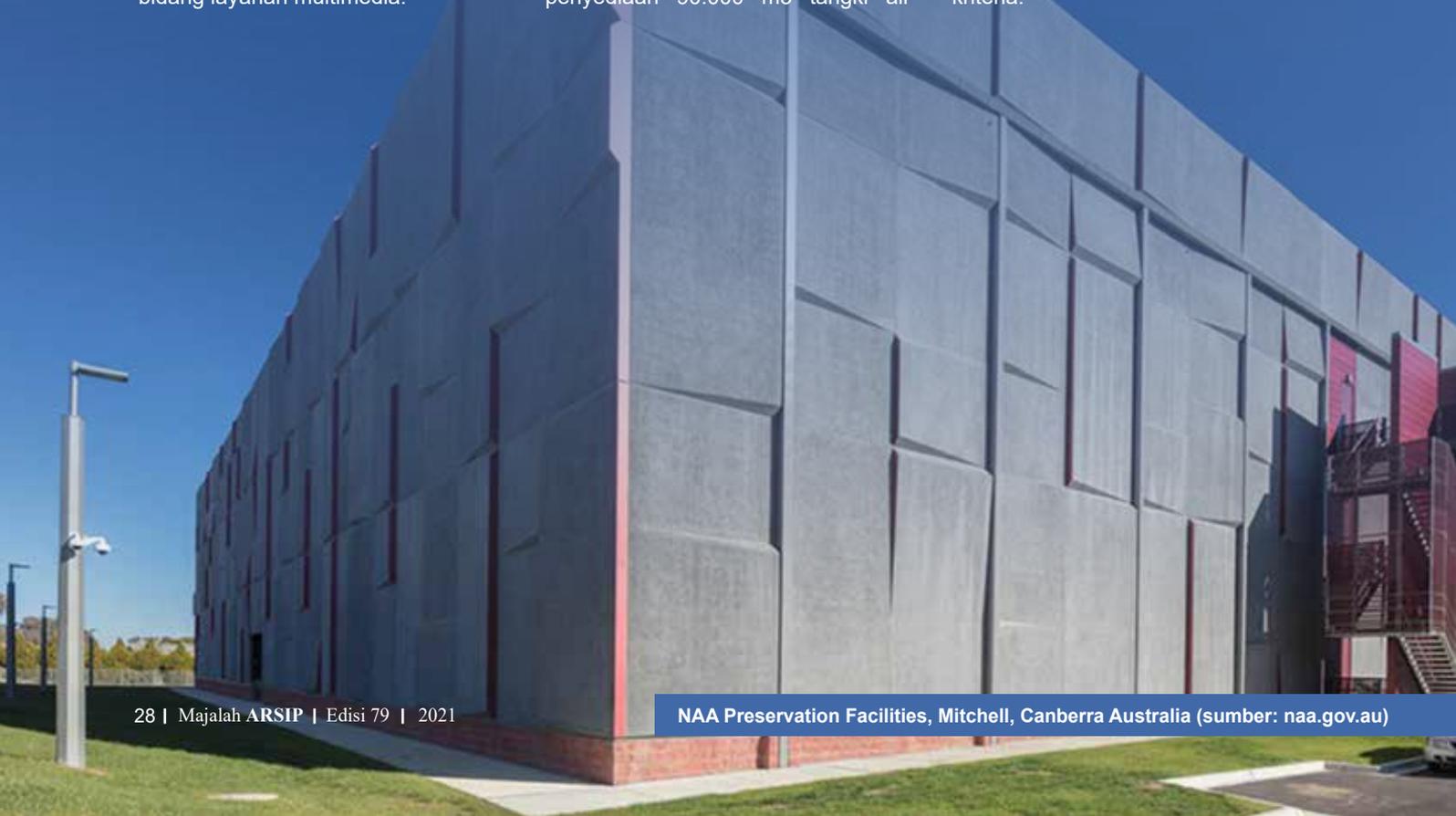
Untuk kepentingan itu, NAA NAA mengembangkan fasilitas preservasi di 3 tempat (Kota Perth, Canberra dan Sydney) dengan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan Perancangan bangunan layout yang ramah lingkungan, insulasi maksimal, kedap udara, dilaksanakan dengan penyediaan 90.000 m³ tangki air

bawah tanah bangunan utama

Terkait dengan format digital yang tidak permanen (*unstable format*), NAA melaksanakan program *Digital surrogate*. Program ini diadakan untuk menyalin arsip analog, sekaligus preservasi penggunaan arsip digital. istilah '*digital surrogate*' digunakan untuk merujuk pada reproduksi digital dari suatu objek material, seperti lukisan atau patung. Reproduksi itu, seringkali berupa foto digital, berfungsi sebagai pengganti objek material dalam koleksi lembaga budaya yang dapat dikirim melalui jaringan, memungkinkan peningkatan akses ke banyak pengguna secara bersamaan di lokasi yang tersebar.

PROSES PENOMINASIAN WARISA DOKUMENTER

Proses Penominasian Warisan dokumenter tidak lepas dari pelibatan masyarakat dan pemerintah dalam penajaman formulir yang berbasis kriteria.



MANCANEGARA

Tidak kalah pentingnya, penominasian akan lebih baik jika telah menyelesaikan masalah masalah internal terkait dengan warisan dokumenter tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pelibatan Masyarakat dalam

Penominasian

Melibatkan masyarakat dalam penominasian warisan dokumenter menjadi faktor yang mendorong terbentuknya ingatan kolektif masyarakat. Pengalaman Thailand dan Afrika Selatan dengan mengkoordinasikan pemerintah setempat dan masyarakat dalam proses penominasian dalam bentuk promosi, diskusi publik, seminar mengundang masyarakat umum memaparkan warisan dokumenter yang dimiliki.

Penajaman Formulir

Pengalaman dari Malta mengedepankan kerjasama yang baik dari pihak kustodian dengan akademisi dalam penominasian MOW dengan menyerahkan urusan pada ahlinya. Lembaga kustodian sama sekali tidak terlibat dalam penajaman formulir. Masalah konten diserahkan kepada pihak akademisi (Professor/mahasiswa level S3/Phd) dengan kompetensi relevan. Pihak kustodian lebih memperhatikan aspek manajerial, pendekatan personal, maupun aspek politis terpenuhinya kriteria yang diminta oleh komite MOW.

Penyelesaian Masalah *Ownership/National Pride*

Penyelesaian masalah masalah terkait dengan warisan dokumenter itu hendaknya diselesaikan

sebelum pengajuan seperti seperti yang dicontohkan oleh masalah yang timbul atas penominasian *'Documents of Nanjing Massacre* (2015) yang menyisahkan perselisihan antara Jepang-Tiongkok berkenaan kekerasan militer Jepang pada Perang Dunia II. Masalah kepemilikan juga dibagikan oleh Tanzania dan Korea Selatan dan Indonesia terkait status kepemilikan warisan. Seperti diketahui sebenarnya Jikji itu disimpan di luar Korea (Jerman). Demikian pula arsip VOC yang tersebar di beberapa Negara (Indonesia, Belanda, Srilanka, Afrika Selatan) akan tetapi sesuai dengan perjanjian penominasian tetap bisa dilaksanakan di luar negara yang menyimpan dengan mekanisme penominasian bersama (*joint nomination*).

Diseminasi/Penyebarluasan

Program Kegiatan

Beberapa peserta membagikan pengalaman dalam pengembangan program pelatihan, pengajuan, kerjasama pengelolaan antar-negara, hingga diseminasi program seperti pameran, penelitian, digitalisasi, pembangunan memorial, maupun sayembara berhadiah yang telah dilaksanakan. Peserta Afrika Selatan membagikan pengalaman menjadi tuan *IAC (UNESCO Advisory Committee) Meeting* Ke-8 Juni, 2007 dalam mengevaluasi proposal-proposal yang masuk daftar MOW. Dari Indonesia kegiatan digitalisasi dipilih sebagai bagian dari kegiatan pengembangan diseminasi program. Khusus untuk arsip VOC, ANRI mengelola sekitar 3,5 km linear arsip kertas yang memuat informasi terperinci tentang sejarah dunia abad

17-18. ANRI berkolaborasi dengan komunitas internasional) dalam mengembangkan proyek digitalisasi arsip dan membuat metadata untuk dilestarikan secara digital dan menyediakan akses ke arsip terpilih dari arsip VOC abad ke-17 dan ke-18.

Pembangunan monumen peringatan (Memorial) telah diupayakan oleh Korea Selatan melalui program pembangunan memorial gerakan pembayaran utang nasional rakyat Korea di Daegu didirikan. Berbagai kegiatan lainnya (pameran, diskusi, seminar, tayangan TV) telah dilaksanakan untuk mengenang peristiwa tersebut. Penyelenggaraan kompetisi juga dilaksanakan dalam pengelolaan. Sejauh ini *Jikji Prize* UNESCO adalah salah satu upaya untuk mendorong akses universal ke informasi dan pengetahuan. Hadiah ini diberikan bagi lembaga terpilih yang memiliki program pengelolaan warisan.

Keikutsertaan Indonesia dalam Program *Memory of The World* merupakan wujud nyata tanggung jawab kustodian warisan budaya yang telah diakui dunia. Beberapa khazanah arsip yang disimpan ANRI telah mendapat pengakuan (arsip VOC, Tsunami dan KAA) demikian juga keikutsertaan dalam workshop yang diselenggarakan oleh Komite MOW yang memfasilitasi pengembangan kerjasama pengetahuan dan teknik preservasi, dan akses universal terhadap warisan dokumenter dunia. Berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran tentang keberadaan dan pentingnya warisan dokumenter dunia.

DI BALIK CAPAIAN NILAI TERTINGGI PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL TAHUN 2021



Tahun 2020 menjadi sejarah baru bagi penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten (Kab.) Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut terlihat berdasarkan nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 yang dirilis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kab. Kebumen berhasil meraih capaian nilai hasil pengawasan kearsipan tertinggi untuk kategori Kabupaten/Kota. Adapun nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 yang dicapai Kab. Kebumen sebesar 98,35 dengan kategori Sangat Memuaskan (AA).

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto secara langsung menerima anugerah kearsipan dalam acara Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-50 yang digelar secara daring dan luring di Gedung ANRI, jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Bupati Arif yang menerima penghargaan kearsipan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa meski sudah menerima penghargaan dan memperoleh nilai tertinggi, namun tetap harus terus semangat dan bekarya mewujudkan pengelolaan arsip

DAERAH



Ruang layanan arsip Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

yang berkualitas. “Jangan berhenti sampai di sini, pencapaian ini harus bisa dipertahankan, caranya dengan terus bekerja lebih giat, jangan kendor, dan tetap semangat,” terang Bupati Arif yang disampaikan melalui rilis Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen.

Capaian nilai tertinggi berskala nasional yang diraih Kab. Kebumen ini tentu bukan suatu hal yang instan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen menjadi tumpuan dan memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kab. Kebumen. Pada saat proses pengawasan kearsipan tahun 2020 dilaksanakan, kala itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen dipimpin Anna Ratnawati. Kemudian sejak 21 Juni 2021, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan beralih kepemimpinan di bawah Dwi Suliyanto yang juga memiliki semangat yang sama, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah Kab. Kebumen.

Ada banyak kebijakan, program dan kegiatan kearsipan yang

digulirkan di lingkungan pemerintah Kab. Kebumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Kebumen menjadi regulasi yang dipedomani bersama jajaran pemerintah daerah Kab. Kebumen dalam mengelola arsip. Selain itu, Kab. Kebumen juga telah memiliki 10 (sepuluh) Peraturan Bupati dan 15 (lima belas) Standar Operasional Prosedur tentang kearsipan.

Sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah Kab. Kebumen. OPD, Kecamatan, Desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Puskesmas bahkan institusi pendidikan (seperti SMP Negeri) turut menjadi sasaran kegiatan pembinaan kearsipan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, pendampingan pengelolaan arsip dan monitoring.

Tak berhenti di situ, di bidang

kearsipan dinamis, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen yang juga menjadi Juara I Lomba Lembaga Kearsipan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, memiliki banyak program. Pertama, Layanan Kearsipan Kita (LASKITA), sebuah program yang berupa pelayanan konsultasi kearsipan terhadap *stakeholders*, seperti OPD, BUMD, perangkat kecamatan dan desa, pengamat sejarah, dan jurnalis. Kedua, Pelayanan Arsip Musnah (PRIMUS), yakni program yang melayani dan mendorong semua OPD melaksanakan pemusnahan arsip, mulai dari tahapan pemusnahan arsip sampai dengan di tempat peleburan arsip.

Ketiga, Akuisisi Arsip Selamatkan Memori Bangsa (AKSI MARISA), program yang melayani dan mendorong semua OPD melaksanakan penyusutan arsip melalui penyerahan arsip statis mulai dari tahapan penyerahan sampai dengan penyerahan arsip statis bernilai guna kelanjutan ke LKD. Keempat, Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis (BINTIKS). Bimbingan teknis tersebut ditujukan bagi pengelola arsip di Desa, Kecamatan, OPD, sekolah, Puskesmas, BUMD. Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis tersebut antara lain, Pengelolaan Arsip Terdampak Bencana dan kebijakan tentang Tata Naskah Dinas.

Selanjutnya yang kelima adalah Koordinasi Petugas Arsip Daerah (KOPIDARA) yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan petugas arsip. Pada pelaksanaan koordinasi tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai ruang berbagi permasalahan pengelolaan arsip. Tak jarang melalui forum ini juga turut mendiskusikan pemecahan atau solusi masalahnya. Selain itu, KOPIDARA juga dijadikan sarana

DAERAH

untuk menyampaikan atau membahas materi seputar pengelolaan arsip dan pengawasan kearsipan. Keenam, Monitoring Arsip Desa (MONALISA), yakni program yang bertujuan memonitoring pengelolaan arsip di desa. Ketujuh, ada Arsip Masyarakat Terjaga (Si Mas Jaga) yang merupakan fitur aplikasi kearsipan untuk arsip vital masyarakat.

Meski saat ini Kab. Kebumen masih mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia kearsipan, hal tersebut tak menyurutkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen untuk berprestasi. Pada tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen berhasil meraih peringkat kedua se-provinsi Jateng atas Hasil Kajian Pengolahan Arsip Berbasis Teknologi Informasi.

Di samping itu, sebagai sebuah upaya untuk mengapresiasi pengelolaan arsip di desa maupun OPD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen rutin menyelenggarakan Lomba Tertib Arsip tingkat Desa dan OPD. Pelaksanaan Lomba Tertib Arsip ini menjadi bentuk penghargaan bagi desa dan OPD yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan. Bahkan, salah satu desa di Kab. Kebumen, yakni Desa Tanuharjo berhasil merebut juara 2 Lomba Tertib Arsip Tingkat Prov Jateng pada tahun 2018. Selain itu, partisipasi aktif dan komitmen perangkat desa di Kab. Kebumen dalam pengelolaan arsip pun sudah terlihat signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan dialokasikannya ketersediaan anggaran pengelolaan arsip di desa.

Di bidang kearsipan statis, saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen sudah memiliki depot arsip yang standar pembangunannya telah menyesuaikan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip.



Ruang pameran arsip Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Adapun khazanah arsip statis yang dilestarikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen saat ini berjumlah 2.631 berkas. Tak hanya disimpan, khazanah arsip statis tersebut pun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen telah menyediakan Ruang Informasi Khazanah Arsip, atau dikenal juga dengan RIHANA dan Ruang Layanan Kearsipan (RELAKSA).

Selain memanfaatkan arsip, masyarakat juga dapat melaksanakan kunjungan wisata arsip yang menyenangkan dan edukatif. Biasanya kunjungan dilakukan dengan mengunjungi Depot Arsip dan ruang pameran khazanah arsip. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19 masih berlangsung, maka program ini pun berjalan sesuai dengan kebijakan pembatasan-pembatasan yang berlaku di Kab. Kebumen.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen terus mengadaptasi dan berinovasi agar pengelolaan arsip secara digital dapat

dilaksanakan secara berkelanjutan. Saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen telah merilis aplikasi Sistem Kearsipan Statis Membuka Wawasan dan Sejarah yang disingkat **Si Artis Buka Wajah**. Keberadaan aplikasi tersebut menjadikan publik tanpa dibatasi ruang dan waktu dapat mengunjungi tautan <https://siartis.kebumenkab.go.id/> untuk membuka Si Artis Buka Wajah. Melalui aplikasi Si Artis Buka Wajah juga diharapkan masyarakat Kab. Kebumen dapat mengenal sejarah Kebumen. Khazanah arsip statis dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan disajikan dalam aplikasi pun dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Kebumen.

Si Artis Buka Wajah dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari khazanah arsip statis yang dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen. "Kalangan pendidik, pengamat sejarah, siswa dan mahasiswa sudah banyak yang mengunjungi dan

“SISTEM INFORMASI ARSIP STATIS BUKA WAWASAN DAN SEJARAH DAPAT DIAKSES DIMANA SAJA KAPAN SAJA DAN OLEH SIAPA SAJA”



Kunjungi Kami di..

siartis.kebumenkab.go.id

1 User Interface

Mempaparkan koleksi Arsip Statis dalam berbagai media yang dapat dibaca oleh pengguna SiArtis Buka Wajah



2 Koleksi Variatif

Koleksi Arsip Statis lebih Variatif dengan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna



3 Request Salinan Arsip

Fitur unggulan SiArtis, dimana anda bisa Request Salinan Arsip dengan mudah, dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Dengan demikian Akses Arsip Statis kini dalam genggaman Anda.

4 Autentifikasi QR-Code

Hasil salinan Arsip Statis sudah menggunakan QR-code

5 Live Chat Admin

Pengguna dapat berkomunikasi interaktif dengan admin



Sistem Informasi Arsip Statis Buka Wawasan dan Sejarah Persembahkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen untuk mengakses Arsip Statis dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen telah merilis aplikasi Sistem Kearsipan Statis Membuka Wawasan dan Sejarah yang disingkat Si Artis Buka Wajah. Melalui tautan <https://siartis.kebumenkab.go.id/> masyarakat dapat mengenal sejarah Kebumen dan khazanah arsip statis.

memanfaatkan aplikasi ini. Si Artis Buka Wajah juga mendorong OPD untuk menjadi simpul jaringan dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis yang dapat diajukan secara daring,” terang Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen, Dwi Suliyanto.

Selain melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang kearsipan dinamis maupun statis, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen juga melaksanakan Gelar Pengawasan Arsip Daerah (LARWASIPDA). Pengawasan kearsipan ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019

tentang Pengawasan Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen sebagai LKD Kabupaten juga memiliki kewajiban melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap OPD di lingkungan pemerintah daerahnya.

Walaupun sudah meraih nilai tertinggi atas hasil pengawasan kearsipan tahun 2020, jajaran pemerintah daerah Kab. Kebumen yang dikomandoi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tak lantas berpuas diri. Apalagi mulai tahun 2021 terdapat penyesuaian bobot nilai pengawasan kearsipan. Jajaran pemerintah daerah Kab. Kebumen terus bekerja bersama dengan menjadikan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal sebagai Program Strategis bagi LKD. Dengan demikian, Pengawasan Kearsipan Internal turut

menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 – 2026 Kab. Kebumen.

Hal di atas menjadi cerminan bahwa jajaran Pemerintah Daerah Kab. Kebumen menjadikan pencapaian nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai sebuah motivasi bagi seluruh dinas, untuk bekerja lebih giat dan lebih tersistem agar ke depannya mampu menghasilkan output yang baik, khususnya dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, diharapkan kualitas penyelenggaraan kearsipan Kab. Kebumen yang terus meningkat dari waktu dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya baik bagi pemerintah maupun masyarakat Kab. Kebumen. (tk)

SEBUAH KABAR BAIK: TEKNOLOGI KEARSIPAN DAN ETIKA LINGKUNGAN

Bobby Adia

TEKNOLOGI



WALLPAPERFLARE.COM

Teknologi dan Arsip

Kita kembali berinteraksi dengan sejarah yaitu pada suatu fenomena pergeseran peradaban akibat proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-15. Asa Briggs dan Peter Burke (2006:18) menuliskan bahwa tahun 1450 itu adalah kira-kira tahun penemuan mesin cetak di Eropa oleh Johannes Gutenberg dari Mainz – yang barangkali terinspirasi oleh teknik memeras anggur di tanah kelahirannya Rhineland – menggunakan jenis logam yang dapat digerakkan. Tahun tersebut mengubah tradisi penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan yang diistilahkan sebagai ‘revolusi percetakan’. Termasuk Indonesia, lambat-laun seluruh negara di belahan bumi manapun

merasakan dampak dari penemuan Gutenberg. Perkembangan mesin cetak terus menerus diperkaya sampai pada akhirnya sekarang kita menjumpai sebuah peranti atau instrumen praktis seperti komputer, telepon genggam, dan lainnya.

Revolusi percetakan menjadi momentum pemerataan sosial melalui transformasi budaya lisan menuju budaya tulisan. Dengan itu, sebaran informasi yang sebelumnya terdapat kesenjangan – entah itu faktor di luar tendensi otoritas di dalamnya – berubah menjadi reformasi informasi terhadap peradaban ilmu pengetahuan seperti agama, filsafat, ekonomi, dan lain sebagainya yang menjangkar luas dan cepat termasuk kearsipan sebagai instrumen pokok kelestarian informasi.

Sejak 18 Mei 1971, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam perjalanannya melakukan pendayagunaan secara terus menerus terhadap perkembangan ekosistem ilmu pengetahuan dan

informasi melalui teknologi di bidang kearsipan. Menilik pemikiran A. Sartono Kartodirdjo dalam pidato Pekan Arsip Nasional R.I tahun 1979 bahwa arsip diibaratkan sebagai sebuah *phantom* yang tak terbentuk dan tidak mempunyai soliditas yang hanya dengan suatu kerangka pertanyaan atau konsep-konsep yang jelas, tajam dan ketat sehingga tidak ada kesempatan menghindarinya, *phantom* itu dapat mewujudkan diri secara jelas. Arsip sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan berkehidupan dari masa ke masa meliputi arsip formal (pemerintahan) dan arsip informal (komunitas).

Budaya penciptaan informasi menjadi koherensi antara teknologi dan arsip dari masa ke masa. Seperti sebelumnya mesin cetak, di masa kini dirupsikan teknologi dan arsip menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Teknologi kearsipan memperkuat ketepatan dan keakuratan serta kecepatan sebaran ilmu pengetahuan dan informasi serta penyelenggaraan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Di tahun ke-50 perkembangan teknologi kearsipan di Indonesia menghasilkan sederet teknologi berupa sistem/aplikasi kearsipan yang terus-menerus dikembangkan. Sejak 2003 ANRI mengembangkan Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIPATI) yaitu aplikasi pengelolaan arsip dinamis secara elektronik sesuai dengan trend perkembangan globalisasi informasi dimana hampir seluruh unit di kantor pemerintah maupun swasta telah menggunakan perangkat komputer. Selanjutnya, dengan mengusung konsep *integrated government data center*, pada tahun 2009 ANRI meluncurkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional (JIKN) yang bermaksud agar terciptanya transparansi dan keterbukaan informasi publik terpusat. SIKN JIKN merupakan sistem informasi sekaligus wadah jaringan arsip yang dikelola secara nasional yang memuat data dan informasi arsip yang tercipta pada lembaga negara. SIKN dan JIKN membantu dalam hal penyelamatan arsip yang bernilai sejarah dengan keikutsertaan peran seluruh instansi pusat dan daerah dengan menciptakan memori virtual secara nasional. Kemudian, pada tahun 2009 ANRI juga mengeluarkan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) serta Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sebagai fasilitas untuk digunakan seluruh instansi pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan berbasis elektronik. Pada tahun 2020, ANRI telah meluncurkan aplikasi umum sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bidang kearsipan dinamis yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta ANRI. SRIKANDI mengusung konsep *government to government* (G2G) sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh instansi pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan yang efektif dan efisien.

Presiden Joko Widodo dalam acara Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-50 berpesan “tinggalkan cara lama, yang tak efisien, lambat ditemukan, dan penyimpanan tersebar kemana-mana”, hal ini menjadi sebuah kesempatan dan tantangan bagi ANRI sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam percepatan transformasi SPBE di bidang kearsipan.

Dengan adanya elaborasi

teknologi dan arsip seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things*, *Shared Platform* dan lain sebagainya yang diperkaya maka penggunaan media tekstual atau kertas dapat direduksi menjadi sebuah file digital. Transformasi ke dalam ekosistem digital secara menyeluruh akan mengoptimalkan proses penyelenggaraan kegiatan kearsipan di Indonesia melalui budaya kearsipan elektronik (*electronic archival cultural*) yang efektif dan efisien. Bersamaan dengan itu, sebuah kabar baik juga datang terhadap eksploitasi alam terhadap penggunaan kertas dalam penyelenggaraan kegiatan sehari-hari. Implementasi perkembangan teknologi dan arsip menjadi bukti nyata terhadap etika lingkungan dalam berkehidupan.

Etika Lingkungan

Lingkungan menjadi hal yang begitu penting dalam perspektif sosial-historis sebagai penentu dan pembuka terhadap sejarah perjalanan bangsa yang berkelanjutan. Hadirnya revolusi percetakan yang telah disinggung sebelumnya memberikan dua sudut pandang kritis dewasa ini. Pertama, informasi dan ilmu pengetahuan begitu mudah didapatkan – arsip memberikan jawaban konkret terhadap autentitas sebuah informasi – dan yang kedua menjadi topik utama yaitu terdapat sebuah permasalahan atas produksi material alam yaitu kertas sebagai instrumen atau media.

Dalam Franz Magnis Suseno (1992:137) “Marx memahami manusia sebagai makhluk objektif [*gegenständlich*]”. Maksudnya ialah bahwa manusia selalu sudah menemukan diri di dalam dunia, kata Marx: dalam alam. Maka manusia baru nyata apabila ia mengobjektifkan diri ke dalam dunia. Sekaligus alam itu harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia”. Dalam hal ini kita dapat menggaris-bawahi kepada apa yang

sudah kita perbuat sebagai manusia dalam mengaktualisasikan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal penting – ekosistem informasi dan ilmu pengetahuan. Kebutuhan informasi menjadi pokok demi kemajuan peradaban namun, terdapat reduksi pada orientasi-orientasi normatif lain yang dilupakan.

Hak alam berkesinambungan dengan hak manusia – kita ingin terus tinggal di bumi yang tentram, sehat dan minim bencana. Namun, lambatlau akibat dari ambisi atas instrumen informasi memunculkan proses akumulasi dalam eksploitasi terhadap alam. Produksi kertas mengakibatkan deforestasi terhadap ekosistem hutan. Dilansir dari *greenpeace.org* ditemukan bukti bahwa antara Agustus 2018 hingga Juni 2020, terdapat lebih dari 3.700 hektar lahan gambut terbakar untuk pembangunan kanal perkebunan kayu pulp.

Gagasan dari John Dewey (1958:13) tentang *End-in-View* memberikan ruang kontemplasi bahwa “suatu pertimbangan pokok pertama yang perlu diperhatikan adalah kenyataan bahwa hidup berlangsung dalam suatu lingkungan hidup; tidak hanya dalam lingkungan hidup, tetapi juga berkat lingkungan hidup, melalui interaksi dengannya. ... karir dan nasib makhluk hidup terkait dengan pertukarannya dengan lingkungan hidup sekitarnya, tidak hanya secara eksternal tetapi secara internal”. *The good which is desirable, valuable, and enjoyable* yaitu bahwa hubungan kebutuhan manusia dan alam harus dipertimbangkan dan dikembangkan dengan universal consciousness sehingga pantas diinginkan, sungguh-sungguh berharga dan layak dinikmati. Kebutuhan untuk pemulihan atau disebut *reintegration* diperlukan sebagai pemulihan keseimbangan antara manusia dan alam.

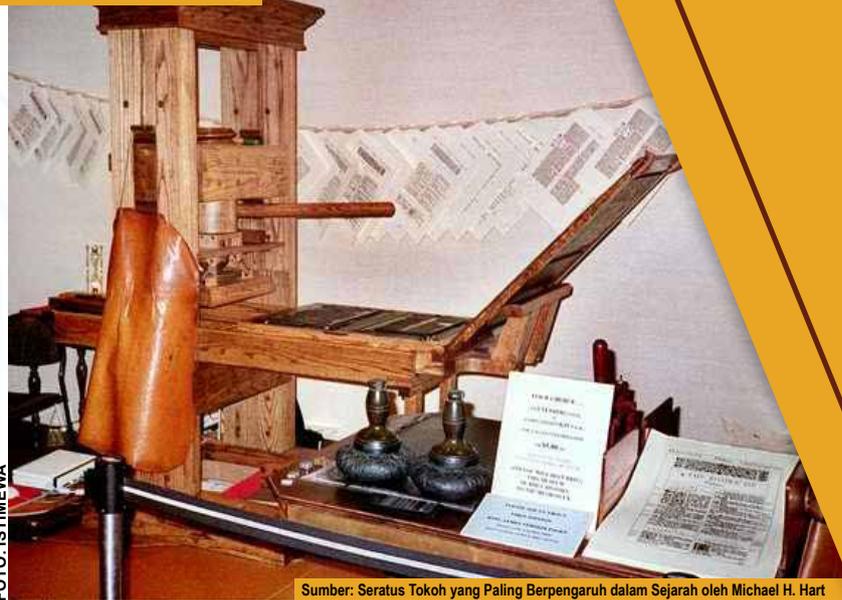


FOTO: ISTIMEWA

Sumber: Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah oleh Michael H. Hart

Revolusi mesin cetak mengubah budaya lisan menuju tulisan (kertas) dan teknologi kearsipan membawa bentuk konvensional (kertas) menuju digital. Jika kita menarik historis di bagian awal maka disrupsi teknologi membawa kita ke dalam kebermanfaatan yang besar bagi manusia dan lingkungan dengan memperhatikan pemulihan terhadap keseimbangan antara kemajuan untuk kemajemukan.

Kabar Baik dari Teknologi Kearsipan

Sebuah kabar baik datang dari perkembangan dunia kearsipan menuju budaya digital. Dalam tren otomasi dan pertukaran data terkini, ANRI meningkatkan akses dan mutu layanan terhadap masyarakat, kebermanfaatan arsip bagi masyarakat dengan akses dimanapun dan kapanpun. Teknologi kearsipan menjamin terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi serta ilmu pengetahuan maupun keputusan dalam pengambilan suatu kebijakan.

Inovasi teknologi kearsipan di Indonesia mampu memberikan harmonisasi terhadap kondisi *existing* manusia dan alam. Penyelenggaraan SPBE di bidang kearsipan akan mereduksi penggunaan kertas (*paperless*) sehingga menjadikan manusia dan alam terus tumbuh dan

bertumbuh dengan selaras. SPBE di bidang kearsipan memberikan kemudahan dengan sebaran data yang tersentral dan mampu diakses dengan mudah serta fleksibel. Dengan terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik maka tercipta kondisi yang efektif dan efisien baik dari segi ekonomis maupun ekologis. Ini semua diwujudkan dengan menjunjung tinggi sains dan rasionalitas ilmiah teknologis serta etika lingkungan demi kemaslahatan peradaban selanjutnya yang menjadi warisan bagi generasi bangsa.

Pokok persoalan selanjutnya ialah bagaimana kesadaran diri (*self-awareness*) mampu mendorong seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat untuk tidak menggunakan kertas berlebihan (*overused paper*) dalam kehidupan sehari-hari. Kearsipan di Indonesia melalui ANRI telah membawa kabar baik melalui elaborasi teknologi dan arsip. Lalu, apakah refleksi kita terhadap peringatan 50 tahun Hari Kearsipan? Apakah kita akan selalu berada dalam *hybrid environment* atau sudah waktunya sadar untuk bertransformasi secara penuh dengan pemanfaatan teknologi demi keseimbangan manusia dan alam di dalam lingkungan tempat kita bernaung. **(ba)**

50 TAHUN KEARSIPAN SEBUAH TANTANGAN PEMBARUAN REGULASI KEARSIPAN

Oleh: Rayi Darmagara



FREEPIK.COM



Hari Kearsipan Ke-50

Tahun Emas Kearsipan :
Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital

Banyak yang menyebut bahwa sebuah kebijakan perlu diatur dalam regulasi, hal ini karena memang republik Indonesia dibangun atas paham legisme, artinya cara pandang bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan dapat diselesaikan dengan undang-undang.

Pada dasarnya undang-undang sendiri secara umum merupakan bagian dari regulasi/peraturan yang dalam konteks negara Indonesia semua dalam bentuk tertulis yang tujuannya pada kepastian hukum. Ketentuan ini dilandasi atas konstitusi negara Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengharuskan segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku.

Hal ini berlaku pula pada ketentuan bidang kearsipan, faktor kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat cepat menggambarkan dinamika hukum terhadap pembentukan regulasi bidang kearsipan. dalam bukunya yang berjudul Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Prof. Mahfud MD

menjelaskan bahwa Pembentukan undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh politik hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Sebagai *legal policy*, arti politik hukum adalah arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang ketika isi undang-undang itu dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya untuk kemudian dirumuskan dalam kalimat-kalimat hukum. Dengan kata lain, jika dibalik terbentuknya regulasi kearsipan, ada tujuan yang ingin dicapai yang bisa digali dengan penafsiran historis terhadap latar belakang lahirnya isi hukum tersebut.

1. Perkembangan regulasi kearsipan di Indonesia

Jika diklasifikasikan, perkembangan regulasi kearsipan dimulai dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

a. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 29 Desember 1961, terdiri atas 4 bab dan 9 Pasal. Peraturan Presiden ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Tujuan filosofis dibentuknya peraturan presiden ini tertuang dalam konsideran adalah dalam rangka menyelesaikan Revolusi Nasional menuju

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahan tulisan yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia di masa yang lampau, sekarang dan yang akan datang.

Dasar hukum peraturan presiden ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1961 yang ditetapkan pada tanggal 16 Mei 1961 yang berisikan tentang pemindahan penyelenggaraan urusan Arsip Nasional dari bidang Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan ke bidang Menteri Pertama. Pemindahan tersebut meliputi seluruh bidang penyelenggaraan urusan Arsip Nasional, termasuk bidang-bidang wewenang dan tugas kewajiban, perlengkapan meteril dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban keuangan dan hal lain-lain yang seharusnya termasuk wewenang dan kewajiban Arsip Nasional RI.

Beleid ini mengatur tentang tugas pemerintah bidang kearsipan dan organisasi kearsipan nasional yang memberikan kewenangan atribusi kepada Arsip Nasional di ibukota Republik Indonesia sebagai inti organisasi daripada Organisasi Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Daerah di tiap-tiap ibukota Daerah tingkat I (termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya, dan arsip-arsip pada badan-badan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain.

Dalam peraturan presiden ini,

arsip diartikan sebagai pada umumnya wujud tulisan dalam bentuk corak teknis bagaimana juga, dalam keadaan tunggal, berkelompok maupun dalam suatu kesatuan bentuk dan fungsi daripada usaha perencanaan pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, dan pada khususnya: kumpulan surat-surat atau bahan-bahan penolong lainnya, dengan fungsi memastikan suatu ingatan dalam administrasi negara dibuat secara physis atau juridis dengan perkembangan organisasi, yang disimpan dan dipelihara selama diperlukan. Fungsi arsip dibedakan atas arsip baru yang senantiasa dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara, dan arsip lama yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

Yang menarik dalam peraturan presiden ini adalah tugas bagi pemerintah melakukan perundingan dan bila perlu dengan pemberian kerugian dalam hal terdapat arsip yang ada di tangan perseorangan atau badan swasta yang dianggap penting.

Dalam penjelasan umum ditegaskan tentang pentingnya organisasi kearsipan dalam penyelenggaraan kelanjutan kehidupan kebangsaan setiap

bangsa, hal ini dilandasi bahwa arsip adalah ingatan, hati nurani (*conscience*) bangsa dan menjadi sumber mutlak sejarah-nasional sebagai pertanggungjawaban tiap-tiap generasi kepada generasi-generasi berikutnya. Semakin sempurna organisasi kearsipan nasional semakin sempurna sejarah nasionalnya.

Secara yuridis formal, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan dapat disimpulkan merupakan regulasi pertama sejak era kemerdekaan terhadap pengaturan bidang kearsipan secara nasional.

b. Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Pada tahun 1971 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan dicabut dengan regulasi yang lebih tinggi tingkatannya yaitu undang-undang. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan tepat tanggal 18 Mei 1971 sekaligus dijadikan pula tonggak dan momentum penegakkan kembali komitmen negara dan seluruh komponen bangsa Indonesia untuk bekerja keras meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan berkualitas. Pada akhirnya kesadaran tersebut dikukuhkan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005, tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai Hari Kearsipan yang diperingati setiap tahun, dan tepat tahun 2021 menjadi tahun emas

kearsipan.

Sejatinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dibentuk dalam kerangka menyelamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia dimasa yang lampau, sekarang dan yang akan datang dengan fokus pada peningkatan penyempurnaan administrasi aparatur negara.

Undang-undang ini terdiri atas 6 bab dan 13 pasal, dengan latar belakang perubahan dalam rangka mengikuti perkembangan kehidupan bangsa serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan administrasi negara secara teratur dan tepat. Salah satu usaha untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini, dibentuk Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai organisasi inti dan unit-unit kearsipan lainnya yang terdapat di seluruh lembaga-lembaga negara dan aparatur pemerintah.

Paling tidak terdapat 4 hal yang baru dalam undang-undang ini diantaranya terkait dengan batasan pengertian dari arsip, perubahan terhadap fungsi arsip, pembagian kewajiban organisasi kearsipan, dan telah diaturnya ketentuan pidana pada undang-undang ini.

Pertama, terhadap pengertian arsip pergeseran terletak pada munculnya badan-badan swasta dan/atau perorangan yang menjadi batasan pengertian sehingga memperluas makna terhadap arsip. Dalam batasan pengertian di Pasal 1 pula

telah muncul frasa “dalam bentuk corak apapun” yang memberikan perluasan terhadap jenis arsip tidak hanya pada arsip dengan media rekam kertas, tertuang dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan naskah-naskah dalam bentuk corak bagaimanapun juga dari sesuatu arsip dalam pasal ini adalah meliputi baik yang tertulis maupun yang dapat dilihat dan didengar seperti halnya hasil-hasil rekaman, film dan lain sebagainya.

Kedua, terhadap fungsi arsip sebelumnya dikenal dengan sebutan arsip baru dan arsip lama, pada beleid ini telah dibedakan atas arsip dinamis dan arsip statis yang tertuang pada penjelasan sebagai berikut: “Pasal 2 ini menegaskan adanya dua jenis sifat dan arti arsip secara fungsional, yakni :

- a. arsip dinamis, sebagai arsip yang senantiasa masih berubah nilai dan artinya menurut fungsinya; dan
- b. arsip statis, sebagai arsip yang sudah mencapai taraf nilai yang abadi khusus sebagai bahan pertanggungjawab nasional/pemerintahan.

Ketiga, terhadap pembagian kewajiban organisasi kearsipan, telah diatur eksistensi dari unit kearsipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 bahwa Pemerintah membentuk organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat dan Daerah. Arsip Nasional di Ibu-Kota Republik Indonesia sebagai inti

organisasi dari pada Lembaga Kearsipan Nasional selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat, dan . Arsip Nasional ditiap-tiap Ibu-Kota Daerah Tingkat I, termasuk Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah. Dalam penjelasan ditegaskan kembali bahwa organisasi arsip dinamis berada dalam Lembaga-lembaga Negara/ Badan-badan Pemerintahan yang bersangkutan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip dinamis.

Keempat, tentang telah diaturnya ketentuan pidana dalam undang-undang ini dinormakan pada bab 5 dalam Pasal 11 dengan kategori sebagai tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan (*misdrifven*). Dua kategori kejahatan kearsipan meliputi dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a yaitu naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. Dengan penjelasan bahwa istilah “memiliki” ini ialah sikap perbuatan sebagai pemilik yang sah terhadap sesuatu barang, yakni sikap perbuatan menguasai barang itu seolah-olah ia pemilikinya, yang dengan demikian ia dapat berbuat sekehendak hatinya atas barang tersebut. Dan bagi

yang menyimpan arsip tersebut (Pasal 1 huruf a), yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Setelah 38 tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan berlaku, tepat pada tanggal 23 Oktober 2009 ditetapkan undang-undang kearsipan yang baru Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Tampaklah bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, dalam beberapa hal dinilai tidak lagi mencukupi kebutuhan dalam pengaturan bidang kearsipan, antara lain bahwa undang-undang ini lebih menekankan pada penyelenggaraan arsip statis, belum cukup memberikan landasan untuk pengelolaan arsip dinamis yang secara langsung berfungsi dalam administrasi pemerintahan dan pembangunan, bersifat sentralistik, memiliki tujuan lebih kepada kepentingan pemerintah, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak mendapat porsi yang selengkap serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa sudah sangat mempengaruhi penyelenggaraan kearsipan.

Undang-undang ini terdiri atas 11 bab dan 92 pasal. Secara struktur pengaturan undang-undang ini bisa disebut sebagai regulasi yang paripurna karena mengatur dari hulu sampai hilir penyelenggaraan kearsipan, dari hal yang sifatnya kebijakan sampai ke teknis pelaksanaan, sejalan pula dengan sistem perkembangan ketatanegaraan, serta teknologi dan komunikasi yang mempengaruhi penyelenggaraan kearsipan.

Secara umum beleid meliputi bab I tentang ketentuan umum yang berisi batasan pengertian dan definisi, bab II tentang maksud, tujuan, asas penyelenggaraan kearsipan, ruang lingkup (subyek hukum, obyek, dan manajemen dalam penyelenggaraan kearsipan), bab III tentang penyelenggaraan kearsipan yang mengatur mengenai tanggung jawab, kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan SKN, pembangunan SIKN, pembentukan JIKN, organisasi kearsipan, unit kearsipan, lembaga kearsipan, pengembangan SDM, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerja sama, pendanaan, bab IV tentang pengelolaan arsip dinamis yang mengatur mengenai ruang lingkup pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, dan kewajiban pencipta arsip. Bab V tentang pengelolaan arsip statis, yang mengatur mengenai ruang lingkup pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan arsip statis, bab VI tentang autentikasi, bab VII tentang organisasi profesi dan peran

serta masyarakat, bab VIII tentang sanksi administratif, bab IX tentang ketentuan pidana, bab X tentang ketentuan peralihan dan bab XI tentang ketentuan penutup.

Pengaturan tentang arsip terjaga, daftar pencarian arsip, hadirnya arsip perguruan tinggi, pembagian kewenangan kearsipan kepada daerah daerah provinsi, kabupaten/ kota, pengaturan terhadap organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, dibentuknya SIKN dan JIKN, munculnya organisasi profesi, sanksi administratif merupakan beberapa hal baru yang dilahirkan dari undang-undang ini.

Satu hal menarik yang penulis ambil dari risalah rapat undang-undang kearsipan adalah pendapat akhir Presiden Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang kearsipan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 28 September 2009 yang menyatakan bahwa “suatu hal yang cukup menggembirakan bahwa selama pembahasan rancangan undang-undang tentang kearsipan ini tidak terjadi pertentangan yang serius karena yang diusung adalah betul-betul untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas”.

2. Pembaharuan Regulasi Kearsipan Perubahan masyarakat dalam

kehidupan berjalan begitu cepat, terlebih pada perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini yang telah membawa dunia memasuki industri 4.0. Era ini ditandai dengan melimpahnya data dan informasi sehingga merubah pengelolaan arsip khususnya pada aspek informasi. Hal ini tentu memberikan pesan bahwa regulasi kearsipan perlu pula merespon perubahan tersebut, dalam sebuah doktrin perspektif hukum terbuka, hukum tidak boleh statis pada suatu titik, sehingga akan menimbulkan konstannya kehidupan masyarakat. Hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa “secara kenyataan hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu.”

Akhirnya, menjadi hal yang wajar jika setelah 11 tahun Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan berlaku perlu dilakukan proses pembaruan, terlebih pada cita hukum dalam merespon dan mewujudkan kepastian hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut penulis, beberapa identifikasi pembaruan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan diantaranya:

- a. pengaturan tentang pengelolaan arsip elektronik.
- b. pengkajian ulang terhadap asas penyelenggaraan kearsipan;
- c. eksistensi lembaga kearsipan

perguruan tinggi negeri;

- d. sanksi administratif undang-undang kearsipan yang didorong lebih kepada rehabilitatif-administratif dan korektif;
- e. ketentuan pidana yang perlu membedakan secara tegas perbuatan administratif dengan kualifikasi kelalaian (culpa) atau kesengajaan (dolus);
- f. pengaturan terhadap arsip kepresidenan;
- g. diperlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka proses penegakan pelanggaran bidang kearsipan;
- h. keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyebabkan dualisme pengaturan terhadap kearsipan; dan
- i. pengaturan kepada jabatan Notaris sebagai jabatan publik yang melaksanakan pengelolaan arsip dalam rangka melindungi hak keperdataan rakyat.

Paling tidak catatan tersebut dan tentu ada catatan lain dari berbagai perspektif dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan menuju arah yang lebih baik dapat digali lebih dalam sehingga regulasi kearsipan dapat mendobrak nilai-nilai usang yang tidak mencerminkan perkembangan kebutuhan masyarakat dan menjadi regulasi yang responsif menuju standar ideal regulasi kearsipan di Indonesia.

Nur Widiana, Arsiparis BPTP Jawa Tengah, Kementerian Pertanian

ALAT PELINDUNG DIRI, ARSIPARIS DAN PERKEMBANGAN ZAMAN

VARIA



FREPIK.COM

Apa itu arsiparis? arsiparis adalah istilah asing di telinga orang awam. Amatlah mengherankan apabila kita yang berada di pemerintahan tidak mengetahui apa itu arsiparis. Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dari pegawai pemerintah juga masih awam tentang tugas dan tanggung jawab arsiparis. Barangkali yang mereka tau mengenai arsiparis adalah pegawai yang berurusan dengan pekerjaan surat menyurat, debu, kotoran dan kertas bertumpuk tidak beraturan di dalam gudang.

Kearsipan masih dianggap tidak penting, hal ini tidak terlepas dari opini di masyarakat yang menganggap bahwa arsip identik dengan sampah. Namun, berbanding terbalik dengan opini tersebut, sesungguhnya arsip akan selalu ada dan terkumpul secara alamiah sejalan dengan berputarnya roda organisasi. Suatu perusahaan/lembaga yang tidak memiliki program manajemen kearsipan terpadu akan mengalami situasi menumpuknya arsip yang tidak dikenali dalam satu ruangan yang akan memunculkan masalah sulitnya mencari suatu arsip ketika dibutuhkan dan sesaknya ruang penyimpanan.

Seiring dengan era globalisasi yang mengisyaratkan akan adanya persaingan

bebas di berbagai bidang maka pengelolaan arsip harus mengikuti ketentuan, kaidah-kaidah yang berlaku sehingga arsip bukanlah benda asing dan tidak berguna, akan tetapi arsip merupakan harta berharga suatu bangsa dan sebagai alat bukti yang sah dan autentik.

Fisik arsip harus dikelola dan dijaga agar selamat dari kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan alam, manusia dan binatang. Apabila fisik arsip sudah terjamin keamanannya maka informasi bernilai guna keabadian di dalamnya dapat membantu sebuah organisasi atau seseorang memperoleh pengakuan hukum atau menjadi alat bukti yang sah di dalam suatu perkara perdata maupun pidana.

Penyelenggaraan kearsipan bukan hanya berada di lingkungan lembaga itu sendiri, melainkan juga harus mendapat dukungan dari lembaga di atasnya. Dukungan tersebut dapat berupa dalam bentuk kebijakan atau pendampingan pelaksanaan kegiatan kearsipan mulai dari hulu sampai hilir atau mulai dari terciptanya arsip sampai dengan penyusutan arsip.

Prasarana dan sarana sebagai faktor penunjang kegiatan kearsipan juga harus direncanakan dan dipenuhi secara terus menerus mengingat kegiatan kearsipan adalah kegiatan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen mulai dari pencipta arsip, arsiparis dan organisasi itu sendiri.

Ketimpangan sering muncul antara kegiatan kearsipan yang dilaksanakan dan pemenuhan sarana prasarana. Tempat penyimpanan atau yang sering disebut dengan *record center* menjadi kendala utama. Membuat *record center* yang memadai dan sesuai standar kearsipan membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi sarana lain seperti boks arsip, kertas *casings*, dan rak arsip yang juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Kebutuhan sumber daya manusia kearsipan pun mau tidak mau mengikuti kebutuhan perkembangan organisasi. Peta jabatan yang dirangkum dan diajukan harus telah memenuhi syarat akan kebutuhan arsiparis di suatu organisasi itu sendiri. Arsiparis yang tersedia haruslah mampu memenuhi kebutuhan kegiatan kearsipan di organisasinya. Arsiparis dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang kreatif, mandiri, dan mengikuti perkembangan pengelolaan kearsipan. Berbagai pelatihan dan peningkatan kemampuan dilakukan melalui uji kompetensi. Pengetahuan di bidang teknologi informasi juga menjadi hal yang wajib untuk meningkatkan pelayanan kearsipan kepada masyarakat melalui sebuah

aplikasi berbasis teknologi informasi.

Beban dan tanggung jawab arsiparis yang kian berat haruslah mulai menjadi perhatian bagi sebuah organisasi. Prasarana dan sarana yang memadai juga harus diperhatikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja arsiparis mengingat risiko akibat bekerja di lingkungan berdebu, kutu, kuman, bahaya dari bahan kimia kertas, terkena *staples/cutter*, kejatuhan benda berat, terjatuh ketika melakukan penataan arsip di rak arsip, terkiilir ketika mengangkat/memindahkan arsip dan masih banyak lagi.

Dari segi fisik dapatlah terlihat faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja masih kurang mendapat perhatian. Belum lagi masalah kesehatan lain seperti paru-paru dan mata. Dalam pengawasan dan standar pengelolaan arsip juga belum dicantumkan tentang bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Tidak adanya pengaturan untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja arsiparis ketika melakukan pembinaan ke unit kerja bidang kearsipan dapat

disebabkan oleh kelalaian atau bahkan ketidakpedulian sebuah organisasi dalam memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja arsiparis.

Permintaan fasilitas tambahan seperti vitamin daya tahan tubuh, perlengkapan P3K, sarung tangan, masker dan juga baju kerja arsiparis belum terpenuhi. Bahkan belum ada aturan penyelenggaraan kearsipan mengenai kecelakaan kerja arsiparis. Arsiparis juga merupakan aset vital organisasi dalam pengelolaan kearsipan. Dengan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja para arsiparis diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga mencapai hasil yang maksimal.

Pemenuhan sarana penunjang kesehatan arsiparis yang paling sering diabaikan adalah masker, sarung tangan dan baju kerja arsiparis. Masker berfungsi melindungi dari debu yang dapat masuk ke paru-paru. Sarung tangan melindungi tangan dari bahaya *cutter/gunting/staples* ketika melakukan pengelolaan arsip. Bukan hanya petugas laboratorium saja yang memiliki baju kerja laboratorium,



Alat pelindung diri yang digunakan Arsiparis

FOTO: ISTIMEWA

tapi arsiparis pun wajib memilikinya di mana baju kerja tersebut memiliki fungsi pelindung kotoran yang bisa melekat baju arsiparis.

Setidaknya alat perlindungan diri tersebut harus terpenuhi dan menjadi syarat utama yang tidak boleh diabaikan dalam mendukung kegiatan kearsipan. Sebagai arsiparis kita dapat merasakan beban berat yang belum disadari oleh organisasi pada saat ini. Kerap kali pentingnya alat pelindung diri tersebut masih dianggap enteng dan bukan hal yang penting karena menganggap pekerjaan yang dilakukan oleh arsiparis adalah pekerjaan yang mudah dan minim risiko.

Di era digital saat ini seorang arsiparis dituntut untuk semakin pandai dan cepat melakukan pengelolaan arsip. Kemajuan teknologi menuntut arsiparis semakin handal dalam menggunakan berbagai aplikasi kearsipan. Bahkan aturan dan kebijakan dari berbagai organisasi beramai-ramai memenuhi tuntutan ini. Namun, sangat disayangkan apabila kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja arsiparis.

Sosialisasi mengenai aturan alat pelindung diri arsiparis pun belum pernah menggema dalam seminar-seminar maupun pertemuan

kearsipan. Seharusnya dalam situasi pandemi virus Covid-19 yang membuat kita belajar mengenai wajibnya menggunakan masker untuk mencegah penularan virus, juga membuat kita sadar pentingnya penggunaan masker oleh arsiparis yang bekerja dalam lingkungan atau tempat berdebu pada saat melaksanakan pengelolaan arsip. Tidak ada atau tidak digunakannya masker dalam melaksanakan pengelolaan arsip dapat menyebabkan kerusakan paru-paru bagi arsiparis.

Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen bersama untuk mendukung upaya kesehatan dan keselamatan kerja arsiparis. Bukan hanya hasil kerja maksimal yang akan didapatkan tetapi juga kesehatan arsiparis akan terpelihara. Dapat kita bayangkan apabila arsiparis yang kita miliki terganggu kesehatan dan keselamatannya maka akan banyak arsip yang menumpuk dan tidak terpelihara dengan baik sehingga menyulitkan kita untuk mendapatkan arsip yang autentik dan menyulitkan peningkatan penyampaian informasi kepada publik.

Alangkah indahnya jika tuntutan perkembangan zaman di bidang kearsipan diimbangi dengan pemenuhan fasilitas kesehatan dan keselamatan para pengelolanya. Akan lebih banyak lagi orang yang akan tertarik untuk belajar dan berkecimpung di dalam bidang kearsipan. Sebab kini orang akan sadar dan tau bahwa pekerjaan arsiparis bukanlah pekerjaan “orang buangan” yang identik dengan ruang kotor dan berdebu tetapi juga adalah tonggak utama dalam mendukung pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip sesuai dengan amanat SE Menpan-RB Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara Periode 2014 - 2019 (Kabinet Kerja).



FOTO: ISTIMEWA

APD lengkap, kesehatan dan keselamatan kerja arsiparis terjaga



FREEPIK.COM

KISAH KANG HADI

Oleh: Rika Salsabila

Tahun 2019, untuk pertama kalinya diriku menginjakkan kaki di Universitas Islam Negeri Jakarta. Sebuah awal yang diharapkan bisa menjadi lebih baik untuk seterusnya. Begitulah harapanku ketika pertama kali memandangi lantai kokoh dengan beton disampingnya. Sapaan hangat menantiku untuk terus menelusuri area kampus ini. Di tiap pijakan menandakan awal untuk memulai, entah itu bertemu orang baru dan cerita-cerita dibalikinya.

Kurang lebih sudah 1,5 tahun diriku berkuliah, belum semua gedung-gedung ini ku datangi. Apalagi, aktivitasku di kampus harus terhenti dengan pandemi Covid-19. Sebuah wabah di mana semua orang mewajibkan untuk menjaga imunitas. Kesehatan menjadi topik utama hingga saat ini, tak jarang dari setiap awal pembicaraan selalu diakhiri dengan topik kesehatan.

Terkadang, aku memikirkan orang-orang di sekitarku. Ucapan

untuk terus menjaga diri terus ku lontarkan, begitu fasih rasanya. Hal ini membuat tahun 2020 terasa lebih cepat. Baru kemarin rasanya aku memasuki dunia perkuliahan, sekarang sudah begitu melekat. Ada rasa yang tidak bisa lepas ku pikirkan, para pekerja, pedagang, penjaga toko di kampusku ini. Bagaimana kabar mereka?, apakah baik-baik saja?, apakah kinerja mereka terpengaruh pandemi ini?

Pertanyaan itu terus

menghantuikui hingga akhirnya, dapatlah kesempatan untuk mengunjungi kampus. Diriku di bulan februari kemarin, memiliki sebuah urusan surat-menyurat di Fakultas. Sebagai usaha memenuhi persyaratan untuk beasiswa masa depanku. Dokumen penting itu akan menjadi bukti otentik nantinya, walaupun dengan jumlah yang banyak. Setiap seminggu dalam 3 hari kerja, kampus membuka pintu bagi mahasiswa yang ingin berurusan. Dibalik aturan tersebut, aku ingat betul bagaimana sahabatku Tika, keheranan dengan pelayanan kampus yang tutup. Ternyata salah satu pekerja terkena Covid-19. Imbasnya, pelayanan tutup. Pusing rasanya, imbu Tika kepadaku. Teringat kisah Tika dengan kampus di tengah Pandemi, langsung ku hubungi dia untuk menemaniku mengurus surat-menyurat. Ia menyetujuinya dan pada siang itu, aku berangkat ke kampus.

Kampusku yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan ini sangat unik. Sebuah wilayah yang padat penduduk. Hawa panasnya membuat siapapun tidak ingin merasakan, begitu juga diriku dan Tika. Kami segera memasuki gedung Fakultas yang terbantu dengan pendingin ruangan. Segala surat persyaratan yang ku bawa langsung diperiksa dengan cepat. Ada beberapa dokumen yang perlu diperbanyak. Untuk itu, kami harus berjalan keluar kampus. Mencari toko alat tulis dan foto kopi. Tika dengan sabar mengantarku ke samping Gedung Universitas di jalan sempit, dengan panasnya Ciputat yang menyengat.

Kami mengunjungi toko kang Cecep, seorang penjaga toko yang ramah dengan peci hitam bermotif merah di kepala. Baju batik biru

pegawai negeri membuat kami tersenyum dan terheran, karena tidak biasanya. Kang Cecep seringkali hanya memakai baju lengan pendek yang berwarna hitam. Siang itu, langsung ku lontarkan pertanyaan. “Kang, gak biasanya pakai batik, punya saha (siapa)?!,” diriku bertanya sambil tertawa.

“Kepo pisan, mau tahu nya?,” balas Kang Cecep.

“Eh! Kok tahu kang?! Mau foto copy jeung nanya atuh!, kok jadi tahu?!” sahutku keheranan.

“Ih si neng mah, eta maksudna teh nanya batik kan kamu?, ini teh baju gue neng,” Kang Cecep sambil tertawa.

Sambil ku serahkan surat yang ingin diperbanyak, muka tidak percaya membuat kang Cecep yang sedang duduk terbangun. Ia langsung mengambil surat itu dan bertanya, “Eh neng, mau berapa lembar?, jawabanya 2000 nih pasti.”

Kang Cecep seperti sudah tahu, tanpa basa-basi ia langsung mengarahkan kekuatannya untuk memperbanyak surat-surat itu. Saat suara mesin foto kopi bekerja, kang Cecep langsung menjawab pertanyaanku tadi. Baju batik biru yang sering disebut Korpri tersebut, merupakan milik kakanya. Kang Hadi namanya, dulu seorang guru SMA di Majalaya, Jawa Barat. Kang Cecep sambil membenarkan peci hitamnya mengatakan, kang Hadi adalah orang yang jujur. “Kalau ingat beliau yah, ingatnya orang baik. Belum lama pensiun orangnya, dia teh dijebak sama atasan. Batiknya ini diserahkan ke gue neng,”

“Dikasih ke akang?, kenapa atuh? Kan kenang-kenangan yah,” Tika sahabatku bertanya.

“Ini neng Tika, saat pakai baju ini, kang Hadi kena marah kepala sekolah. Kalau kita mah, malu gitu ya neng rasanya. Udah kitu teh kang Hadi dituduh hilangin dokumen duit sakola, dia nya marah sama yang udah jebak dia,” kang Cecep sambil merapihkan suratku. Ia melanjutkan, bahwa kang Hadi yang ingin pensiun menjadi sasaran empuk para oknum di sekolah. Karena guru yang bila sudah waktunya menjelang pensiun, akan diberikan tugas ringan seperti membantu di perpustakaan atau tata usaha.

Sebelum kang Cecep melanjutkan ceritanya, ia memberikan surat-suratku yang sudah dirapihkan bagian pinggirnya. Tika izin ke kios sebelah untuk membeli minuman dingin di siang itu, langsung saja kang Cecep melanjutkan cerita.

“Gue teh neng, sebenarnya seneng aja pakai baju ini ya, abdi negara kitu. Tapi, kang Hadi ceritanya lain. Kasihan gue sebenarnya, habis upacara difitnah karena hilangin arsip sama orang tata usaha, sekolahnya jadi ditegur sama pemerintahnya,”

Ia melanjutkan, “itu yang namanya arsip aya ruangan khususnya, teu sembarangan orang hayang masuk-keluar. Si Kang Hadi teh cuma anter arsipnya dari tata usaha kitu, pas di akhir tahun ada laporan keuangan yang hilang. Orang keuangan mah santai, kang Hadi kebingungan diomelin.”

Kang Hadi sampai mencari-cari ke ruangan lain, dibantu sama guru lain. Setelah puas dimarahi, kang Hadi di hari-hari berikutnya seperti tidak dihargai. Hanya karena laporan keuangan yang hilang. Kang Cecep menuturkan, kalau sekolah di Majalaya saat itu tidak lengkap

seperti saat ini. Semuanya disatukan, maksudnya semua barang disatukan. Tidak dipisah mana yang penting dan bukan, sampai laporan yang penting pun hilang entah kemana.

Kang Cecep menggambarkan kang Hadi sebagai orang yang sabar, ia setiap harinya menyempatkan diri untuk mencari-cari laporan tersebut. Sampai sore di sekolah hanya untuk membuka tiap berkas. Sebelum melanjutkan ceritanya, kang Cecep bertanya kepadaku. “Neng, udah pernah masuk belum ke ruangan arsip?,” langsung saja ku jawab belum. Karena seperti yang kang Cecep katakan, bahwa ruangan tersebut tidak bisa dimasuki sembarangan orang.

“Di sana tuh ya, isinya aset! Bukan emas, duit yah. Lemari nya khusus, kotaknya bukan kaya kardus mie instan!, bahan-bahan bukan kaya gini, ukuran dan warna juga khusus,” kang Cecep sambil menunjuk kotak mie instan yang diisi kertas kado. Dalam kisah kang Hadi, menuturkan bahwa di sekolah itu hanya menggunakan kardus barang elektronik sebagai tempat dokumen disimpan. Kang Hadi sambil beresin, ketemu sama kecoa mati, ruangan banyak nyamuk, itu semua dia rasain sebulan penuh hanya untuk mencari satu berkas keuangan. 10 lembar katanya dan tidak tahu di mana. Kang Cecep menyebutkan tidak adanya petugas yang bertanggung jawab terhadap ruangan dan isinya. “Terbengkalai!,” teriak kang Cecep.

Sambil tertawa dengan nada kesal, kang Cecep sangat menyayangkan sikap kepala sekolah yang asal menyalahkan. Ketika

dilakukan pembersihan ruangan dan merapikan arsip, 10 lembar berkas keuangan tersebut ditemukan di perpustakaan sekolah. Bayangkan? Dokumen penting diletakan di sembarang ruang. Kang Hadi cukup tabah untuk memaafkan orang-orang yang mengacuhkan dan tidak hormat selama sebulan. Arsip fisik berupa dokumen penting, foto dan barang-barang sekolah diletakan sembarangan. Hal ini beralasan katanya. “Teu aya duitna mau bangun ruangan,” begitu katanya.

Kang Cecep spontan bertanya kepadaku, “Ini nanti simpan yah, mau surat aslinya yang ada cap, materai dan foto copy. Kalau gak ada, capek nyari nanti, anggap kenangan kalau misal gak lolos beasiswa nya” imbu kang Cecep kepadaku.

“Ah kang!, doa nya baik dong!, tapi sudah pasti akan disimpan sih di file dokumen,” jawabku.

“Neng, ada tikus gak di rumahnya?,” kang Cecep bertanya.

“Ada atuh!,” teriak diriku.

“Neng, jangan sembarangan. Arsip itu, negara aja punya arsip! Masa diri sendiri gak punya? Gue waktu itu simpan ijazah SMP di file dokumen warna pink saja digigit tikus, kaya permen kali lihatnya gara-gara warna pink, kenangan manis itu belajar 4 tahun” sambil tertawa kang Cecep karena pernah tidak naik kelas.

Tika datang dan langsung bertanya ke kang Cecep, “Itu kang, udah cocok pake batik PNS nya. Kalau jadi PNS, kerja dimana tuh, mau ikutin jejak kang Hadi?,”

“Gak ah, kang Hadi mah masih SMA. Gue mau kerja di Gedung kampus kalian aja neng. Siapa tahu yang urusin arsipnya acak-acakan, kaya SMA kang Hadi. Iya kan? Denger-denger gitu.” sambil tertawa dan memberikan surat-suratku.

“Iya juga ya, Tik. Di kampus kita ada ruangan arsip gak sih?,” tanyaku ke Tika. Spontan kami langung mengucapkan pamit ke kang Cecep dan bergegas ke gedung Fakultas. Kang Cecep mengingatkan kita untuk selalu menyimpan kenangan setiap hal, karena dari situ cerita akan terus hidup.

Sembari berjalan, Tika menyampaikan bahwa kisah kang Hadi memang sangat miris. Mungkin, masih banyak kasus serupa yang tidak pernah diketahui. Sudah pasti, benang merah dari kisah kang Hadi adalah pengurusan dan pemeliharaan arsip yang masih belum tepat. Padahal, arsip memiliki peran penting, vital dan bernilai sebagai aset berharga. Diri kita pun pasti memiliki arsip tersendiri, entah itu dokumen akademik seperti ijazah maupun lembar-lembar ujian yang pernah kita tulis. Disinggung kang Cecep, langsung saja kami bertanya satu sama lain, “Arsip kampus kita bagaimana ya?, disamping itu, kami bergegas *googling* mencari negara yang katanya juga memiliki arsip, yaitu Arsip Nasional RI. Itu yang dimaksud kang Cecep tadi. Keinginan itu belum terwujud sayangnya, untuk berkunjung akibat pandemi, semoga secepatnya.

LIPI SERAHKAN ARSIP STATIS TAHUN 1956-2018 KEPADA ANRI

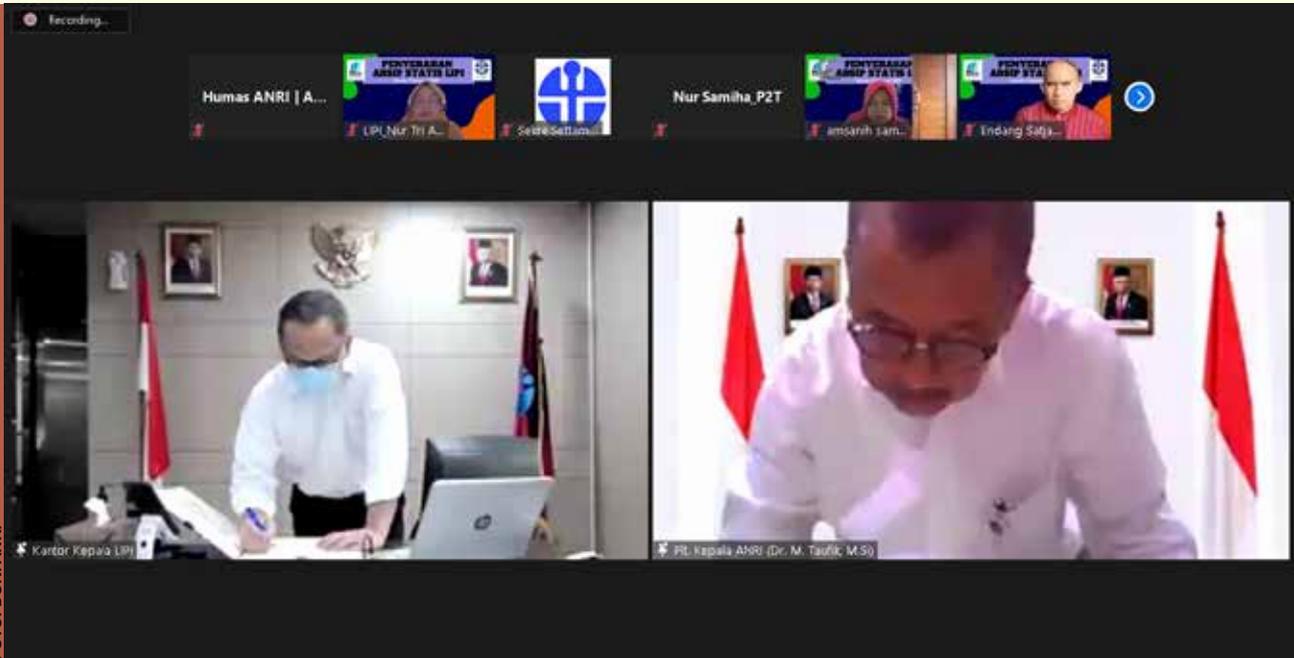


FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI (kanan) M. Taufik dan Kepala LIPI (kiri) Laksana Tri Handoko menandatangani berita acara penyerahan arsip statis yang dilaksanakan secara daring (07/01/21).

Jakarta (07/01) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaksanakan serah terima arsip statis secara daring. Arsip statis yang diserahkan LIPI kepada ANRI merupakan arsip dalam kurun waktu 1956-2018, berjumlah 20 berkas dan 104 lembar arsip yang terdiri atas arsip tentang pembentukan LIPI, termasuk Undang-Undang (UU) dan Keputusan Presiden, arsip tentang Hak Kekayaan Intelektual, arsip kerja sama, serta arsip perseorangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LIPI.

Arsip statis LIPI diserahkan simbolis oleh Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko kepada Pelaksana Tugas

(Plt) Kepala ANRI, M. Taufik secara daring. Acara tersebut diikuti 120 partisipan serta turut hadir Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries dan Direktur Akuisisi ANRI, Rudi Anton.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik menyampaikan bahwa tahun 2021 ini sudah diawali dengan goresan sejarah dan penambahan khazanah kearsipan Indonesia. Selain mengingatkan bahwa penyerahan arsip ini merupakan amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, M. Taufik juga mengajak untuk mengembangkan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. "Harus kita tumbuh kembangkan arsip di negeri ini. Arsip bukan tumpukan kertas. Kita bersama-sama sepakat bahwa arsip

menjadi informasi dan pengetahuan ke depan, dan memberikan informasi autentik," jelas M. Taufik.

Dalam pembukaan acara, Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko juga menyatakan pentingnya arsip, bahwa arsip dapat menjadi pengetahuan yang akan bermanfaat dan berguna di masa mendatang.

Setelah kegiatan penandatanganan berita acara dan penyerahan arsip statis, acara dilanjut dengan diskusi pembahasan Strategi Penyelamatan Arsip Negara secara Sistematis dan Terkendali di Lingkungan LIPI dengan narasumber Direktur Akuisisi ANRI, Rudi Anton. **(sa)**

KOMISI II DPRD KOTA SERANG KONSULTASI KEARSIPAN KE ANRI

Jakarta (27/01) - Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Andi Kasman, menerima kunjungan kelembagaan dari anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Serang di Ruang Soemartini, ANRI Jakarta, Rabu (27/1). Kegiatan tersebut dalam rangka konsultasi terkait pembangunan sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Sertifikasi Arsiparis.

Pada kesempatan tersebut, Andi Kasman didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Imam Mulyantono, Kepala Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Listianingtyas Murgiwati, Direktur Kearsipan Daerah II Amieka Hasraf, dan Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan Abdullah Shobri.

Dalam arahannya, Deputi IPSK ANRI, Andi Kasman mengungkapkan bahwa aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi umum di bidang kearsipan dinamis sudah diberlakukan secara nasional dan mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Ada beberapa manfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu mengimplementasikan aplikasi tersebut dengan baik, di



Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI (dua dari kanan) Andi Kasman saat memberikan arahan pada kegiatan konsultasi kearsipan Komisi II DPRD Kota Serang di RSG Soemartini Gedung A Lt. 2 Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (27/01/21).

antaranya memudahkan komunikasi dan koordinasi antar instansi dan pemerintah, serta memudahkan akses informasi kearsipan yang diperlukan oleh publik. Selain itu, dengan penggunaan aplikasi SRIKANDI diharapkan kinerja aparatur meningkat dan lebih optimal dalam mencapai target organisasi serta mendukung upaya penghematan kertas,” jelas Andi Kasman.

Terdapat dua proses dalam upaya digitalisasi arsip, pertama arsip yang tercipta sejak awal dengan komputer dan menggunakan aplikasi SRIKANDI baik di pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, arsip yang tercipta dengan alih media dan hasilnya tetap sah namun perlu dilihat kembali terkait aturan perlunya berita acara yang memuat bahwa arsip telah dialihmediakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan aman untuk digunakan oleh publik.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Serang, Aminudin mengungkapkan adanya kendala kurangnya jumlah SDM di bidang kearsipan di Pemerintah Kota Serang, yakni hanya terdapat 8 arsiparis dari sebanyak 33 OPD. Di samping itu, kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran aparatur akan pentingnya arsip dan pengelolaan kearsipan. Hal tersebut mempengaruhi kinerja kearsipan, baik dari sisi implementasi maupun pengawasan kearsipan di Kota Serang yang saat ini masih kurang dan perlu ditingkatkan.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini adalah perlu penambahan jumlah formasi arsiparis di Pemerintah Kota Serang. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan membuka kesempatan *inpassing* bagi pegawai, serta memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang kearsipan. (tr)

ANRI, LIPI DAN UNESCO GELAR WORKSHOP IDENTIFIKASI ARSIP PENANDA KESETARAAN GENDER



FOTO: DOK. ANRI

Peneliti Bidang Perkembangan Politik Lokal LIPI, Kurniawati Hastuti Dewi sedang memberikan pemaparan materi pada acara *Workshop* Identifikasi Arsip yang berhubungan dengan Penanda Kesetaraan Gender, kegiatan tersebut digelar melalui daring (28/01/21).

Jakarta (28/01) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menyelenggarakan *Workshop* Identifikasi Arsip yang berhubungan dengan Penanda Kesetaraan Gender secara *virtual*, Kamis (28/1). Sekitar 50 orang yang merupakan perwakilan dari ANRI, LIPI, Komite *Memory of the World* (MoW) Indonesia, UNESCO Office Jakarta, serta para Sejarawan mengikuti *workshop* tersebut.

Workshop ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan hasil identifikasi arsip terkait kesetaraan gender (*gender equality marker*) yang akan

diajukan/dinominasikan sebagai UNESCO MoW. Selain itu, *workshop* digelar sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan meningkatkan akses warisan dokumenter dunia melalui Program MoW UNESCO.

Pelaksana Tugas Deputy Bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati dalam sambutannya menyampaikan bahwa ANRI mendukung penuh pemanfaatan arsip yang tersimpan di ANRI. "Melalui *workshop* ini, kami harap bisa memberikan gambaran dan cakupan arsip terkait kesetaraan gender yang tersimpan di ANRI dan akhirnya bisa menjadi bahan untuk finalisasi *output* berupa daftar arsip yang berisi kumpulan arsip tentang peristiwa dan tokoh yang disatukan

dalam tema tertentu," jelas Multi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite MoW Indonesia, Mego Pinandito menyampaikan bahwa isu kesetaraan gender telah lama menjadi suatu permasalahan, sehingga hal ini menjadi salah satu prioritas global UNESCO. Maka itu, UNESCO mengajak berbagai pihak pengelola warisan dokumenter untuk bekerja sama mengidentifikasi warisan dokumenter yang memiliki keterkaitan dengan isu gender sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Adapun materi terkait Identifikasi Arsip yang berhubungan dengan Penanda Kesetaraan Gender disampaikan oleh beberapa narasumber, di antaranya *Advisor for Communication and Information* UNESCO Jakarta, Dr. Lim Ming Kuok, Arsiparis Madya ANRI, Nadia Fauziah, dan Peneliti Bidang Perkembangan Politik Lokal LIPI, Kurniawati Hastuti Dewi.

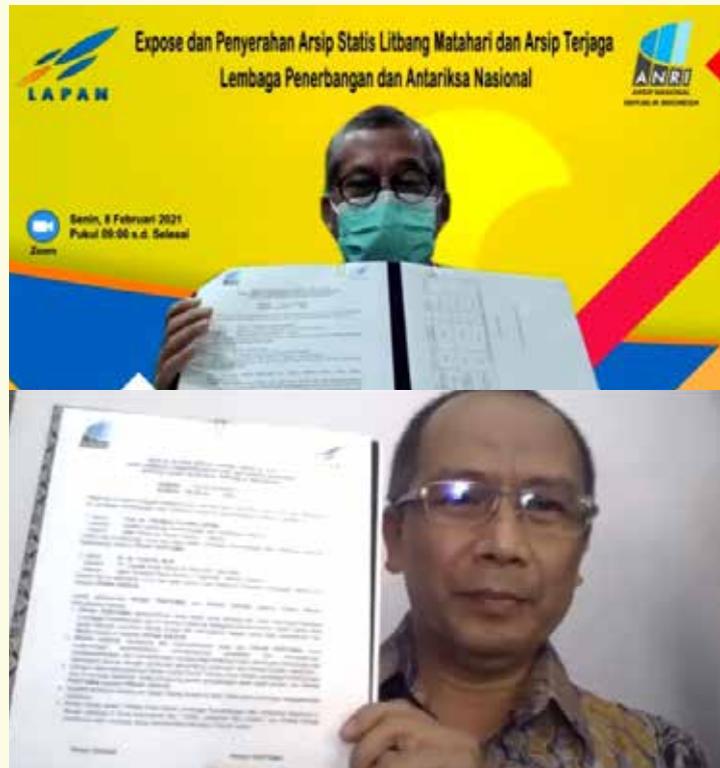
Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan kajian gender di Indonesia. Lebih lanjut, hasil dari kegiatan ini juga diharapkan akan menghasilkan suatu rekomendasi terhadap kategori arsip gender yang mempunyai potensi untuk diusulkan sebagai ingatan dunia. **(enu)**

SERAH TERIMA ARSIP STATIS LAPAN KEPADA ANRI

Jakarta (08/02) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melaksanakan serah terima arsip statis dan salinan autentik arsip terjaga secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Arsip statis yang diserahkan LAPAN kepada ANRI adalah arsip statis tentang Penelitian dan Pengembangan Matahari yaitu berupa arsip tekstual mengenai data sunspot atau bintik matahari sebanyak 24 boks dan arsip media baru berupa hasil kajian matahari sebanyak 1 keping *Compact Disk* (CD). Sedangkan salinan autentik arsip terjaga yang diserahkan ke ANRI berupa arsip media baru sebanyak 1 keping CD yang berisi hak paten dan desain industri serta peta pulau terluar.

Dalam sambutannya, Kepala LAPAN Prof. Thomas Djamaluddin menyampaikan bahwa LAPAN telah menyerahkan arsip statis kepada ANRI sebanyak 13 kali sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. LAPAN juga sudah memperoleh nilai pengawasan kearsipan ANRI dengan kategori sangat baik. "LAPAN juga sudah membangun gedung penyimpanan arsip sebagai wujud perhatian akan pentingnya arsip. Hasil pengembangan LAPAN akan terus dijaga dengan baik karena kearsipan menjadi hal yang penting dalam pengembangan dan kemajuan teknologi," jelas Thomas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik menyampaikan penghargaan yang luar biasa dan apresiasi atas



Plt. Kepala ANRI (atas) M. Taufik dan Kepala LAPAN (bawah) Thomas Djamaluddin memperlihatkan berita acara penyerahan arsip statis dan salinan autentik arsip terjaga yang dilaksanakan secara daring (08/02/21).

perhatian dan komitmen LAPAN tentang kearsipan. "Arsip adalah aset lembaga dan negara. Oleh karenanya, arsip harus diolah sebagai informasi dan menjadi sebuah rujukan catatan sejarah masa lalu kini dan mendatang," terang M. Taufik. Dalam kesempatan ini Plt. Kepala ANRI juga menyampaikan bahwa jumlah arsiparis di LAPAN masih perlu ditambah lagi.

Pada kegiatan penyerahan arsip statis ini didahului dengan penandatanganan dua berita acara, yaitu berita acara serah terima arsip statis dan berita acara serah terima salinan autentik arsip terjaga yang ditandatangani oleh Kepala

LAPAN dan Plt Kepala ANRI. Acara ini dilanjutkan dengan penyerahan arsip statis secara simbolis. Turut hadir pula Pejabat Eselon I dan II di lingkungan LAPAN serta Direktur Akuisisi ANRI, Rudi Anton. Dalam rangkaian acara ini pun dilaksanakan ekspose yang diikuti sebanyak 144 peserta dengan narasumber Kepala Pusat Sains Antariksa, Clara Yono Yatini yang menyampaikan paparan tentang pengamatan dan penelitian matahari. Adapun Direktur Akuisisi Rudi Anton menyampaikan materi tentang strategi penyelamatan arsip negara secara sistemik dan terkendali di lingkungan LAPAN. **(ke)**

FOTO: DOK. ANRI

ANRI SELAMATKAN ARSIP WARISAN BUDAYA KASUNANAN SURAKARTA



FOTO: DOK. ANRI

Direktur Preservasi (tengah) Kandar didampingi Kepala Dinas Kebudayaan (kanan) Agus Santoso dan Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Surakarta (kiri) Agus Wahyono saat meninjau arsip yang berhasil diselamatkan dan diperbaiki melalui metode restorasi (enkapsulasi dan laminasi) dan digitalisasi (26/02/21).

Solo (26/02) - Perjalanan terbentuknya Republik Indonesia memiliki sejarah yang sangat Panjang. Di antara perjalanan panjang sejarah tersebut, dulu Indonesia dikenal sebagai nusantara karena terdiri dari ribuan pulau memiliki ratusan kerajaan dengan berbagai kejayaannya yang berkontribusi dalam terbentuknya Indonesia. Bukti keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut begitu penting bagi Bangsa Indonesia dalam merajut peradaban bangsa sebagai memori kolektif bangsa Indonesia.

Bukti-bukti peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut tersimpan dalam berbagai media simpan seperti artefak, daun lontar, bangunan bersejarah dan sebagainya, yang

dapat ditelusuri melalui peninggalan arsipnya. Arsip-arsip tersebut perlu ditelusuri, diselamatkan dan dilestarikan supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sebagai warisan budaya Indonesia. Melalui program penyelamatan arsip statis nasional dan warisan budaya, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan edukasi, asistensi, dan fasilitasi terhadap penyelamatan arsip warisan budaya di kerajaan-kerajaan dan pusat-pusat kebudayaan di Indonesia.

Direktur Preservasi, Kandar memimpin langsung tim penyelamatan arsip warisan budaya di Museum Radya Pustaka Surakarta pada tanggal 22 s.d. 26 Februari 2021. Arsip yang

diselamatkan sebagian besar berupa arsip peninggalan kerajaan besar Kasunanan Surakarta yang mengalami kerusakan karena faktor usia dan bencana dari faktor biologi berupa jamur dan binatang. Arsip yang berhasil diselamatkan oleh tim ANRI melalui metode restorasi (enkapsulasi dan laminasi) dan digitalisasi berjumlah lebih dari 400 arsip. Hasil pekerjaan tim ANRI diserahkan langsung oleh Direktur Preservasi, Kandar kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Agus Santoso dan Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Surakarta, Agus Wahyono berupa arsip digital sebagai *back up*.

Program penyelamatan arsip warisan budaya nasional yang telah dilakukan sejak tahun 2007-2019 sebanyak 18.347 arsip pada 17 kerajaan dan pusat kebudayaan. Program ini diharapkan terus berkelanjutan dan dapat dikembangkan secara masif pada seluruh pusat kebudayaan dan kerajaan nusantara. Sinergitas ANRI dengan seluruh Lembaga Kearsipan Daerah, perguruan tinggi, badan usaha, dan masyarakat akan terus dibangun supaya arsip warisan budaya lestari dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan program penyelamatan arsip warisan budaya nasional turut berperan serta dalam mempercepat pembangunan revolusi mental seluruh anak bangsa melalui nilai-nilai luhur dan tinggi makna yang dapat mereka dipelajari. (pn)

ANRI GELAR SERTIFIKASI ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENPERIN RI

Jakarta (17/03) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Arsiparis di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI yang dilakukan secara daring pada Rabu, 17 Maret 2021.

Pada kegiatan tersebut, turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik, Sekretaris Jenderal Kemenperin RI, Dody Widodo, Sekretaris Utama ANRI, Imam Gunarto, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Sumrahyadi, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan dan Sertifikasi, Wawan, dan Kepala Biro Umum Kemenperin RI, Setia Utama.

Sekretaris Jenderal Kemenperin RI, Dody Widodo mengatakan kegiatan ini terselenggara dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip dan Kemenperin RI melakukan kegiatan Sertifikasi Jabatan Fungsional



Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M. Taufik saat memberikan sambutan pada pembukaan acara sertifikasi arsiparis di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (KEMENPERIN RI) yang dilaksanakan secara daring (17/03/21).

Arsiparis sebagai salah satu upaya dalam lingkup tertib SDM Kearsipan.

“Dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip dimaksud, maka Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai salah satu upaya melaksanakan gerakan tadi dalam lingkup tertib SDM Kearsipannya.”
Jelasnya.

Plt. Kepala ANRI, M. Taufik dalam pembukaan acara mengapresiasi kegiatan sertifikasi yang diselenggarakan bersama kemenperin tersebut, karena tidak sekadar hanya silaturahmi tetapi juga saling berbagi dalam sinergi antara ANRI bersama kementerian lainnya, khususnya Kemenperin RI.

“Saya mengapresiasi hari ini. Pada kegiatan pagi ini tidak sekadar kita hanya silaturahmi menjadi penting, tetapi bagaimana nanti kita saling berbagi dalam konteks yang sering digaungkan dan sering dikumandangkan,” jelas M. Taufik.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan ujian tertulis dan sesi *Focus Group Discussion*, serta ujian wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris Utama ANRI, Imam Gunarto, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Sumrahyadi, serta Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman. (rnz)

FOTO: DOK. ANRI

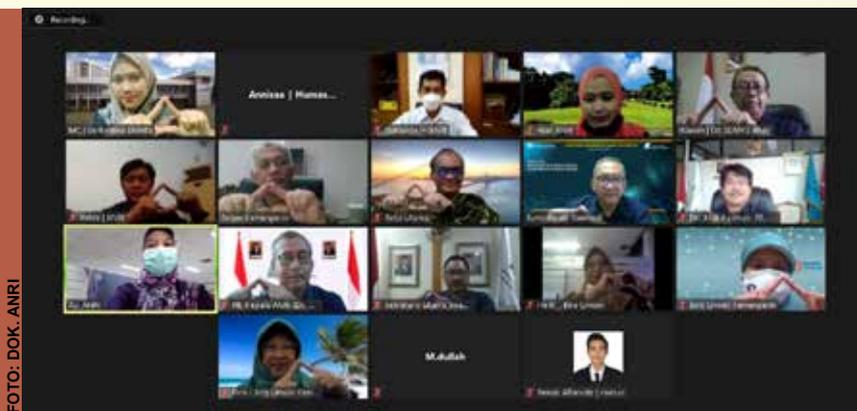


FOTO: DOK. ANRI

Peserta pembukaan acara sertifikasi arsiparis di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia saat melakukan sesi foto bersama (17/03/21).

BIG SERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI (kanan) M. Taufik saat menerima arsip statis berupa Atlas yang diserahkan oleh Kepala BIG (kiri) Muh Aris Marfai dalam rangka Serah Terima Arsip Statis Badan Informasi Geospasial RI Kepada Arsip Nasional RI sebagai Memori Kolektif Bangsa (06/04/21).

Jakarta (06/04) - Badan Informasi Geospasial (BIG) menyerahkan Arsip Statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip statis yang diserahkan berupa arsip Eks. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) antara lain Atlas dan Peta. Atlas terdiri dari Atlas Sosial dan Sumber Daya serta Atlas Dinding. Sedangkan Peta terdiri dari Peta Garis Pangkal, Peta Lapangan Terbang, Peta Lingkungan Bandara, Peta Rupabumi Indonesia, Peta *Sealand*, Peta *World Aeronautical Chart* (WAC) dan Peta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari tahun 1986 s.d. 2009 yaitu sebanyak 250 nomor arsip (14 jilid atlas dan 240 lembar arsip peta). Arsip tersebut

diserahkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai kepada Plt. Kepala ANRI, M. Taufik di Kantor ANRI, Ampera Raya, Jakarta, 6 April 2021.

“Arsip statis yang diserahkan merupakan memori yang sangat penting bagi kita dan generasi mendatang, karena menggambarkan sejarah bangsa. Dengan diberikannya arsip statis pada hari ini berarti kita telah mewariskan informasi yang sangat berharga di Indonesia sebagai bahan perenungan dan pembelajaran bagi generasi mendatang, dan seterusnya”, tutur M. Taufik dalam sambutannya.

Sementara itu Kepala Badan

Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai menyampaikan pentingnya penyerahan arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. “Pengelolaan arsip yang tertib merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip, terutama arsip geospasial yang merupakan arsip terjaga BIG, yang harus dilaporkan dan diserahkan ke ANRI sebagai pertanggungjawaban nasional”, ungkapnya

Muh Aris Marfai berharap kegiatan serah terima arsip statis dari BIG ini dapat dilaksanakan secara berkala, sebagai wujud bukti pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BIG. (is/md)

MENTERI BUDI KARYA PAPARKAN PERAN ARSIP DALAM MENDUKUNG KINERJA KEMENHUB



FOTO: DOK. ANRI

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi saat membuka acara Webinar Menteri Bicara Arsip yang dilaksanakan secara daring dengan dihadiri 900 peserta dan para pejabat serta pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia (13/04/21).

Jakarta (13/04) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyelenggarakan *webinar* dengan tema Menteri Bicara Arsip, Peran Arsip dalam Mendukung Kesuksesan dan Keberhasilan Kinerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).

Acara yang diselenggarakan melalui aplikasi *Zoom Meeting* tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, serta para Pejabat dan pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan RI dan ANRI.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, menuturkan bahwa semua yang dilakukan Kementerian Perhubungan RI terekam di dalam Arsip. M. Taufik mengajak kepada para peserta webinar untuk turut serta menjaga dan melestarikan Arsip sebagai akuntabilitas kinerja. M. Taufik juga menyampaikan siap mendukung Kementerian Perhubungan melalui sektor Kearsipan.

“Semua yang dilakukan Bapak Menteri beserta jajarannya terekam dalam namanya arsip. Oleh karena itu, hari ini mari, rekaman itu kita jaga dan kita lestarikan dengan baik, tidak hanya sekedar menjaga dan

melestarikannya, arsip dapat menjadi bukti akuntabilitas kinerja Bapak Menteri dan Kementerian beserta jajarannya”, terangnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa kegiatan Arsip di Kemenhub sudah bagus sehingga dapat berlangsung dengan baik. Salah satu bukti Kemenhub RI dalam memperbaiki kegiatan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan RI adalah adanya Gedung Pusat Arsip Kementerian Perhubungan di Soreang.

“Kegiatan Arsip di Kementerian Perhubungan sudah begitu bagus



Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia saat memberikan sambutan pada acara Webinar Menteri Bicara Arsip (13/04/21).

sehingga dapat berlangsung dengan baik. Bapak/Ibu sekalian kita tahu bahwa dulu kita memiliki (kegiatan Arsip) di Gedung Sate pindah ke Wastu Kencana dan sekarang di Soreang, semua itu adalah upaya kita untuk memperbaiki semuanya”, ungkapnya.

Budi Karya menambahkan bahwa pembangunan Infrastruktur idealnya dilengkapi dengan Arsip pembangunan. “Pembangunan infrastruktur idealnya dilengkapi Arsip pembangunan yang terdiri dari Arsip Perencanaan, Arsip IMB, Arsip Pelelangan, Arsip Kontrak, dan Informasi Kesesuaian Bangunan atau lebih dikenal dengan *As-Built Drawing* dan juga Sertifikat Laik Operasi atau sering disingkat SLF/SLOO. Nah kita (Kemenhub RI) memang tidak main-main karena ini (Pengelolaan Arsip) amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan”, jelasnya.

Lebih lanjut Budi Karya menerangkan bahwa dalam mengambil keputusan, Kemenhub selalu mendasarkan kepada Arsip. Apabila arsip tidak ada maka sulit untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, Budi Karya ingin menjadikan Arsip sebagai memori kolektif Bangsa yang dapat terwujud karena hal tersebut merupakan

sesuatu yang penting.

Acara webinar yang dibuka secara langsung oleh Budi Karya ini dihadiri sekitar 900 peserta dan diakhiri dengan pemaparan materi terkait penyelenggaraan kearsipan nasional dengan menghadirkan narasumber profesional di bidang kearsipan. (rnz)



Sebanyak 900 peserta yang terdiri dari Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan RI dan Arsip Nasional RI Menghadiri Kegiatan Webinar Menteri Bicara Arsip (13/04/21).

ANRI SELENGGARAKAN WEBINAR INTERNATIONAL GENDER EQUALITY

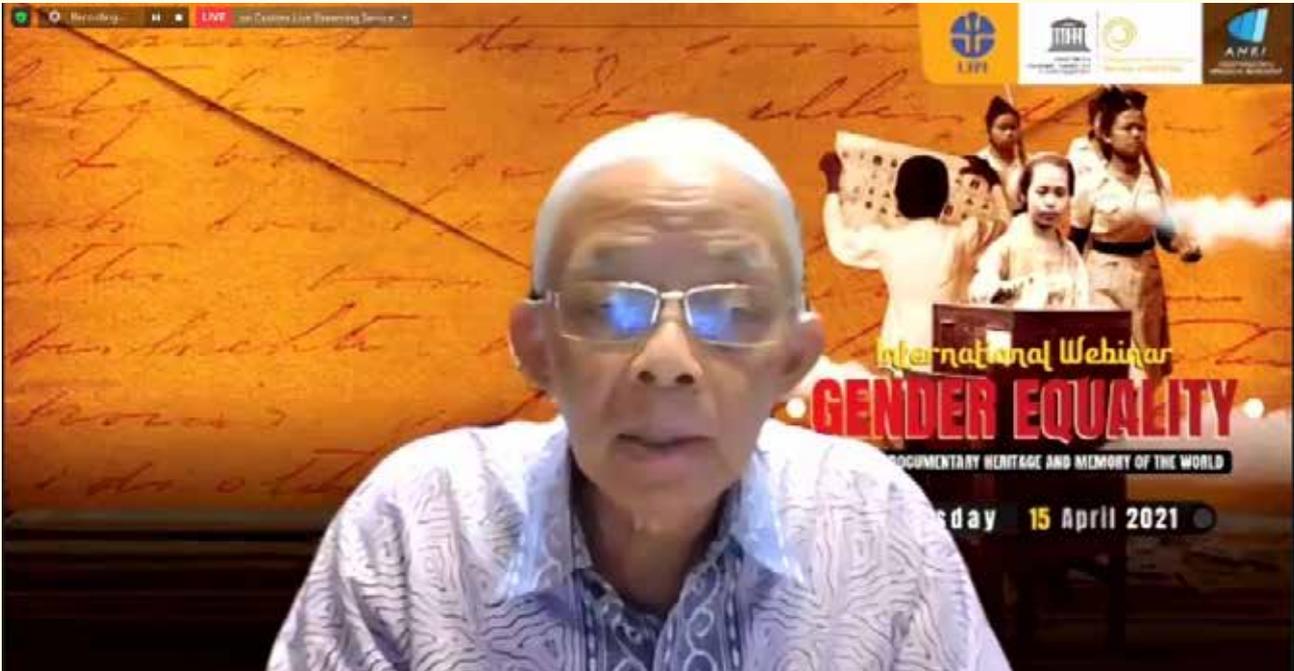


FOTO: DOK. ANRI

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Arief Rachman memberikan sambutan pada *International Webinar Gender Equality: Archival Documentary Heritage and Memory of the World* (15/04/21).

Jakarta (15/04) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan *Memory of the World* (MOW) Indonesia serta UNESCO menyelenggarakan Webinar Internasional dengan tema *Gender Equality: Archival Documentary Heritage and Memory of the World* pada Kamis, 15 April 2021. Acara yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting* ini, disiarkan pula melalui kanal *Youtube* ANRI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Acara webinar internasional ini diikuti oleh sekitar 1000 peserta yang berasal dari berbagai institusi dan masyarakat umum dan dibuka dengan beberapa sambutan (*opening remarks*) untuk menyampaikan

secara singkat pentingnya penyelenggaraan webinar mengenai *gender equality* ini.

Adapun sambutan acara disampaikan oleh Ketua Komite Nasional MOW Indonesia, Dudi Hidayat, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kemdikbud, Arief Rachman, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI, M. Taufik, dan Kepala LIPI, L. T. Handoko.

Selain dibuka dengan beberapa *opening remarks*, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I. G. A. Bintang Darmawati., juga hadir dalam webinar ini sebagai *Keynote Speaker*. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa saat ini arsip Indonesia yang dapat

dikategorikan sebagai MOW dari kategori *Gender Equality Markers* (GEM), ialah Arsip dari R. A. Kartini dan Arsip Kongres Perempuan Pertama.

Webinar Internasional dengan tema *Gender Equality: Archival Documentary Heritage and Memory of the World* dimoderatori oleh Koordinator Kelompok Kerja Sama Internasional ANRI, Adhie Gesit Pambudi, dan menghadirkan beberapa narasumber, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain Penasihat Komunikasi dan Informasi UNESCO, Dr. Ming-Kuok Lim yang menyampaikan mengenai pemahaman program kesetaraan gender dan cara mengaplikasikannya



Direktur Perpustakaan Universitas Leiden Belanda Kurt De Belder saat memaparkan tentang surat-surat Kartini sebagai warisan dokumenter dunia. (15/04/21).

dalam warisan dokumenter.

Narasumber berikutnya, Peneliti Senior dari LIPI, Kurniawati H. Dewi memaparkan mengenai kajian *gender* dan penelitian ilmiah mengenai arsip-arsip kesetaraan *gender* di Indonesia. Plt. Deputi Konservasi Arsip, Multi Siswati yang memaparkan perihal peningkatan kolaborasi untuk nominasi arsip kesetaraan *gender* pada MOW UNESCO. Sementara itu, Direktur Perpustakaan Universitas Leiden Belanda yang memaparkan tentang surat-surat Kartini sebagai warisan dokumenter dunia.

Pelaksanaan webinar mengenai *gender equality* ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan *gender* serta timbulnya kesadaran mengenai pentingnya warisan dokumenter budaya untuk dapat teregistrasi ke dalam warisan MOW, sehingga mendapatkan pengakuan dari MOW UNESCO.

ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, berupaya untuk mendukung program ini, karena hal ini dapat menjadi momentum bagi ANRI dalam membangun kesadaran publik terhadap kearsipan.

“Program ini harus segera diajukan dalam sebuah proses formal

agar teregistrasi dalam *Memory of the World*. Warisan dokumenter mengenai *gender* berperan dalam membangun peradaban umat manusia di dunia, baik masa kini maupun masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menilai penting dan sangat mengangkat permasalahan *gender*,” jelas Plt. Kepala ANRI, M. Taufik.

“Paradigma arsip adalah informasi dan sebuah pengetahuan. Sehingga harus diurus agar arsip dapat bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat di masa depan,” tambahnya.

Dalam paparan dari webinar *gender equality* ini, dijelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip kesetaraan *gender* sebagaimana yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini tertuang

pula di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional.

Namun, dalam daftar MOW, hanya ada empat dokumen dari 155 dokumen MOW yang berkaitan dengan pengarusutamaan *gender* dan keadilan *gender* dan sayangnya, dari keempat dokumen tersebut tidak ada satu pun dokumen yang berasal dari Indonesia. Sehingga, dengan adanya webinar mengenai *Gender Equality: Archival Documentary Heritage and Memory of the World* akan timbul kesadaran tinggi untuk melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai arsip-arsip Indonesia yang berpotensi dapat dijadikan MOW.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I. G. A. Bintang Darmawati, dengan adanya kesetaraan *gender* dalam dokumentasi sejarah dunia melalui program UNESCO, yaitu MOW akan memberi manfaat yang berharga bagi sisi sejarah, memberikan inspirasi serta motivasi untuk perjalanan kesetaraan *gender*. Pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan nasional merupakan strategi yang harus diterapkan di Indonesia. (rra)



Penasihat Komunikasi dan Informasi UNESCO, Dr. Ming-Kuok Lim menyampaikan materi pemahaman program kesetaraan *gender* dan cara mengaplikasikannya dalam warisan dokumenter. (15/04/21).

ANRI UMUMKAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH TAHUN 2020

Jakarta (20/04) - Pengawasan kearsipan tahun 2020 telah dilaksanakan terhadap 34 kementerian, 27 Lembaga Pemerintah Non kementerian, 32 lembaga tinggi negara, lembaga setingkat kementerian, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Non Struktural, 34 pemerintah daerah provinsi 508 pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2020, pengawasan kearsipan telah selesai dilaksanakan yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring.

Bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kearsipan yang digelar secara daring, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengumumkan nilai pengawasan kearsipan tahun 2020. Terdapat 45 (empat puluh lima) pencipta arsip nilai terbaik dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, lembaga setingkat kementerian, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Non Struktural, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik pengawasan kearsipan dilaksanakan untuk menjamin agar pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah dapat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi bagian dari upaya menuju satu arsip autentik



Arsip Nasional Republik Indonesia umumkan hasil Pengawasan Kearsipan tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah Tahun 2020 melalui daring (20/04/21).

untuk Indonesia maju, sehingga dapat mendukung *public trust*, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk memperoleh informasi kearsipan.

“Seharusnya, *goal* dari kearsipan adalah memberikan makna efektif dan efisien bagi organisasi. Bukan malah menimbulkan kerepotan bagi organisasi. Tidak ada lagi dokumen atau berkas menumpuk-numpuk. Apalagi sekarang sudah era digital. Hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 menunjukkan kabar baik bahwa terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” paparnya. Beliau pun menegaskan bahwa pengawasan kearsipan ini bukan menjadi alat untuk menghakimi benar atau salah, tetapi memotret keberhasilan bagaimana lembaga kearsipan nasional maupun lembaga kearsipan

daerah melakukan pembinaan kepada pencipta arsip atau lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2020, capaian nilai tertinggi kategori kementerian adalah Kementerian Kesehatan RI dengan nilai 99,60. Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah ANRI dengan nilai 98,76. Kategori lembaga tinggi negara, Lembaga setingkat kementerian, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Non Struktural adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan nilai 93,93. Kategori pemerintah daerah provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 92,08. Kategori pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Kabupaten Kebumen dengan nilai 98,35. (tk)

ANRI DAN JAWA BARAT SEPAKATI KERJA SAMA PENYELAMATAN DAN PEMANFAATAN ARSIP PANDEMI COVID-19



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI (kiri) M. Taufik menyerahkan arsip foto imunisasi massal untuk mencegah penyakit tuberculosis di Cirebon, Jawa Barat pada 1921 kepada Gubernur Jawa Barat (kanan) Ridwan Kamil (22/04/21).

Jakarta (22/04) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Pakuan, Bandung. Dalam kesempatan ini, M. Taufik juga menyerahkan arsip foto imunisasi massal untuk mencegah penyakit *tuberculosis* di Cirebon, Jawa Barat pada 1921 yang merupakan Khazanah ANRI dari inventaris KIT Jabar nomor 133/30 kepada Ridwan Kamil.

Dalam sambutannya M. Taufik menyatakan kesiapan ANRI dalam mendukung kegiatan penyelamatan

dan pemanfaatan arsip pandemi Covid-19 di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut, M. Taufik menyampaikan bahwa ANRI telah memiliki konsep pembangunan Galeri Arsip Pandemi Covid-19 yang akan menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menyampaikan ucapan terima kasih atas ditunjuknya Jawa Barat sebagai daerah percontohan untuk penyelamatan dan pemanfaatan arsip Covid-19. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia dan keragaman bentuk administrasi pemerintahan hingga ke tingkat desa, Jawa Barat merupakan wilayah yang tepat untuk menjadi sampel daerah dengan berbagai

problematika dalam penanganan Covid-19.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan Rencana Kerja Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat oleh Plt. Deputi Bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi. Melalui penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja tersebut, diharapkan akan meningkatkan hubungan kelembagaan dan sinergitas antara ANRI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun kearsipan nasional. **(agp)**

MENTERI NADIEM JADI SAKSI SERAH TERIMA ARSIP STATIS KEMENDIKBUD RISTEK KE ANRI

Jakarta (02/05) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyerahkan berkas arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Arsip statis yang diserahkan Kemendikbud Ristek berjumlah 998 berkas yang meliputi 549 berkas berupa data dan perkembangan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari tahun 1975 sampai 2019, serta 449 berkas berupa peraturan perundang-undangan Kemendikbud dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2016.

Arsip statis tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendikbud, Ainun Na'im kepada Plt. Kepala ANRI, M. Taufik di sela-sela acara Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta, 2 Mei 2021. Serah terima arsip statis tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Arsip statis berupa data organisasi



Plt. Kepala ANRI (kanan) M. Taufik saat berbincang santai membahas bidang kearsipan bersama Mendikbud Ristek (kiri) Nadiem Makarim pasca serah terima arsip statis Kemdikbud Ristek kepada ANRI (02/05/21).

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diserahkan merupakan memori yang sangat penting, sangat unik dan langka. Melalui arsip tersebut generasi mendatang dapat melihat kembali nilai luhur budaya spiritual bangsa.

Arsip statis berupa data organisasi kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa yang diserahkan merupakan memori yang sangat penting, sangat unik dan langka. Melalui arsip tersebut generasi mendatang dapat melihat kembali nilai luhur budaya spiritual bangsa.

Dengan diteruskannya arsip statis dari Kemendikbud Ristek ini, berarti Kemendikbud Ristek telah mewariskan informasi yang sangat berharga di Indonesia sebagai bahan perenungan dan pembelajaran bagi generasi mendatang.

Penyerahan arsip statis ini dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan upaya perlindungan serta pengelolaan memori kolektif bangsa Indonesia. **(is/ab)**



Plt. Kepala ANRI (kanan) M. Taufik menerima boks arsip secara simbolis dari Plt. Sekjen Kemendikbud (kiri) Ainun Na'im (02/05/21).

UPACARA PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-50, PLT. KEPALA: INSAN KEARSIPAN HARUS MELEK DIGITAL



FOTO: DOK. ANRI

Hari Kearsipan ke-50 diperingati dengan upacara bendera yang dipimpin oleh Plt. Kepala Arsip Nasional RI sebagai inspektur upacara dan diikuti secara daring oleh seluruh pegawai ANRI serta perwakilan Kementerian/Lembaga, Lembaga Kearsipan Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri (18/05/21).

Jakarta (18/05) - Memperingati tahun emas kearsipan yang jatuh tepat pada 18 Mei 2021, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021 secara daring dan luring. Acara secara daring dilaksanakan melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* dan secara daring di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C, ANRI. Peserta upacara terdiri dari seluruh pegawai ANRI, perwakilan pegawai di unit kearsipan Kementerian/Lembaga (K/L), Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Adapun tema Hari Kearsipan ke-50 yang diusung ialah “Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah

Mewujudkan Arsip Digital”.

Pada upacara ini bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan bahwa Hari Kearsipan yang jatuh pada 18 Mei 2021, harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan motivasi, memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta menjaga nilai kesejarahan yang dapat memberi makna mendasar dalam kehidupan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Dari waktu ke waktu kesadaran bangsa Indonesia untuk mengelola arsip (*records management*), sudah semakin baik.

“Saat ini kearsipan telah dijadikan sebagai salah satu instrumen Reformasi Birokrasi. Selain hal tersebut, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, pada 27 Oktober 2020 telah diresmikan penggunaan aplikasi Umum SPBE Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI), sebagai aplikasi bagi pakai Arsip dan Informasi, yang wajib dilaksanakan bagi seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” terang M.Taufik.

Lebih lanjut M.Taufik juga memaparkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Transformasi pengelolaan arsip digital sudah merupakan keniscayaan bagi insan kearsipan. Semua aktivitas kehidupan sudah serba digital atau *Internet of Thing* (IoT). Oleh karena itu, kita sebagai insan kearsipan harus “melek digital”. Bagaimana arsip digital diciptakan, dikelola, dilestarikan, dan kemudian diakses secara digital.

Selanjutnya, M. Taufik juga mengingatkan agar insan kearsipan dapat menguatkan kembali dunia kearsipan untuk melestarikan jati diri bangsa dan memperoleh semangat baru untuk semakin maju dan berkembang. Penyelenggaraan sistem kearsipan nasional juga menyediakan informasi dan hak keperdataan rakyat serta dinilai mampu mewujudkan transparansi dan kualitas pemerintahan. Arsiparis selayaknya mendapatkan tempat yang mulia karena berperan sebagai ensiklopedia berjalan dan menjadi kunci informasi seluruh lembaga.

Upacara peringatan Hari



FOTO: DOK. ANRI

Peserta upacara terdiri dari pegawai ANRI, perwakilan Kementerian/Lembaga, Lembaga Kearsipan Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri mengikuti upacara dengan khidmat melalui daring (18/05/21).

Kearsipan ke-50 kali ini sangat istimewa karena selain diperingati sebagai Tahun Emas sekaligus juga berdekatan dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Usai rangkaian upacara, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng serta penyerahan bingkisan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan ANRI kepada perwakilan pegawai ANRI dan penyerahan santunan kepada perwakilan 50 anak yatim dan masyarakat di sekitar ANRI.

Pada kesempatan ini, peserta upacara diwajibkan menggunakan baju adat yang menunjukkan keanekaragaman budaya nusantara. Selain itu, upacara juga disemarakkan dengan pemilihan peserta akun zoom upacara daring terantusias dengan para pemegang yang berasal dari Biro Umum Kementan, LKD Kota Depok, LKD Kab. Morowali, LKD Kabupaten Banjar, LKD Kota Palu (tk/tr)



FOTO: DOK. ANRI

Peringatan Hari Kearsipan ke-50 dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin oleh Plt. Kepala ANRI M.Taufik sebagai simbol kebersamaan dan kekeluargaan bagi seluruh komunitas kearsipan di Indonesia (18/05/21).

PENGUATAN TEKNOLOGI PELESTARIAN ARSIP MELALUI PRESERVASI DIGITAL



FOTO: DOK. ANRI

Webinar yang bertajuk *Digital Preservation - Knowledge of Technology, Information and Content* dilaksanakan secara daring dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dibidangnya. (25/05/21).

Jakarta (25/05) - Direktorat preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali mengadakan webinar yang bertajuk *Digital Preservation – Knowledge of Technology, Information and Content* : preservasi digital yang fokus terhadap pengetahuan teknologi, informasi dan kontennya. Webinar ini merupakan seri kedua dari rangkaian webinar yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh Direktorat Preservasi dan dapat diikuti oleh peserta melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan ditayangkan secara langsung melalui kanal *Youtube* Arsip Nasional RI.

Acara ini dibuka dengan pemutaran video dari Direktorat Preservasi tentang *E-Depot* di Arsip Nasional Republik Indonesia. Saat membuka acara, Direktur Preservasi, Kandar menekankan akan pentingnya autentifikasi arsip untuk mencegah hoaks yang beredar di masyarakat

saat ini. Preservasi digital selain memudahkan autentifikasi arsip, juga untuk menekan hoaks yang ada di masyarakat saat ini, karena masyarakat dapat mengakses secara langsung kebenarannya melalui arsip. Beliau juga menyampaikan bahwa preservasi arsip tidak hanya selalu fisiknya saja, tetapi juga informasi atau konten di dalamnya, yang dapat diakses dalam jangka waktu yang lama melalui preservasi digital.

Workshop daring tentang preservasi digital dihadiri oleh lebih dari 2000 peserta yang berasal dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia, dan masyarakat luas yang memiliki rasa antusias yang sama dalam melaksanakan preservasi digital di instansi mereka. Materi *webinar* disampaikan oleh William Kilbride, yang merupakan tokoh preservasi digital dari *Digital Preservation Coalition* (DPC) yang

berbasis di Inggris. William Kilbride menyampaikan bahwa preservasi digital merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh seluruh organisasi di dunia, agar mereka dapat selalu mengakses data dan informasi di dalamnya. Beliau pada saat menyampaikan materi juga sering menekankan akan pentingnya melakukan *back up data* untuk memastikan bahwa data penting yang kita miliki tidak akan hilang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun materi kegiatan dapat diakses dengan mengunjungi tautan <https://anri.go.id/publikasi/materi-kegiatan>.

Sebagai informasi, *webinar* dari preservasi arsip dilaksanakan dalam 4 seri dengan topik berbeda di tiap serinya, yakni Pengendalian Hama Terpadu pada Arsip (4 Mei 2021), Preservasi Arsip Digital (25 Mei 2021), Digitalisasi dan Pengelolaan Arsip Digital (10 Juni 2021), serta Restorasi Arsip Digital (29 Juni 2021). (dhn)

TIM *TASK FORCE* ANRI TERJUN DALAM PENYELAMATAN ARSIP TERDAMPAK KEBAKARAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBET



FOTO: DOK. ANRI

Tim *Task Force* Arsip Nasional RI bersiaga di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet, Jakarta Selatan. (28/05/21).

Jakarta (28/05) - Bencana kebakaran terus menghantui siapapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disebabkan oleh berbagai hal. Kejadian tersebut tentu merugikan bangunan, materi, dan kemungkinan rusaknya arsip penting. Jumat 18 Mei 2021 dini hari kebakaran terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet, Jakarta Selatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI langsung turun melalui Tim *Task Force* untuk membantu jika ada kemungkinan arsip rusak.

ANRI melalui Tim *Task Force* langsung berkoordinasi dengan bagian umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet. Diinformasikan bahwa arsip tidak terdampak langsung terhadap kebakaran yang terjadi dini hari tadi.

Karena kebakaran terjadi di lantai tiga ruang kerja dan juga ruang penyimpanan Alat Tulis Kantor (ATK). Adapun sebagian *file* personal yang ikut terbakar, namun *file* tersebut sudah memiliki *backup data*. Dalam hal ini, ANRI akan terus melakukan berkoordinasi lebih lanjut dan membantu menyelamatkan arsip, jika ada kemungkinan arsip rusak akibat bencana kebakaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet. (m)

ANRI GELAR RAKORNAS BIDANG KEARSIPAN TAHUN 2021



FOTO: DOK. ANRI

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka peringatan Hari Kearsipan ke-50 yang dilaksanakan di Hotel Santika Premier Hayam Wurung diikuti oleh peserta secara luring dan daring dengan tetap menjalankan protokol kesehatan (08/06/21).

Jakarta (08/06) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kearsipan dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-50 yang diselenggarakan secara luring dan daring. Acara Rakornas diikuti oleh peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, Perguruan Tinggi serta komunitas kearsipan di Indonesia.

Rakornas ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kualitas peran dan kemanfaatan bidang kearsipan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang tanggap terhadap dinamika era pemerintahan berbasis elektronik.

Rakornas tersebut juga

merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021 yang jatuh pada 18 Mei 2021. Peringatan Hari Kearsipan ke-50 ini merupakan momentum emas bagi Bidang Kearsipan untuk terus bersama-sama melangkah maju mendukung program pemerintahan berbasis elektronik, sesuai dengan tema Hari Kearsipan Ke-50 "Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital".

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI M. Taufik berharap penyelenggaraan kearsipan di Indonesia dilakukan berbasis digital. "Diharapkan penyelenggaraan kearsipan mampu mendorong cara-cara baru pengelolaan arsip ke arah digital supaya lebih efektif dan

efisien", terang Plt. Kepala ANRI, M. Taufik dalam sambutan.

Lebih lanjut M. Taufik menyampaikan bahwa inovasi di bidang kearsipan harus terus dilakukan, sistem pengamanan arsip terus ditingkatkan karena paradigma saat ini kearsipan bukan hanya untuk pengelolaan arsip pemerintah tetapi juga untuk tema-tema publik yang berisikan konten dengan layanan arsip yang cepat dan optimal.

"Kami sangat mengapresiasi upaya nyata ANRI untuk bertransformasi menjadi salah satu instansi yang berperan dalam transformasi digital nasional", terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PANRB, Alex Denni.

Ditambahkan olehnya, pengelolaan arsip yang baik dan benar akan turut mendukung penyediaan arsip yang autentik dan terpercaya, sehingga diharapkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pada Rakornas Kearsipan Tahun 2021, turut hadir para narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. **(is)**

ANRI MENGIKUTI RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI II DPR RI



FOTO: DOK. ANRI

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang dilanjutkan dengan pembahasan pendahuluan RAPBN tahun 2022, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPR RI, Jakarta (08/06/21).

Jakarta (08/06) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik, didampingi oleh Sekretaris Utama ANRI, Imam Gunarto, menghadiri kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

Kegiatan rapat dengan Komisi II DPR RI tersebut juga dihadiri oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Kepala BKN, Bima Aria Wibisana, Kepala LAN, Adi Suyanto, Ketua KASN, Agus Pramusinto, Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih.

Rapat tersebut dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 serta Pembicaraan

Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun 2022. (md)



FOTO: DOK. ANRI

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dihadiri oleh Plt. Kepala ANRI M. Taufik dan didampingi oleh Sekretaris Utama ANRI Imam Gunarto, rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri PANRN Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Bima A. Wibisana, Kepala LAN Adi Suyanto, Kepala Ketua KASN Agus Pramusinto, dan Ketua Ombudsman Mokh Najih (08/06/21).

PRESIDEN JOKOWI: PENGELOLAAN ARSIP HARUS GUNAKAN CARA BARU



FOTO: BPMI SETPRES

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan arahan berupa apresiasi dan dukungan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah membangun Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Arahan tersebut disampaikan dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan Ke-50 yang dilaksanakan di Gedung Arsip Gajah Mada, Jakarta (09/06/21).

Jakarta (09/06) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pada era disrupsi teknologi saat ini, pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Kearsipan ke-50 yang digelar secara daring dan luring di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), jalan Gajah Mada nomor 111, Jakarta Barat. "Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaan tidak efisien, akses yang lama untuk menemukannya dan juga penyimpanan yang tersebar di mana-mana. Presiden Jokowi pun memberikan apresiasi dan dukungan kepada ANRI yang telah membangun Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, agar pengelolaan arsip dinamis lebih terintegrasi, efisien dan efektif, sehingga lembaga

pemerintah pusat maupun daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri," terang Presiden Jokowi.

Ditambahkan beliau, keamanan juga merupakan hal utama pada inovasi kearsipan. Ini tak lain karena inovasi adalah kunci kemajuan terhadap adaptasi teknologi digital yang harus segera dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan layanan arsip yang cepat dan nyaman. Presiden Jokowi pun menekankan bahwa arsip menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dengan cepat, menjadi dokumentasi kekayaan negara termasuk seni dan budaya. Khazanah arsip harus disajikan secara menarik sehingga memunculkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa dan negara. Pada tahun emas kearsipan ini,

Presiden Jokowi juga berpesan agar momen ini menjadi momentum bagi ANRI untuk melakukan lompatan kemajuan, berbenah diri, berinovasi, dan beradaptasi dengan teknologi, sehingga dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa.

Sebagai informasi, peringatan Hari Kearsipan ke-50 mengusung tema Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital. Adapun puncak peringatan Hari Kearsipan ke-50 diikuti seluruh komunitas kearsipan secara daring dan luring yang dihadiri tamu undangan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pada kesempatan ini pun turut dilaksanakan pemberian anugerah kearsipan kepada instansi pemerintah pusat yang memperoleh nilai hasil pengawasan tahun 2020 yang masuk 3 besar pada tiap kategori. **(tk)**

MALAM PUNCAK PERINGATAN DAN PENGHARGAAN HARI KEARSIPAN KE-50



FOTO: DOK. ANRI

Menteri PANRB (tengah) Tjahjo Kumolo didampingi oleh Plt. Kepala ANRI (kiri) M. Taufik saat memberikan penghargaan kearsipan tingkat Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Non Struktural/Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawasan kearsipan dilaksanakan terhadap 634 Kementerian/ Lembaga/ Daerah dengan menilai 4 aspek yaitu: aspek kebijakan, aspek pembinaan, aspek pengelolaan arsip dinamis, dan aspek sumber daya kearsipan. (09/06/21).

Jakarta (09/06) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan kegiatan Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-50 dengan tema: "Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital", yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Juni 2021 di Gedung Arsip Nasional jalan Gajah Mada, nomor 111, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momen emas untuk merangkul pencapaian penyelenggaraan kearsipan sejak tahun 1971 juga sekaligus menjadi momen lepas landas di bidang kearsipan untuk memasuki era digital dengan tingkat kesiapan yang lebih matang.

"Peringatan Hari Kearsipan ke-50 ini kami mengambil tema "Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital" tentunya hal ini memiliki makna yang sangat penting dan mendalam, karena di era Revolusi Industri 4.0 ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, segala sektor kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara tidak luput dari teknologi informasi digital yang sangat berdampak di bidang kearsipan", terang Plt. Kepala ANRI, M. Taufik dalam laporannya.

Lebih lanjut M. Taufik menambahkan bahwa Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan

merupakan rangkaian Peringatan Tahun Emas Kearsipan di Indonesia. Sebelumnya diawali dengan Upacara Hari Kearsipan, Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan, dan Eksibisi Virtual Kearsipan Indonesia diikuti oleh seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah, serta Pemberian Penghargaan Kearsipan atas capaian kinerja pemerintah pusat dan daerah. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai momentum untuk meningkatkan motivasi, memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, melalui tanggungjawab di bidang kearsipan.

Melalui Peringatan Hari Kearsipan



FOTO: DOK. ANRI

Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50 Tahun 2021 dihadiri oleh 100 undangan yang terdiri dari perwakilan Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Non Struktural/Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan menjalani swab antigen untuk seluruh undangan dan pengisi acara (09/06/21).

Ke-50, penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional memperoleh tambahan energi positif dan spirit yang baru untuk meningkatkan perannya dalam memberikan manfaat secara nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pentingnya inovasi dalam pengelolaan kearsipan. Presiden Jokowi meminta agar cara-cara lama dalam pengarsipan ditinggalkan. Seperti pengelolaan arsip yang tidak efisien, akses yang lamban, dan memerlukan waktu lama untuk menemukannya. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat acara puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50

melalui virtual, Rabu (9/6/2021). “Pengelolaan Arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital,” terang Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa negara-negara di dunia saat ini sedang berlomba-lomba untuk berinovasi dalam menciptakan arsip berbasis elektronik.

Pada Puncak Malam peringatan Hari Kearsipan Ke-50, dilaksanakan pula penghargaan kearsipan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah yang memperoleh nilai hasil pengawasan terbaik, yakni tiga peringkat terbaik pada lima kategori. Kelima kategori itu antara lain: Kementerian,

Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Non Struktural/Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawasan kearsipan dilaksanakan terhadap 634 Kementerian/Lembaga/ Daerah dengan menilai 4 aspek yaitu: aspek kebijakan, aspek pembinaan, aspek pengelolaan arsip dinamis, dan aspek sumber daya kearsipan.

Pada kesempatan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didampingi oleh Plt. Kepala ANRI menyerahkan penghargaan kepada instansi yang memperoleh peringkat tiga terbaik. **(er/is)**

ANRI GELAR ANUGERAH KEARSIPAN TAHUN 2021



FOTO: DOK. ANRI

Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50 Tahun 2021 dimeriahkan dengan pemberian Anugerah Kearsipan tingkat kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, lembaga setingkat kementerian, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Non Struktural, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (09/06/21).

Jakarta (09/06) - Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Kearsipan ke-50, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan anugerah kearsipan kepada pencipta arsip yang menjadi tiga besar capaian nilai hasil pengawasan kearsipan. Pencipta arsip tersebut terdiri dari dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, lembaga setingkat kementerian, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Non Struktural, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Anugerah kearsipan disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik.

Berdasarkan pengawasan kearsipan tahun 2020, 3 besar capaian nilai tertinggi kategori kementerian, pertama Kementerian Kesehatan. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ketiga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kategori Lembaga Pemerintah Nonkementerian, adalah ANRI, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Administrasi Negara. Kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga setingkat kementerian, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Nonstruktural adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kategori pemerintah daerah provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Kategori pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang.

Anugerah kearsipan yang dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Kearsipan ke-50 ini digelar secara daring dan luring di Gedung ANRI, jalan Gajah Mada nomor 111, Jakarta Barat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Acara ini pun dapat disaksikan dalam siaran ulang di saluran youtube Arsip Nasional RI dengan tautan <https://www.youtube.com/watch?v=32EY8N2n7nl>. **(tk)**

MOMEN TAHUN EMAS KEARSIPAN, RIAU SERAHKAN HIBAH TANAH DAN GEDUNG KEPADA ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Menteri PANRB (tengah) menyaksikan penyerahan sertifikat tanah yang diberikan oleh Gubernur Riau (kanan) Syamsuar kepada Plt. Kepala ANRI (kiri) M. Taufik (09/06/21).

Jakarta (09/06) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menghibahkan tanah dan gedung kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan luas tanah 8125 m2 dan 7 (tujuh) bangunan gedung dengan total luas bangunan 9553 m2. Tanah dan gedung ini berlokasi di jalan Adi Sucipto, Pekanbaru, Riau yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan depot arsip, untuk menyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan dan arsip statis milik Lembaga Negara tingkat pusat yang berada di wilayah Provinsi Riau.

Adapun penyerahan sertifikat tanah dan gedung dilaksanakan

oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik dan Gubernur Riau, Syamsuar yang disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, dalam acara puncak peringatan Hari Kearsipan ke-50 yang digelar secara daring dan luring di Gedung ANRI, jalan Gajah Mada nomor 111, Jakarta Barat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Plt. Kepala ANRI, M. Taufik memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Riau, beserta jajaran atas komitmennya untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam usaha penyelamatan

arsip bernilai guna berkelanjutan milik Lembaga Negara tingkat pusat yang berada di wilayah Riau. Hal tersebut menjadi wujud bahwa bidang kearsipan telah memperoleh perhatian serius dari Kepala Daerah di provinsi Riau.

Sebagai informasi bahwa pada tahun 2020, provinsi Jawa Barat (Jabar) pun telah menghibahkan tanah seluas 1.400 m2 yang rencananya akan diperuntukan membangun depot arsip untuk menyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan dan arsip statis milik Lembaga Negara tingkat pusat yang berada di daerah Jabar. **(tk)**

PERAN INDONESIA DALAM MELESTARIKAN MEMORI BUDAYA DUNIA



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI M. Taufik saat memberikan pemaparan materi pada *workshop* yang diselenggarakan oleh *National Center for Archives and Records (NCAR)* Saudi Arabia (09/06/21).

Jakarta (09/06) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik dalam perannya sebagai narasumber virtual *workshop* yang diselenggarakan oleh *National Center for Archives and Records (NCAR)* Saudi Arabia, berusaha memberikan pandangan bahwa Indonesia berperan aktif dalam melestarikan memori budaya dunia.

Indonesia, negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, 34 Provinsi dan 517 kabupaten/kota sudah tentu memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Keberagaman budaya ini kemudian melahirkan keberagaman bahasa, kesenian, agama/kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi dan peralatan, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan.

Keberagaman ini kemudian terekam di dalam arsip sebagai memori kolektif bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional yaitu menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Terdapat dua program utama yang diselenggarakan ANRI dalam konteks pemajuan kebudayaan yaitu Program Memori Kolektif Bangsa (*Memory of The Nation*) dan Program Memori Kolektif Dunia (*Memory of The World*). Pada tahun 2021, Program Memori Kolektif Bangsa (MKB) merencanakan untuk melakukan registrasi nasional beberapa arsip untuk ditetapkan sebagai MKB/ *Memory of The Nation (MON)*, yaitu, Arsip PT Semen Padang,

Arsip Tambang Batu Bara Ombilin, Sawah Lunto, Arsip Pekan Olah Raga Nasional ke-19 (PON) 2016 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-15 (Peparnas) 2016 di Jawa Barat.

Adapun Program *Memory of The World*, yaitu: Arsip Sukarno: *To build The World Anew*, Arsip Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok I, Arsip Kesetaraan Gender, Arsip Jalur Rempah.

Pada masa menandatangani, ANRI akan memperluas khazanah arsip melalui penelusuran dan kolaborasi dengan insititusi baik di dalam dan luar negeri. Selain itu, ANRI juga akan senantiasa menyelenggarakan berbagai program dalam upaya pemajuan kebudayaan bangsa demi kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang. (ws/ab)

ANRI GELAR RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN KEARSIPAN



FOTO: DOK. ANRI

Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 dilaksanakan bertujuan menyampaikan hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 dan melaksanakan evaluasi dengan harapan mendapat perbaikan kualitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan (10/06/21).

Jakarta (10/06) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Kearsipan tahun 2021. Acara Rapat koordinasi dilaksanakan di Hotel Santika Hayam Wuruk, Jakarta, 10 Juni 2021.

“Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Kearsipan tahun 2021 ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 dan melaksanakan evaluasi dengan tujuan untuk mendapatkan perbaikan kualitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan”, ungkap Plt. Kepala ANRI, M. Taufik dalam sambutan.

“Pada kegiatan Rakornas ini juga akan disampaikan *bestpractise* atas kinerja penyelenggaraan kearsipan pada PPAK dan Kabupaten Kebumen yang telah berhasil mendapatkan Kategori Sangat Memuaskan dengan Peringkat pertama, sehingga diharapkan dapat menginspirasi bagi Kementerian dan Lembaga”, terang Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI, Zita Asih.

Selain itu, untuk menambah pemahaman serta upaya menyusun strategi dalam perbaikan berkelanjutan atas kinerja dalam penyelenggaraan kearsipan, Panitia Rakornas mengundang narasumber dari Bappenas, Kemendagri, dan

Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan, maka pada kesempatan ini, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik menyerahkan Sertifikat Akreditasi kepada PT Bukit Asam, PT Semen Padang, PT Tata Bisnis Solusi serta menyerahkan piagam penghargaan pengawasan kearsipan kepada 30 Instansi Pusat dan daerah.

Rakornas Evaluasi Pengawasan ini dilaksanakan secara luring dan daring dan diikuti oleh 92 K/L tingkat pusat, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota. **(Inh/md)**

ANRI DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI CANANGKAN GNSTA DAN SERAH TERIMA ARSIP STATIS

Jakarta (14/06) - Pelaksana

Tugas (Plt) Kepala ANRI, M.Taufik bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Suhanto, melaksanakan kegiatan Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan Serah Terima Arsip Statis di lingkungan Kementerian Perdagangan RI.

ANRI selaku Lembaga Kearsipan Nasional sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI dengan Pencanangan GNSTA dan Serah Terima Arsip Statis.

Serah terima arsip statis merupakan momentum yang sangat berharga karena mewariskan jejak sejarah bangsa Indonesia. Pada kegiatan tersebut arsip yang diserahkan yaitu arsip photo dari Kementerian Perdagangan RI tahun 1960 dan 2005 sebanyak 18 nomor. "Arsip tersebut merupakan memori yang sangat penting bagi generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa. Dengan diserahkannya arsip statis berarti Kementerian Perdagangan telah mewariskan informasi yang sangat berharga di Indonesia sebagai bahan perenungan dan pembelajaran bagi generasi mendatang", ungkap M.Taufik dalam sambutan.

Dengan diserahkannya arsip statis Kementerian Perdagangan RI ke ANRI, maka 2 (dua) hikmah sekaligus yang diperoleh, yakni:



Plt. Kepala ANRI (kanan) M.Taufik menerima secara simbolis boks arsip dari Sekjen Kemendag RI (kiri) Suhanto pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan Serah Terima Arsip Statis di lingkungan Kementerian Perdagangan RI (14/06/21).

Pertama, Kementerian Perdagangan RI telah meninggalkan jejak memori yang sangat berharga bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi mendatang. Kedua, Kementerian Perdagangan RI telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa lembaga negara wajib menyerahkan arsip statis ke ANRI.

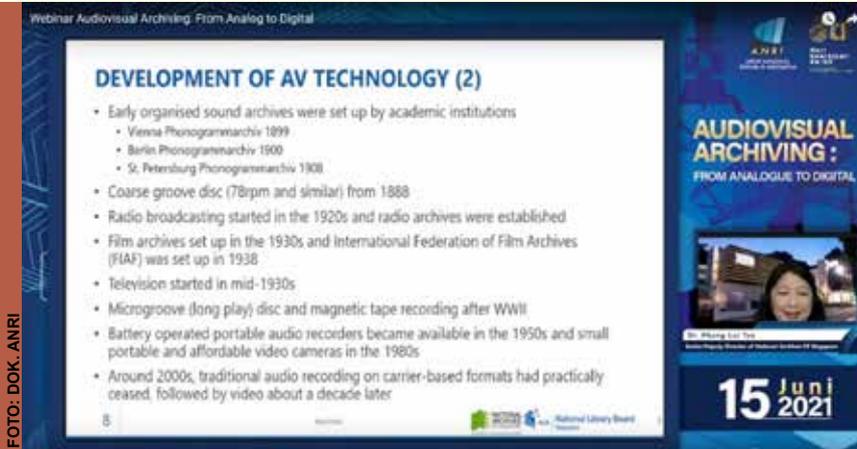
Pada kesempatan ini dilaksanakan pula Pencanangan GNSTA di lingkungan Kementerian Perdagangan RI. Pencanangan GNSTA di lingkungan Kementerian Perdagangan menggambarkan keseriusan dalam menangani dunia kearsipan dan hal ini bahwa Kementerian Perdagangan RI berkomitmen untuk mewujudkan tertib arsip serta kesadaran seluruh pejabat dan pegawainya semakin meningkat

dalam mengelola arsip.

Pencanangan GNSTA ini merupakan langkah awal untuk menyelamatkan warisan dokumenter yang telah mengubah tatanan kehidupan. Langkah berikutnya yang lebih kongkrit dalam kegiatan kearsipan harus segera diwujudkan. ANRI selaku lembaga pembina kearsipan nasional sangat memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI di bidang kearsipan.

Pencanangan GNSTA dan serah terima arsip statis di lingkungan Kementerian Perdagangan RI menjadi momentum yang sangat berharga, baik bagi Kementerian Perdagangan RI maupun bagi ANRI dalam mendukung program pengembangan bidang kearsipan pada umumnya. (md)

PENTINGNYA DIDORONG AKSELERASI DIGITALISASI ARSIP AUDIO VISUAL



Senior Deputy Director, National Archives of Singapore Dr. Phang Lai Tee memberikan pemaparan materi pada acara *Webinar Audiovisual Archiving – From Analogue to Digital* yang dilaksanakan secara daring (15/06/21).

Jakarta (15/06) - Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar kegiatan webinar dengan tema *Audiovisual Archiving – From Analogue to Digital*. Webinar ini dilaksanakan melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan ditayangkan secara langsung melalui saluran akun *Youtube* Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pada sambutannya, Direktur Preservasi, Kandar menyampaikan bahwa kegiatan webinar diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Hari Kearsipan ke-50. Melalui webinar ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai arsip analog serta digital dan pelestarian arsip audiovisual seperti foto, video, *reel to reel sound*, dan rekaman suara.

Pada webinar ini turut dibahas bahwa ANRI harus menjadi inisiator untuk menyelamatkan materi audiovisual yang sangat rentan rusak,

baik film seluloid, pita magnetik atau rekaman suara, karena diperlukan upaya terus menerus untuk menyelamatkan materi tersebut. Materi audiovisual yang masih berupa analog dapat dianggap sebagai *moving image* atau *sound recording* yang dibuat dan disimpan pada materi non-digital. Ini bisa dikategorikan menjadi tiga aspek : *imprint*, film dan media magnetik.

Mayoritas materi audiovisual saat ini yang dibuat pada abad ke-21 telah berupa digital dan disimpan sebagai *file* digital. Hal penting terkait materi digital adalah memastikan bahwa materi tersebut dapat diakses pada masa mendatang. Materi audiovisual digital adalah materi yang pada awalnya berupa analog atau media hibrida dan telah diciptakan kembali sebagai representasi digital dari media asli. Untuk materi yang didigitalkan, momen konversi dari media analog asli menjadi *file* digital

adalah proses membuat keputusan preservasi terbesar dalam perjalanan hidupnya. Kebijakan preservasi yang penting ini memiliki banyak kendali atas materi digital dan mampu membuat menyelamatkan risiko kerentanan materi analog. Karena jumlah arsip audiovisual di ANRI adalah koleksi yang besar dan terancam rusak maka sangat penting didorong untuk segera didigitalisasi.

Webinar preservasi seri ke-3 diikuti oleh lebih dari 4000 peserta yang berasal dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah dan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga kepala dinas instansi daerah. Narasumber pada webinar kali ini diisi oleh Dr. Phang Lai Tee yang berprofesi sebagai *Senior Deputy Director, National Archives of Singapore*. Phang membahas tentang seputar sejarah dan perkembangan teknologi dan media serta pendigitalisasian arsip audiovisual. Adapun materi kegiatan webinar dapat diperoleh dengan mengunjungi tautan <https://anri.go.id/publikasi/materi-kegiatan>.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan rangkaian ketiga dari empat seri webinar yang sudah dilaksanakan sejak bulan Mei dan berakhir pada bulan Juni, yaitu Pengendalian Hama Terpadu pada Arsip (4 Mei 2021), Preservasi Arsip Digital (25 Mei 2021), Digitalisasi dan Pengelolaan Arsip Digital (15 Juni 2021), dan webinar selanjutnya adalah Restorasi Arsip Digital (29 Juni 2021). (dhn)

WUJUDKAN BIROKRASI LEBIH EFISIEN, ANRI TERUS BUMIKAN APLIKASI “SRIKANDI”

Bali (16/06) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Kearsipan Daerah II menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi E-Arsip Terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan Aplikasi SRIKANDI. Acara yang bertujuan untuk lebih membumikan aplikasi SRIKANDI ini digelar di Ballroom Hotel The Anvaya Beach and Resort, Kuta, Bali. Pada rakor ini turut diundang perwakilan dari seluruh mitra yang menjadi daerah binaan Direktorat Kearsipan Daerah II baik Provinsi, Kabupaten dan Kota serta turut hadir Gubernur Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha.

I Dewa Putu Sunartha dalam sambutannya mengatakan bahwa ANRI telah mengimplementasikan kebijakan *work from Bali*, guna menghidupkan kembali kehidupan di Bali yang sejak adanya pandemi Covid-19 seakan mati suri. ANRI juga telah mewujudkan penyelenggaraan arsip digital terintegrasi yang tetap akuntabel walau dikerjakan di manapun. Terlebih saat ini juga sudah tersedia tanda tangan elektronik, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien. “Semoga dengan adanya aplikasi SRIKANDI ini menjadi awal yang baik demi terwujudnya sinergi antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah,” terang I Dewa Putu Sunartha.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik menyampaikan bahwa kearsipan telah mengalami



Plt. Kepala ANRI (tengah) M. Taufik didampingi Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan (kanan) Sumrahayadi dan Asisten 3 Provinsi Bali (kiri) I Dewa Putu Sunartha memukul gong sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Implementasi E-Arsip Terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan Aplikasi SRIKANDI (16/06/21).

pasang surut dan akhir-akhir ini telah terjadi peningkatan signifikan yang ditandai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada acara Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-50. Melalui arahan tersebut menggambarkan bahwa Presiden menaruh perhatian khusus pada dunia Kearsipan. “Oleh karena itu, selanjutnya tinggal bagaimana peran kita insan kearsipan untuk bisa merealisasikan arahan dari Presiden tersebut. Hilangkan ego sektoral, ego individu dan bergerak sendiri-sendiri dalam membangun rumah besar kita yaitu kearsipan demi memajukan bangsa dan negara karena salah satu fungsi dari arsip adalah menjaga kedaulatan bangsa,” jelas M. Taufik.

Tak hanya itu, pada arahan M. Taufik juga menegaskan kembali tentang peran arsip adalah sebagai *soft diplomacy*, contohnya ketika ada 2 (dua) pimpinan instansi bertemu pasti akan ada arsip yang dibawa

dan bahkan tercipta sebagai hasil dari pertemuan tersebut. “Saya juga pernah melakukan tanda tangan di depan 2 (dua) Kepala Negara dalam agenda kerja sama bidang kearsipan antara Indonesia dengan Singapura” terang M. Taufik.

Pada Rakor Implementasi E-Arsip Terintegrasi diselenggarakan diskusi panel yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Data dan Informasi ANRI, M. Imam Mulyantono dan turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada kesempatan ini, para peserta rakor juga disuguhkan penampilan seni Tarian “Sekar Jagad” yang menggambarkan kegembiraan para penari sebagai refleksi penduduk Bali dalam menyambut para tamu yang hadir. **(ys/ws)**

DIREKTORAT PRESERVASI SELENGGARAKAN WEBINAR RESTORASI DIGITAL ARSIP FILM



Peserta webinar melakukan foto bersama setelah mengikuti rangkaian webinar seri ke-4 tentang Restorasi Digital Arsip Film (29/06/21).

Jakarta (29/06) - Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali mengadakan webinar yang berjudul Restorasi Digital Arsip Film. Webinar ini merupakan seri keempat dari rangkaian webinar yang telah diselenggarakan sebelumnya.

Webinar diikuti peserta melalui aplikasi Zoom Meeting dan ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI. Rangkaian webinar ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Kearsipan ke-50 dengan tema Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital yang juga selaras dengan materi webinar seri ke-4 ini.

Pada webinar kali ini, turut diputar

video yang menjelaskan perbedaan antara arsip film yang sudah dan belum direstorasi, untuk memberikan gambaran kepada peserta webinar tentang perbedaan yang ada. Selain itu, hal ini pun dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya restorasi arsip film saat ini.

Pada sambutannya, Direktur Preservasi, Kandar menjelaskan pentingnya restorasi arsip film pada era digital, dengan mengemas arsip film yang sudah usang menjadi sesuatu yang berharga, menarik dan mudah untuk dipahami, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas. Arsip film yang direstorasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk pengakuan budaya Indonesia di kancah internasional dan dapat

menjadi aset yang diakui UNESCO. “Apalagi pada era digital saat ini, diperlukan keahlian untuk dapat melindungi data yang kita miliki dengan benar, agar dapat bersaing dengan negara lain,” terang Kandar.

Webinar kali ini diikuti lebih dari 3800 peserta, yang bersal dari pelbagai instansi, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia, serta masyarakat luas yang memiliki ketertarikan tentang restorasi film Indonesia dan manfaat dari restorasi film itu sendiri.

Materi webinar disampaikan oleh Lachman (Lavesh) Gordhan Samtani dan Andre Munadi yang merupakan *chief executive officer* dan *production manager* di PT Tiga Belas Entertainment. Kedua narasumber ini merupakan tokoh pegiat restorasi arsip film di Indonesia yang memberikan akses menonton film lawas kualitas HD melalui Flik.id. Kedua narasumber menekankan pentingnya restorasi arsip film untuk menyelamatkan sejarah dan budaya bangsa. Selain itu, materi film yang semakin lama semakin usang membuat film tersebut sudah tidak dapat lagi dinikmati karena ketersediaan alat pemutar yang sudah tidak ada dan materi film yang rentan rusak. Oleh karena itu, restorasi arsip film adalah hal yang wajib untuk dilakukan saat ini. Adapun materi kegiatan dapat diakses dengan mengunjungi tautan <https://anri.go.id/publikasi/materi-kegiatan>. (dhn)

Mari Dukung Kami Wujudkan

”
**PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK
YANG
BERSIH MELAYANI
DALAM**

Direktorat Layanan & Pemanfaatan | Pusdiklat Kearsipan
Pusat Jasa Kearsipan | Direktorat SDM Kearsipan & Sertifikasi
Pusat Akreditasi

”
 www.anri.go.id  [ArsipNasionalRI](https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI)  [@arsipnasionalri](https://twitter.com/arsipnasionalri)  [arsipnasionalri](https://www.instagram.com/arsipnasionalri)  [Arsip Nasional RI](https://www.youtube.com/ArsipNasionalRI)

Cara unduh Majalah ARSIP dalam format digital

1. Masuk ke www.anri.go.id
2. Klik menu “Publikasi Kami”
3. Pilih “Majalah ARSIP”
4. Unduh “Majalah ARSIP”
5. Majalah ARSIP tersedia dalam Portable Document Format (PDF) dapat dibaca menggunakan Adobe Acrobat

